

Mardiyah Chamim, dkk



ISBN 978-602-98652-1-9



koji
communications



A GIANT PACK of LIES
BONGKAH RAKSASA
KEBOHONGAN

Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

A GIANT PACK **of LIES** BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok di Indonesia

Tim Penulis

Mardiyah Chamim, Wahyu Dhyatmika, Stefanus Felix Lamuri, Farid Gaban, Alfian Hamzah

Tim Reporter

A. Jojo Raharjo, Anita Rahman, Parlindungan Sibuea, Bibin Bintariadi

Editor

Dwi Setyo Irawanto

Riset & Foto

Adri Irianto

Desain & Layout

Kgs. Mohammad Riduan

Ilustrasi Cover

Kendra Paramita

Prolog/Kata Pengantar

Dr. Kartono Mohamad

Diterbitkan oleh :

KOJI Communications bekerja sama dengan TEMPO Institute

Jakarta, September 2011

Daftar Isi

■ Dari Penulis	vii
■ Kata Pengantar : Sekilas Perjalanan Gerakan Tobacco Control di Dunia	ix
■ Bab I SAYA TIDAK ANTI ROKOK	1
■ Bab II INDONESIA, THE LAST FRONTIER	14
Laju Perokok Muda	17
Slow Motion Suicide	19
Udara Bersih Milik Publik	21
Rokok Vs Kebutuhan Dasar	23
Apakah Kita Bukan Bagian dari Dunia Internasional	24
■ Bab III PERTARUHAN NASIB INDUSTRI	29
Kapitalis Di Balik Layar	32
Pilihan Orang Dewasa	35
Regulasi = Industri Mati Esok Pagi	37
■ Bab IV KISAH DOKUMEN TOP SECRET	40
■ Bab V RELEVANSI DOKUMEN INDUSTRI	52
■ Bab VI STRATEGI DEVIDE ET IMPERA	63
■ Bab VII HAMPARAN BUKTI DI LAPANGAN	70
■ Bab VIII PERSEPSI KELIRU TENTANG PENGENDALIAN TEMBAKAU	82
■ Pengendalian Tembakau dalam Liputan Media	97
■ Lampiran	112

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Kata Pengantar

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN
MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Prolog

Sekilas Perjalanan Gerakan Tobacco Control di Dunia

Oleh : Dr. Kartono Mohamad

Gerakan menolak tembakau (rokok) sudah terjadi sejak akhir abad ke-19 di Amerika Serikat. Penolakan ini lebih karena alasan moralitas dan asap yang mengganggu orang lain terutama kalau berada di dalam gedung atau transportasi umum yang tertutup. Negara bagian Washington (bukan Washington DC), sudah melarang penjualan dan konsumsi rokok sejak tahun 1893.

Pada tahun 1916, Henry Ford, pemilik pabrik mobil Ford, sudah menolak menerima karyawan yang perokok:

"...We made a study of the effect (of smoking) upon the morals and inefficiency of men in our employ addicted to this habit and found that cigarette smokers were loose in their morals, very apt to be untruthful..."

Pengetahuan bahwa tembakau (nikotin) bersifat toksik (racun) dan adiktif sudah ada sejak sebelum itu. Pengetahuan (ilmiah) bahwa nikotin bersifat toksik dilaporkan pertama kali oleh ahli kimia tanaman Jerman, Wilhelm Heinrich

Posselt dan C.I. Reimann tahun 1829. Dan laporan otopsi pertama tentang kematian akibat rokok dilaporkan tahun 1887, terhadap seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang mati mendadak, "the cigarette poison had so destroyed the heart that it was unable to do its duty".

Di tahun 1910, Dr. Charles Pease dari New York membentuk organisasi bernama "Non Smokers Protective League"

dan menuntut agar pemerintah New York melarang orang merokok di tempat-tempat umum, seperti ruang makan di hotel, teater, dan kendaraan umum.

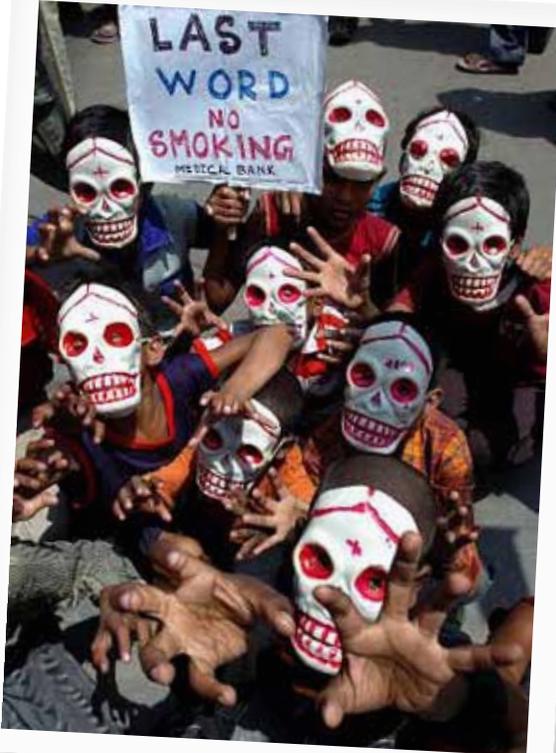


Foto : www.emmodesign.com

Penolakan rokok di Amerika Serikat kala itu makin meluas, tetapi industri rokok tidak kehilangan akal. Dalam Perang Dunia I (dan juga II), mereka memberikan rokok dan korek api (Zippo) kepada tentara yang ikut berperang. Uluran tangan ini disambut gembira oleh para prajurit

karena dianggap dapat mengurangi rasa kesepian dan stress di medan perang. Tanpa mereka sadari mereka mulai dijerat untuk teradiksi nikotin yang sekali terjerat tidak akan mudah lepas sepanjang hidupnya. "A wave of joy swept through the American Army today." tulis New York Times. Bahkan sejak tahun 1980an, sumbangan rokok tidak lagi gratis. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membeli seluruh produksi Bull Durham untuk dibagikan kepada prajurit di medan perang. Sampai the *Times* mengolok-olok pecandu rokok, "Kalau ingin rokok gratis, masuklah tentara".

Konsep yang semula menolak perokok sebagai orang yang tidak bermoral, oleh industri rokok dibalikkan menjadi dalil "*Finding a cigarette for a wounded soldier was an act of tender generosity in the 'brotherhood of the front'. Supporting such acts was a matter of patriotism*". Bull Durham memperkuatnya dengan semboyan, "Ketika prajurit kita menyalakan rokoknya, tentara Jerman pun mati".

Perang Dunia I telah menjadi titik awal dari berkembangnya raksasa industri rokok di Amerika Serikat secara nyata. Perlawanan dari gerkan anti tembakau masih ada tetapi tertutup oleh promosi rokok yang besar-besaran dan sangat kreatif. Beberapa perguruan tinggi seperti Wellesley College dan Bucknell University, masih melarang mahasiswanya merokok dan tidak bersedia menerima calon mahasiswa yang perokok atau peminum minuman keras. Tentu saja larangan ini mendapat perlawanan keras dari kaum muda yang perokok. Di sisi lain industri rokok ikut memanasi dengan menampilkan iklan-iklan yang menunjukkan merokok sebagai simbol kemerdekaan berekspresi dan perlawanan terhadap peraturan yang konservatif.

Salah satu kelihaiian industri rokok adalah memanfaatkan kontroversi dan menguatkannya ketika perlawanan --terutama dari kalangan ilmuwan yang telah menemukan bukti-bukti bahaya rokok bagi manusia-- semakin kuat,. Mereka tidak lagi sekadar memasarkan rokok secara generik seperti iklan Bull Durham ("When our boys light up, the Hun will light out") tetapi mengubah dengan mengarahkan agar konsumen loyal pada merek. Pada awalnya mereka tidak melawan temuan-temuan ilmiah mengenai bahaya rokok tetapi menawarkan kenikmatan jika merokok merek tertentu. Iklan rokok Camel misalnya menggunakan bintang-bintang film, bahkan dokter ("More doctors smoke Camel than other cigarettes").

Di tahun 20-an, orang tua tidak sanggup lagi menahan agar anak remajanya tidak merokok. Di antara remaja laki-laki disebarkan pandangan bahwa kalau tidak merokok, mereka lebih baik bergabung dengan para banci. Kepada remaja perempuan disebarkan pandangan bahwa "merokoklah kalau ingin dianggap setara dengan laki-laki". Pada tahap itu, industri rokok melawan gerakan anti rokok dengan menggunakan iklan yang kalau perlu dengan memutar balikkan fakta, seperti "perempuan merokok akan bertambah cantik", meskipun sebuah majalah di Buffalo melaporkan "*the coarsening effect upon young womanhood through*

smoking cigarette....are everywhere apparent”.

Bagi remaja perempuan yang melihat merokok sebagai bukti modernitas dan “kemerdekaan” dari kekangan aturan “kuno”, atau pertanda kesetaraan dengan laki-laki, peringatan bahwa merokok dapat membuat kulitnya menjadi kasar dan mudah keriput tidak membuat mereka berhenti merokok. Toh keadaan itu dapat ditutupi dengan kosmetika yang makin canggih sekarang ini.

Kemudian sejak tahun 1930 para ilmuwan mulai tertarik untuk melakukan penelitian tentang efek rokok terhadap faal tubuh manusia. Misalnya penelitian berseri yang dilakukan Mayo Clinic mengenai dampak rokok terhadap sistem peredaran darah. Metoda penelitiannya pun semakin canggih dan sangat terkendali. Di tahun 1930 seorang ilmuwan Argentina, A.H. Roffo, melakukan penyulingan asap rokok dan menggunakan teknologi spektroskopi yang relatif masih baru menganalisis zat-zat yang terkandung dalam asap dan tar rokok. Ia kemudian memberikan hasil teknologi penyulingan asap rokok kepada tikus. Ia berkesimpulan bahwa zat-zat yang terkandung dalam asap rokok terbukti karsinogenik. Dengan sigap industri rokok melawan hasil penelitian itu dengan dalih bahwa percobaan pada tuikus belum tentu dapat diproyeksikan kepada manusia dengan hasil yang sama. Demikian juga dalam menghadapi laporan Hoffman tentang prevalensi kanker paru yang meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rokok di beberapa negara bagian AS, industri rokok mempertanyakan kebenaran hubungan kausal antara rokok dengan kanker.

Menghadapi makin banyaknya hasil penelitian medis tentang bahaya rokok pada kesehatan manusia, industri rokok mencoba menandinginya dengan hal-hal yang dianggap ilmiah juga. Mereka membayar ilmuwan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat digunakan untuk membantah hasil penelitian yang menyatakan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. *Chesterfields* menggunakan Arthur Godfrey, entertainer yang mempunyai program tetap di tv untuk mengungkapkan sebuah hasil penelitian “sekelompok dokter umum dan spesialis” yang melakukan penelitian selama delapan bulan terhadap orang yang merokok *Chesterfields* selama 20 tahun, dan ternyata tidak satupun yang mengalami gangguan kesehatan. (Arthur Godfrey, seorang perokok setia *Chesterfields*, kemudian meninggal akibat kanker paru di tahun 1983).

Industri rokok secara bersama-sama kemudian mensponsori penelitian melalui lembaga penelitian independen untuk membuktikan bahwa tembakau tidak menyebabkan kanker paru. Karena hasil penelitian tidak memuaskan keinginan mereka, Presiden American Tobacco (gabungan perusahaan rokok AS) mengumumkan bahwa "publik harus diberikan ketenangan bahwa tidak ditemukan bukti meningkatnya kasus kanker paru disebabkan oleh merokok". Suatu pengumuman yang menunjukkan keraguan. Mereka kemudian membayar perusahaan PR (*public relation*) terkemuka untuk melawan "gempuran kalangan medis terhadap industri rokok".

Salah satu strategi yang dianjurkan oleh perusahaan PR tersebut adalah agar industri rokok membentuk lembaga riset sendiri yang kemudian disebut Tobacco Industry Research Committee (TIRC). Tugas TIRC adalah melakukan riset untuk "wisely answering the challenge of medicine". Salah satu tugas TIRC adalah menyampaikan sanggahan melalui media terhadap hasil penelitian medis yang mengaitkan rokok dengan kanker, agar media memberitakan "secara berimbang". Dengan demikian kontroversi akan terpelihara, dan publik akan bingung. Sebegitu jauh hasil TIRC tidak dapat membantah hasil penelitian medis tentang kaitan rokok dengan kanker.

Persoalan menjadi makin runyam ketika ada seseorang yang mengirim dokumen internal pabrik rokok kepada seorang peneliti dari University of California San Francisco, Glantz, yang kemudian menerbitkan serentetan tulisan di majalah kedokteran AS, JAMA, berdasar dokumen tersebut. Kemudian ia juga menerbitkan buku "Cigarette Papers" yang mengungkapkan bahwa industri rokok selama ini telah melakukan pembohongan publik. Salah satu kesimpulannya adalah

".....Quite the contrary, the documents show that B&W (Brown and Williamson) and BAT recognized more than 30 years ago that nicotine is addictive and that tobacco smoke is biologically active (e.g. carcinogenic)".

Konsekuensi selanjutnya adalah keputusan hakim dari Pengadilan Distrik Federal di Washington DC yang menyatakan

"...But what is involved at bottom is not arcane at all: it is a dispute over documents which may reveal that the Brown and Williamson tobacco company concealed for decades that it knew its product to be both

hazardous and addictive....."

Dari kutipan-kutipan di atas, tampak bahwa strategi industri rokok dalam menghadapi upaya pengendalian dilakukan melalui berbagai cara.

Pertama, memanfaatkan perokok yang sudah terjerat dan teradiksi untuk melawan dengan dalih bahwa pengendalian akan melanggar hak asasi perokok dalam mencari kenikmatan. Para perokok itu tidak sadar bahwa mereka adalah korban dari ccengkeraman rokok untuk memperkaya pemilik pabrik rokok. Seperti Drakula yang memanfaatkan korban gigitannya untuk mencarikan darah baru bagi Sang Drakula yang sudah memperbudak mereka.

Kedua, menciptakan dan memanfaatkan kontroversi pendapat mengenai rokok antara lain dengan menimbulkan keraguan terhadap hasil-hasil penelitian medik. Bila perlu mereka bersedia membayar peneliti-peneliti yang mau diarahkan hasil penelitiannya untuk kepentingan industri rokok. Seperti yang diungkap oleh Glantz dalam "Cigarette Papers"

"The documents showing lawyers steering scientist away from particular research....."

Ketiga, memanipulasi data dan fakta dengan menggunakan media untuk kepentingan mereka, misalnya dengan mengemukakan betapa rokok telah menyumbang kepada ekonomi negara.

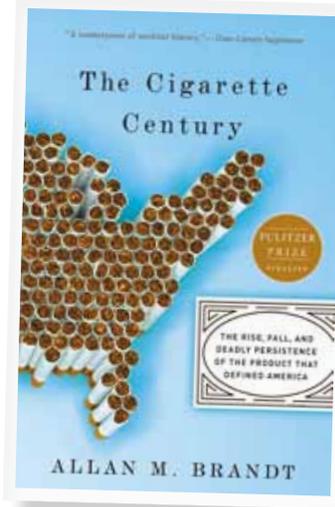
Keempat dengan menyebarkan mitos tentang risiko pengendalian konsumsi rokok bagi kehidupan rakyat kecil seperti petani, pedagang rokok, pekerja pabrik rokok, dan sebagainya. Mitos yang ditanamkan seolah-olah hal itu pasti akan segera terjadi kalau konsumsi rokok dikendalikan.

Kelima, menyuap para politikus yang dianggap mempunyai kekuasaan untuk menentukan kebijakan pengendalian konsumsi rokok. Bagi Indonesia, saat ini anggota parlemen merupakan sasaran mereka. Pertama karena banyak di antara mereka bermental lemah, kedua karena mengutamakan keuntungan pribadi akan lebih menjamin masa depan daripada menjaga integritas karena karier mereka ditentukan oleh pimpinan partai dan bukan oleh rakyat.

Dalam buku Cigarette Century ditulis : *"With growing regulatory concerns in the United States and a declining ability to subvert scientific*

realities, the American tobacco companies move to expand their international operations. The industry secured powerful governmental support for these efforts. US federal trade representatives, for example, repeating the mantra of open markets, worked assiduously through 1970s and 1980s to expand opportunities for American tobacco companies abroad by attacking high tariffs and bans on tobacco imports”

Sasaran mereka tentu saja adalah negara-negara yang pemerintahannya lemah, korup dan tidak mempunyai regulasi tentang konsumsi tembakau (rokok), seperti Indonesia. Begitu kuatnya cengkeraman mereka terhadap pemerintah dan politikus Indonesia sehingga di antara negara Asia, dan juga di antara negara-negara Islam anggota OKI, hanya Indonesia yang tidak menanda tangani (mengaksesi) FCTC, meskipun di awalnya ikut menyusun rancangan FCTC.



Kalau para politisi di parlemen mengatakan bahwa FCTC dan pengaturan konsumsi rokok merupakan desakan kapitalis, maka sesungguhnya mereka yang menolak itulah yang tunduk pada kapitalis pemilik industri rokok. Sampai pertengahan tahun 2011, sudah 174 dari 193 negara anggota WHO yang sudah menandatangani FCTC, termasuk China, Rusia, Kuba, Korea, Vietnam. Alangkah bodohnya kalau mengira bahwa mereka itu tunduk pada tekanan kapitalis.

Strategi yang dilakukan industri rokok di Indonesia terkadang terasa lebih kasat mata. Mereka justru seperti ingin menunjukkan bahwa para pejabat di negeri ini sangat mudah dan murah untuk mereka “rayu”. Sikap para pejabat pun menunjukkan bahwa mereka lebih tunduk kepada “tekanan” industri rokok dengan dalih bahwa industri rokok dan petani tembakau adalah juga *stakeholder* dalam pembahasan pengaturan terhadap konsumsi rokok.

Pemerintah dan anggota parlemen Indonesia telah melakukan

kebijakan yang diskriminatif terhadap pengaturan produk yang dianggap adiktif. Ketika membuat aturan tentang alkohol, adakah mereka menganggap pelaku industri minuman beralkohol sebagai *stakeholder*? Ketika mau mengatur tentang ganja sebagai bahan berbahaya, adakah mereka berbicara dengan petani ganja di Aceh? Perbedaan sikap inilah yang menunjukkan bahwa “desakan” industri rokok telah berhasil melemahkan mental pejabat dan politikus RI.

Hal ini secara implisit juga diakui mereka ketika membahas RPP tentang Tembakau yang sudah berkali-kali dirapatkan antar kementerian dan draft akhir sudah disepakati. Kembali draft itu masih harus diharmonisasi dan disarankan dirapatkan lagi dengan “*stakeholder*”, khususnya industri rokok. Kita menghadapi strategi “*dilute, delay, and delete*” yang dilakukan oleh industri rokok terhadap upaya pengaturan konsumsi tembakau seperti yang terjadi di Amerika dulu.

Buku “*Giant Pack of Lies - Bongkah Raksasa Kebohongan*” yang ditulis Mardiyah Chamim beserta timnya juga mengungkapkan betapa industri rokok di Indonesia melakukan berbagai pembohongan, manipulasi data dan fakta, dengan kekuatan uangnya yang nyaris tak terbatas. Jarang penulis di Indonesia yang mau atau berani mengungkapkan kemunafikan seperti ini. Perjuangan melawan adiksi rokok untuk melindungi generasi yang akan datang di Indonesia memang sangat berat. Kalau di negara lain perjuangan seperti ini hanya menghadapi industri rokok, atau industri rokok dan pemerintah, di Indonesia perjuangan itu menghadapi secara serentak industri rokok, pemerintah dan parlemen. Seperti yang terungkap dalam strategi industri rokok, mereka akan berhasil mencegah pengaturan konsumsi rokok di negara-negara yang mempunyai pemerintahan yang lemah dan korup.

Dr. Kartono Mohamad

**) Bahan diambil dari buku Allan M. Brandt, The Cigarette Century, Basic Books, New York, 2009. Allan M. Brandt adalah Dekan dari the Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University*

BAB I

Saya Tidak Anti Rokok

“Mbak Mardiyah anti rokok?”

“Apakah Anda ingin ratusan ribu buruh pabrik rokok dan petani tembakau kehilangan pencaharian? Jika pabrik rokok tutup, bagaimana dengan *wong cilik* pedagang asongan di perempatan jalan? Anda ingin mereka kelaparan?”

“Anda ingin negara miskin gara-gara kehilangan cukai rokok?”

Hujan pertanyaan itulah yang kerap menghampiri saya. Rentetan pertanyaan yang dengan mudah saya jawab tegas: “Tidak.”

Saya punya banyak teman, sahabat, saudara yang terkait, terjalin dan berkelindan dengan industri rokok. Ada sahabat dan saudara yang terjerat kecanduan rokok (kelompok ini yang paling banyak), ada teman yang pemilik toko kelontong dan pedagang asongan yang menjajakan rokok, ada pula kerabat yang buruh pabrik rokok di Kediri, Jawa Timur.

Keluarga beberapa teman saya adalah petani tembakau di Kabupaten Kediri, Malang, dan Jember (Jawa Timur), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), juga di Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Dengan tali temali persaudaran dan pertemanan seperti itu, bagaimana mungkin saya bersikap anti rokok? Saya tidak ingin *wong cilik*, yang sebagian di antaranya adalah saudara dan sahabat saya sengsara gara-gara industri rokok mati. Saya juga tak ingin ratusan ribu buruh, petani tembakau, dan pedagang asongan yang lain kehilangan mata pencaharian. Saya bekerja pada industri media, yang antara lain disokong oleh iklan rokok -- meskipun sebagian aktivis kesehatan masyarakat ingin agar iklan rokok dilarang total seperti yang telah diterapkan berbagai negara.

Benar, saya bukan perokok. Tapi, suka atau tidak, saya menjadi bagian dari masyarakat yang sudah telanjur terjerat candu nikotin. Tak mungkin ketergantungan itu dapat dilenyapkan dalam tempo singkat, seperti seorang pesulap mengenyahkan kelinci di dalam topi. Hidup di tengah masyarakat yang kecanduan rokok, dalam derajat tertentu, mesti diterima sebagai bagian dari realita -- dengan syarat: mesti ada pengaturan demi realita yang lebih baik.

Harus saya akui, industri rokok dapat menghidupi banyak kalangan, meskipun saya tak percaya dimensi ekonomi tersebut berjalan *fair*.



Konsumen, yaitu rakyat (termasuk yang bukan perokok), dan pemerintah harus membayar ekstra mahal untuk kecanduan nikotin beserta segala efeknya. Selain itu, industri rokok cenderung manipulatif: sengaja tak mengungkap banyak lapisan fakta secara terbuka, dan jujur. Sorotan dan klaim industri berhenti hanya pada angka yang mengkilap, bahwa industri ini menyerap 10 juta tenaga kerja, mulai dari petani, buruh linting, pedagang, sampai tenaga kreatif media dan periklanan. Klaim ini layak dipertanyakan. Pedagang kelontong, sektor kreatif media dan periklanan, misalnya, jelas tidak 100 persen dihidupi rokok, tapi juga oleh industri lain. Bohong besar jika ada yang mendaku bahwa pekerja periklanan, media, pedagang kelontong, dihidupi sepenuhnya oleh industri rokok.

Sayangnya, klaim hiperbolik tentang serapan tenaga kerja ini ditelan mentah-mentah oleh pemerintah, juga media. Klaim ini menjadi andalan industri rokok untuk membendung upaya regulasi pengendalian konsumsi rokok. Opini publik digiring ke level yang ekstrem: regulasi ditegakkan maka industri rokok akan mati besok pagi sehingga jutaan orang kehilangan pencaharian seketika. Ini merupakan kekhawatiran yang berlebihan, simplistik, dan tidak realistis mengingat puluhan juta orang Indonesia sudah kecanduan rokok. Mustahil para pecandu itu bakal berhenti merokok hanya karena ada RUU Pengendalian Produk Tembakau (baca *Bab-3 Pertaruhan Nasib Industri*)

Industri rokok bekerja keras membangun citra yang mengkilap, baik melalui iklan, *sponsorship*, maupun aneka program kegiatan CSR (*corporate social responsibility*, tanggung jawab sosial perusahaan). Selain menyerap banyak tenaga kerja, mereka mencitrakan diri sebagai pahlawan yang memberi sumbangan besar terhadap pendapatan negara – tanpa peduli apakah kontribusi tersebut berimbang dengan biaya kesehatan dan kualitas produktivitas bangsa. Selain itu, nasib lapisan terbawah dalam piramida industri rokok, yakni petani tembakau dan buruh linting rokok, hampir tak pernah diungkap secara mendalam.

Para pelinting merupakan mata rantai penting industri yang terabaikan. Ini tersimpul dari sejumlah riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFEU) yang dimotori Sarah Barber dan Abdillah Ahsan, yang berkali-kali meneliti aspek ekonomi industri rokok. Menurut hasil riset Abdillah, pada 2000-2006, upah bulanan pekerja industri rokok berada di bawah rerata upah buruh industri makanan

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA



dan industri lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Buruh industri rokok menerima Rp 452.000 sebulan, sedangkan buruh industri makanan Rp 547.000, dan buruh industri lain rata-rata digaji Rp 728.000 setiap bulan.

Piramida industri rokok teramat runcing. Aliran keuntungan hanya membanjiri segelintir juragan – yang menjadi langganan daftar orang kaya sedunia versi majalah *Forbes*, seperti Rahman Halim (pemilik Gudang Garam) dan Budi Hartono (pemilik Djarum). Beberapa tahun belakangan, kekayaan kelompok Djarum juga datang dari sumber lain seperti properti (kompleks hotel dan supermall Grand Indonesia) dan perbankan (BCA), namun peran rokok tetap saja sentral.

Selain para pemilik pabrik, biro iklan dan media juga mendapatkan potongan kue yang lumayan gurih. Empat pemasang iklan terbesar di media pada 2010, berturut-turut adalah industri telekomunikasi (Rp 5,5 triliun), aktivitas partai politik (Rp 2,9 triliun), perusahaan dan layanan sosial (Rp 2,3 triliun), dan industri rokok (Rp 1,9 triliun).

Namun mereka yang berada di lapis bawah piramid, punya cerita yang lain. Buruh pabrik dan petani tembakau, misalnya, praktis hanya mendapat recehan -- remah keuntungan yang bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan lapisan puncak piramid industri rokok. Para pelinting, yang terpapar langsung dengan nikotin di tempat kerja, bahkan kerap bekerja tanpa tunjangan kesehatan.

**RATA-RATA UPAH NOMINAL PER BULAN
Buruh Industri Di Bawah Mandor, 2000-2008, Ribuan**

Tahun/ Kuartal	Tembakau/ Rokok	Makanan	Seluruh Industri	% Tembakau terhadap Makanan	% Tembakau terhadap Seluruh Industri
2000/2	223,3	265,7	384	84	58,2
2000/3	247,3	323,6	412,3	76,4	60
2000/4	246,4	315,9	420	78	58,7
2001/1	283,3	353,1	473,6	80,2	59,8
2001/2	283,7	380,6	522,9	74,5	54,3
2001/3	290,6	384,4	539,6	75,6	53,9
2001/4	319,3	401,1	539,1	79,6	59,2
2002/1	348,4	453,9	617,1	76,8	56,5
2002/2	384,4	504,9	666,4	76,1	57,7
2002/3	324,9	483,4	653,6	67,2	49,7
2002/4	329,6	477	676,3	69,1	48,7
2003/1	384,4	458,1	727,7	83,9	52,8
2003/2	451,2	535	722,3	84,3	62,5
2003/3	443,7	560,7	713,9	79,1	62,2
2003/4	431,5	504,3	730,8	85,6	59
2004/1	505,8	586	819,1	86,3	61,8
2004/2	492,5	609,6	853,2	80,8	57,7
2004/3	502,7	584,7	839,9	86	59,9
2004/4	541,4	613,3	851,8	88,3	63,6
2005/1	505,3	620,3	876,6	81,5	57,6
2005/2	632,2	667,3	911,6	94,7	69,4
2005/3	744,2	799,9	939,4	93,0	79,2
2005/4	610,7	812,9	940	75,1	65,0
2006/1	802,2	894,3	982,2	89,7	81,7
2006/2	740	922,7	993,6	80,2	74,5
2006/3	738,1	918	954,2	80,4	77,4
2006/4	793,1	924,4	957,4	85,8	82,8
2007/1	803,1	932,2	876,4	86,2	91,6
2007/2	739,8	926,2	906,3	79,9	81,6
2007/3	778,8	937,1	938,9	83,1	82,9
2007/4	807,6	900,7	940	89,7	85,9
2008/1*	744,1	870	1097,6	85,5	67,8
2008/2*	751,6	873	1106,9	86,1	67,9
2008/3*	754,4	889,9	1109,7	84,8	68,0
2008/4*	753,4	886,5	1106,6	85,0	68,1

Catatan: * : Angka sementara ;

Sumber: Statistik Upah 2000-2004, Statistik Indonesia: 2005-2009

Aditya Wardhana, wartawan Voice of Human Right - VHR.Media.com, pada November 2008, membuat liputan menarik berjudul "Nasib Sang Pelinting". Dua ratus buruh di pabrik rokok Pakis Mas, Malang, Jawa Timur, harus tiba di depan pintu gerbang pabrik pada pukul 05.30, pagi. Mereka harus mengantri pembagian bahan baku yang merupakan lapis pertama *survival of the fittest* buruh pabrik rokok. "Antre, Mas, biar dapat jatah bahan baku banyak," kata Ana, seorang buruh. Mereka yang berada paling dekat dengan meja mandor berpeluang mendapatkan jatah bahan baku lintingan rokok lebih banyak.

Di Pakis Mas, setiap buruh diberi jatah melinting 2.500 batang rokok sehari, dengan upah Rp 9.000 untuk setiap 1.000 batang. Saban minggu Ana mengantongi upah Rp 135.000, atau sekitar Rp 540.000 per bulan.

Angka ini jauh di bawah upah minimum regional Kabupaten Malang yang mencapai Rp 802.000. Upah itu hanya bisa diraih jika Ana bekerja saban hari, tak boleh absen gara-gara sakit, apalagi membolos tanpa alasan. Upah buruh linting dibayarkan secara borongan. "*Nggak kerjo yo nggak bayaran,*" kata Ruchan, manajer pabrik. Tak bekerja, tak ada upah. Sederhana. Tunjangan kesehatan? Lupakan saja -- tak usah bermimpi.

Lalu, bagaimana nasib petani tembakau? Penelitian Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD - FEUI) memberi gambaran suramnya kondisi buruh dan petani tembakau. Penelitian digelar di berbagai wilayah penghasil tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lombok Timur, pada 2008. Buruh tani tembakau di Kendal, Jawa Tengah, hanya diupah Rp 15.899 per hari atau Rp 413.374 per bulan. Angka ini tak sampai separuh upah minimum setempat yang besarnya Rp 883.699. "Hanya 47 persen dari upah minimum," kata Abdillah Ahsan, peneliti Lembaga Demografi FEUI.

Di Bojonegoro, Jawa Timur, penghasilan buruh tani tembakau hanya Rp 17.256 per hari atau Rp 451.656 per bulan, lebih rendah dari upah minimum lokal yang Rp 630.000 saban bulan. Buruh tani di Lombok Timur juga membukukan kisah serupa. Upah mereka hanya Rp 13.920 per hari atau Rp 361.920 tiap bulan, kurang dari separuh upah minimum setempat yang Rp 730.000 sebulan.

Seperti buruhnya, nasib petani tembakau tak kalah memprihatinkan. Riset Lembaga Demografi menunjukkan, biaya produksi tanaman 'emas hijau' ini mencapai Rp 8.386 per meter persegi lahan sekali masa tanam dan hasilnya hanya Rp 12.448. "Jadi petani hanya untung Rp 4.000 per meter lahan untuk setiap masa tanam," kata Abdillah.

Mari simak pula penuturan Anak Kankunk dari Kabupaten Lombok Timur, NTB, di Kompasiana.com (<http://www.ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/06/06/nasib-petani-tembakau>). "Saya adalah keponakan salah satu petani tembakau yang kini jadi TKI (tenaga kerja Indonesia) di Malaysia. Mungkin jadi pada bingung, petani kok malah pergi ke Malaysia? Kenapa nggak mengurus lahan pertaniannya?"

Pada dua musim tanam terakhir, yaitu 2009 dan 2010, menurut Anak Kankunk, kebanyakan petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur,

Nusa Tenggara Barat, merugi. Penyebabnya dua: (1) harga bahan bakar melonjak hingga keseluruhan ongkos tanam tembakau jadi melonjak, dan (2) faktor alam yang kurang mendukung, fluktuasi cuaca yang kian ekstrem membuat tembakau tidak tumbuh optimal. "Ini membuat Paman dan beberapa petani tembakau yang merugi mengasingkan diri ke negeri jiran. Ironis, memang," begitu tulis Anak Kankunk. Dia menambahkan komentar, "Saat ini saya dan kakak saya juga sedang mengusahakan komoditi pertanian lain yang mungkin lebih cocok dengan keadaan tanah dan iklim di desa saya."

Cuaca yang tidak menentu memang jadi persoalan tersendiri bagi pertanian tembakau. Agar bisa dibeli industri dengan harga yang bagus, kadar air daun tembakau harus memenuhi derajat tertentu, *grade A* untuk kualitas terbaik dan *grade D* untuk mutu terendah. Rentang harga daun tembakau bisa teramat lebar, yakni Rp 40.000 untuk *grade A* dan hanya Rp 4.000 untuk *grade D*. Bayangkan 'bencana' yang harus dihadapi petani jika lahan yang siap panen mendadak diguyur hujan deras. Harga jual daun emas hijau ini langsung anjlok, bahkan panen bisa gagal total.

Bagi petani tembakau, masa panen selalu disambut dengan hati berdebar. Patokan *grade* daun tembakau ditentukan tengkulak



dan pengepul (pedagang pengumpul). Totok, petani tembakau dari Temanggung, Jawa Tengah, mengungkapkan kerisauan. “Musim panen kayak begini, para tengkulak alias cukong tembakau pada memainkan harga seenaknya,” kata Totok yang tak ingin jati dirinya diperjelas karena bisa berdampak pada nasib hasil panennya.

Totok melanjutkan penuturannya dengan pahit, “Kami ini *nanem* tembakau dengan modal utang. Mestinya harga ditentukan pemerintah, jangan seenaknya diatur tengkulak.” Jika ada pengusaha yang menolak, kata Totok, pemerintah bisa memberi sanksi dengan menutup gudang penampungan tembakau milik pengusaha. “Apa pemerintah takut sama cukong?” katanya tak mengerti.

Produksi Tembakau Indonesia (ton) Tahun 1990-2007

Tahun	Total Produk
1990	156.432
1991	140.283
1992	111.655
1993	121.370
1994	130.134
1995	140.169
1996	151.025
1997	209.626
1998	105.580
1999	135.384
2000	204.329
2001	199.103
2002	192.082
2003	200.875
2004	165.108
2005	153.470
2006	146.265
2007	164.851

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia 2007-2009).
Tembakau/Tobacco, 2008.

Petani tembakau seperti Totok berada dalam posisi tak berdaya. Mereka bagai terjerat lingkaran setan. Lazimnya, modal tanam tembakau didapat dari utang. Atau, jika tidak, petani harus menjual atau menggadaikan aset keluarga. Padahal, hasil panen tidak menentu baik lantaran cuaca maupun karena permainan cukong. Bagi petani, kepastian tengkulak membeli hasil panennya merupakan persoalan hidup mati. Itu sebabnya, petani mudah dimobilisasi untuk berdemonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, demi menentang Rancangan Undang-Undang Pengendalian Produk Tembakau. “Kami

ini malah *mbayar* untuk ikut demo, Rp 150.000 untuk ongkos bis. Kalau *nggak* ikut, *mbako* *nggak* dibeli cukong,” kata Totok yang ditemui penulis di sela demonstrasi di Senayan, Jakarta, pertengahan Juli 2011.

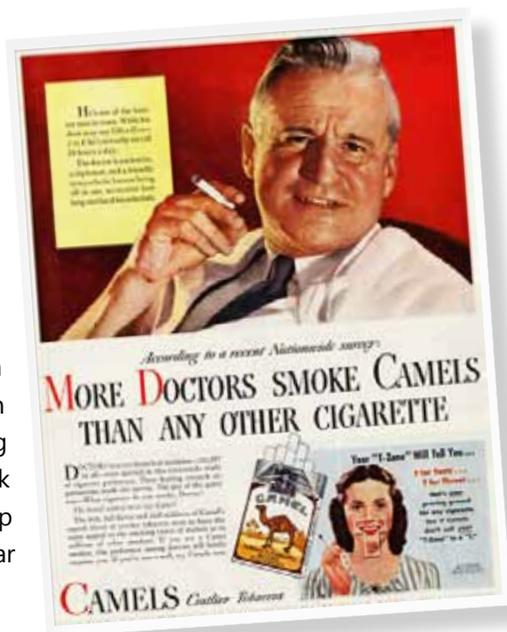
Sebenarnya, produksi tembakau Indonesia masih belum sanggup mencukupi kebutuhan lokal yang kian pesat. Produksi lokal ada di kisaran 160.000 -190.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan industri mencapai 220.000 ton per tahun. Namun, alih-alih menguatkan daya tawar petani dan memacu produksi tembakau, industri memilih jalan mudah: impor.

Nilai impor terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor tembakau pada Januari - April 2011 mencapai US\$ 10,09 juta. Nilai ini melonjak hampir tiga kali lipat (267 persen) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2010.

Klaim bahwa industri rokok memperkokoh perekonomian kita semakin goyah jika kita menengok besarnya ongkos kesehatan yang ditanggung publik. Pada 2010, kontribusi cukai yang mencapai Rp 62 triliun harus dicatat sebagai ongkos dibayar oleh konsumen, para perokok, dan bukan oleh industri. Lebih dari itu, ada ongkos yang tak ternilai, antara lain ribuan orang yang meninggal lantaran penyakit yang terkait rokok saban tahun, melemahnya produktivitas bangsa, dan ada 43 juta anak yang terpapar asap rokok di rumah mereka sendiri. "Ongkos yang ditanggung publik ini tak akan bisa ditandingi oleh triliunan rupiah dari cukai rokok," kata Tulus Abadi, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Benar, saya tidak anti rokok, tapi saya punya sikap tegas terhadap rokok dan perilaku industrinya. Saya ingin rokok diatur dalam koridor semestinya. Perilaku agresif industri rokok, yang menjajakan rokok seperti produk coklat tanpa dosa harus dievaluasi, dikritik, dan diperbaiki dengan menempatkan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama.

Kondisi Indonesia saat ini hampir mirip dengan Amerika Serikat di tahun 1930an, ketika merokok di area publik masih dianggap sebagai hal yang lumrah. Adegan film, serial televisi, bahkan kantor asosiasi dokter menyediakan asbak untuk perokok. Pada dekade itu rokok Camel dengan bangga beriklan "More doctors smoke Camel than other cigarettes". Gerakan yang menolak rokok di area publik untuk menjamin hak publik menghirup udara bersih, belum terdengar gaungnya.



Tahun demi tahun berganti. Awal 1970an, angin gerakan menolak dominasi rokok mulai bertiup melalui inisiatif Peter Hanauer, seorang pengacara di Berkeley, Amerika Serikat. Bersama sekelompok teman yang prihatin dengan tergerusnya hak publik untuk mendapat udara bersih, Hanauer mendorong perubahan kebijakan di Berkeley City Council. Setelah empat tahun bekerja keras, akhirnya Dewan Kota Berkeley merilis sebuah *beleid* yang melarang orang merokok di tempat umum.

Bagi Hanauer, seperti ditulis oleh Stanton Glantz dalam buku berjudul "Tobacco War, Inside California Battles", tahun 2000, perjalanan kebijakan Dewan Kota Berkeley itu membawa pelajaran penting: perlunya menggalang kekuatan di level publik, yang terkena langsung dampak asap nikotin. "Setelah bertahun-tahun di lapangan, saya menyimpulkan, kita dapat melawan industri rokok di level lokal karena para pelobi ulung industri rokok tidak bisa mengalahkan organisasi akar rumput yang punya telinga, tetangga, dan teman di dewan kota," kata Hanauer.

Kekuatan lobi industri rokok memang sudah tidak terbantah. Kessler, mantan komisioner Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, pada 2001, menulis ihwal kedekatan industri rokok dengan para penguasa:

"Pada awal kami meluncurkan investigasi industri rokok di FDA, kami tidak tahu seberapa besar kekuatan yang ada di balik perusahaan rokok. Namun, dengan segera kami menyadari mengapa industri ini tidak tersentuh selama puluhan tahun. Industri rokok mempekerjakan firma hukum terbaik di seluruh negeri dan menyetir faksi politisi yang signifikan dari Kongres. Industri ini juga memiliki akses pada figur-figur yang dihormati publik, yang terentang mulai dari Perdana Menteri Margaret Thatcher sampai Senator Howard Baker."



Itu di Amerika Serikat – di Indonesia pun, kisahnya tak kalah seru. Seperti terungkap dalam buku “Pak Beye dan Istananya”, Wisnu Nugroho, wartawan Kompas yang area liputannya di kompleks istana negara menulis ada satu mobil mewah Rolls Royce bernomor 234 yang kerap berseliweran di halaman istana. Mobil siapa gerangan? Wisnu menduga mobil mewah itu ada kaitannya dengan pemilik pabrik rokok Sampoerna, sebab 234 atau Dji-Sam-Soe adalah merek rokok andalan Sampoerna. Menurut Wisnu, sejak kedekatan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boedi Sampoerna diungkit-ungkit dalam kasus Bank Century, Rolls Royce 234 itu pun tak pernah lagi tampak di halaman istana.



Kedekatan ini juga terungkap dalam dokumen industri yang kami teliti. Dalam salah satu dokumen internal British American Tobacco, seorang petinggi perusahaan ini menyebut Direktorat Bea Cukai, Departemen Keuangan RI, sebagai *tochtergesellschaft*, kosa kata bahasa Jerman yang kira-kira berarti: anak perusahaan.

Kedigdayaan lobi dan kedekatan industri dengan penguasa ini memang kisah yang tak habis-habis. Kisah nyata inilah yang antara lain mengilhami film “The Insider” dan “Thank You for Smoking”. Karena itulah orang seperti Hanauer mengambil inisiatif, berada di depan mendorong para pengambil kebijakan agar menempatkan publik sebagai pertimbangan.

Publik, terutama anak-anak yang memang gampang terpengaruh dan terbawa arus, harus dilindungi dari agresivitas pemasaran rokok. Orang dewasa yang hendak menjebakkan diri dalam kecanduan nikotin, *monggo kerso*, silakan pilih mana suka. Saya tidak peduli orang dewasa merokok atau tidak, asal tetap menghormati hak non perokok untuk mendapat udara bersih.

Yang perlu menjadi perhatian lebih serius adalah anak dan remaja harus diberi perlindungan dan pemahaman memadai. Anak-anak dan remaja seharusnya tidak boleh dibombardir iklan dari segala penjuru

dengan *image* bahwa merokok itu *keren abis*, seperti yang selama dengan gencar dicekockkan industri rokok. Deradjat Kusumanegara, Manager Urusan Cukai dan Peraturan Pemerintah di Philip Morris Indonesia, dalam sebuah perbincangan dengan tim penulis di tahun 2006, menegaskan bahwa perusahaan rokok juga prihatin dengan peningkatan perokok muda ini. "Saya sendiri tak ingin anak saya merokok di usia dini," kata Deradjat.



Suara Deradjat agaknya harus dilihat sebagai suara seorang ayah, bukan suara pengambil kebijakan strategi sebuah industri rokok raksasa. Sebab, praktik di lapangan --termasuk yang dilakukan Philip Morris Indonesia--

justru berseberangan dari upaya menjauhan anak dari seruan merokok. Seperti para pedagang minuman keras, industri rokok seharusnya bersikap *low profile*, tidak gembar-gembor, dan sadar diri. Industri minuman keras dan rokok menjajakan produk beracun, yang berisiko membuat kecanduan dan kemudaratn bagi kesehatan – sudah seharusnya mereka tidak beriklan dengan agresif dan jumawa. Itu sebabnya produk minuman keras (juga rokok) dikenai cukai alias *sin tax* atau



pajak dosa. Berhubung negara ingin agar konsumsi terhadap produk yang berbahaya ini dapat dikendalikan dan terus ditekan, tarif 'pajak dosa' lebih tinggi ketimbang produk yang relatif tak berdosa seperti sabun colek dan permen coklat.

Agresivitas industri rokok dengan mudah kita saksikan di televisi, radio, di jalan-jalan yang penuh dengan deretan *billboard* besar-besar juga pada poster film, atau spanduk raksasa yang menyesaki arena balap mobil, panggung pentas musik, dan umbul-umbul yang meramaikan berbagai lapangan olahraga. Semuanya tampil serba gagah, berani, dan mentereng, khas anak muda.

Upaya membidik anak muda ini jelas punya tujuan strategis, yakni menjaga keberlangsungan pasar hari ini dan esok. Maklum, perokok dewasa biasanya sudah memiliki preferensi merek rokok sehingga susah ditawarkan produk baru. Boleh jadi, para 'perokok senior' sebagian sudah tobat berhenti merokok, sedang gering, atau meninggal akibat sakit gara-gara rokok. Kelompok dewasa ini bukan target yang ideal untuk diberondong iklan.

Hampir semua acara anak muda yang asyik pasti tak lepas dari kehadiran iklan rokok. Kemasan iklannya pun dahsyat, dibikin oleh biro iklan kelas wahid sehingga jargonnya terus melekat dan terasa *gue banget*. Dengan gembira publik menggumamkan jargon iklan rokok dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tak kenal dengan deretan jargon ini: "Maybe Yes, Maybe No", "How Low Can You Go", "Nggak ada loe nggak rame...", "Hati-Hati Polisi Tidur, Enjoy Aja", "Berani Tampil Apa Adanya Walau Di Depan Calon Mertua", dan lain sebagainya.



Aura kejumawaan itu kian terasa di hari-hari besar, nasional maupun agama. Saat itulah industri rokok mengemas program CSR (*corporate social responsibility*) sebagai ajang promosi. Iklan layanan masyarakat versi industri rokok memenuhi layar kaca. Mereka berlomba membawa *image* putih bersih, mengibarkan bendera merah-putih, menganjurkan orang saling memaafkan, bersikap ikhlas, menebar beasiswa pendidikan, juga mengajak orang menanam pohon untuk menjaga lingkungan. Semua kemasan dibuat serba mulia dan mengharukan. Tangan kanan industri ini melalui bermacam program CSR menawarkan kebaikan, tapi ironisnya tangan kirinya menyodorkan racun.

Peringatan merokok membahayakan kesehatan memang ditampilkan dalam setiap iklan. Tapi, *hei*, peringatan itu hanya terpampang sekilas, seolah bisikan halus yang membuai. Bahkan boks peringatan telah menjadi semacam branding, pencitraan, bagi rokok. Tanpa perlu menyebutkan produk, tampilnya boks peringatan bahaya rokok telah mewakili produk itu sendiri.



Begitu pekat kepublikan iklan rokok sampai kita merasa tak ada yang aneh, tak merasa telah dibombardir dari segenap penjuru. Dulu, saya juga bagian dari masyarakat yang gembira, *happy go lucky*, meneriakan serta menyanyikan *jingle* dan jargon

iklan rokok. Dulu saya juga tak keberatan jika teman-teman di kampus menjajakan proposal *sponsorship* kegiatan kepada perusahaan rokok. Mereka begitu mulia memberi dukungan dana, kenapa dilewatkan begitu saja.

Sampai kemudian, pada awal 2005, saat membantu kegiatan teman-teman pascatsunami Aceh, saya mengajukan proposal penggalangan dana kepada sebuah yayasan yang bernaung di bawah perusahaan

m u l t i n a s i o n a l .
Pengurus yayasan itu bersedia menjadi bagian dari kegiatan penggalangan dana dengan satu syarat: tak boleh ada *sponsorship* industri rokok. Bahkan, tak boleh ada yayasan yang beragama industri rokok ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. "Kami tak ingin jadi bagian dari penyebaran epidemi global kecanduan merokok, terutama pada anak muda," begitu kata Nona pengurus yayasan.



Ouch...!

Terhenyak, saya seperti dicubit dan ditampar sangat keras. Sebagai jurnalis yang peduli pada kepentingan publik, sebagai orang yang mendorong peningkatan kualitas produktivitas masyarakat, tentu saya tak ingin menjadi bagian dari penyebaran epidemi global kecanduan merokok. Baru kali itu pula saya tahu bahwa kecanduan merokok masuk dalam kategori pandemi atau epidemi (wabah) global. Hm...rupanya serius betul ini problem kecanduan nikotin di dunia, dan terutama di Indonesia.

Sentilan dari Nona Pengurus Yayasan itulah yang membuat saya bersikap lebih kritis terhadap rokok. Tahun demi tahun kemudian saya berkenalan dengan Jaringan Pengendalian Tembakau di Indonesia (Indonesia Tobacco Control Network - ITCN) dan Tobacco Control Support Center (TCSC) di Indonesia.

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Menurut saya, kelompok advokasi kepentingan publik dari agresivitas industri rokok ini, paling banyak disalahpahami di Indonesia. Bagaimana persisnya kelompok ini disalahpahami, akan saya ungkapkan lebih jauh dalam *Epilog: Divide et Impera di Zaman Milenium*.

Bab II

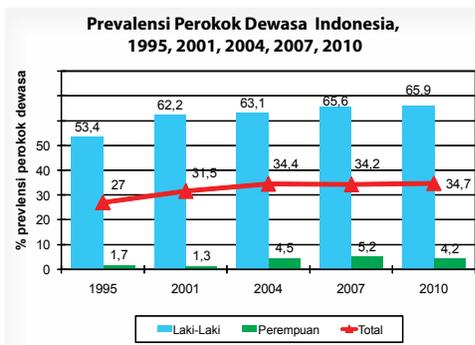
Indonesia, The Last Frontier

Kue industri rokok di Indonesia sungguh menggiurkan. Tahun 1970-an, produksi rokok di seantero negeri hanya sekitar 30 miliar batang. Saat itu industri didominasi pemain lokal berskala kecil dan menengah seperti Retjo Pentung, Pakis Mas, selain pemain besar seperti Bentoel, Gudang Garam, dan Djarum. Namun tiga dekade kemudian, kue industri menggelembung dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada 2009, produksi rokok sudah mencapai 240 miliar batang atau meningkat 800 persen, yang melibatkan pemain lokal dan multinasional. Siapa bilang Indonesia bukan pasar yang menggiurkan bagi industri rokok?

Pada saat bersamaan, industri rokok di negara maju terdesak pelbagai hal sehingga terus melemah dan menyusut, masuk dalam kategori *sunset* alias hampir tenggelam. Tim analisis Citigroup, seperti ditulis dalam www.guardian.co.uk/business/marketforceslive/2011/jan/07/imperial-bat-smoking-disappear memperkirakan industri rokok akan

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYGROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

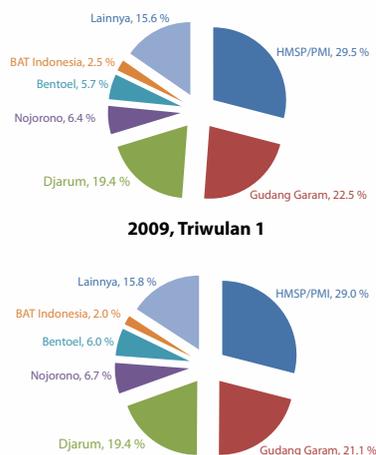


mencapai titik terendah pada 30-50 tahun mendatang. "Sulit mengabaikan data selama 50 tahun terakhir," tulis analis Citigroup. Data setengah abad itu menunjukkan penurunan jumlah perokok di negara maju yang merosot begitu cepat.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan, baik bagi individu maupun publik, merupakan pendorong utama merosotnya jumlah perokok di negara maju. Selain itu, regulasi pembatasan rokok yang kian ketat di berbagai negara ikut mendesak ruang gerak industri. Kanada, misalnya, mengharuskan gambar peringatan efek rokok bagi kesehatan (*pictorial warning*) musti memenuhi 75 persen kemasan. Uni Eropa dan Australia sedang menggodok peraturan yang mengharuskan kemasan rokok bergambar generik, hambar seperti obat. Bahkan, Finlandia, awal 2011, secara resmi merilis peraturan yang didedikasikan untuk mengakhiri rokok pada 2040.

Dengan data-data penurunan konsumsi dan pembatasan di berbagai negara ini, Citigroup sampai pada kesimpulan yang terdengar bagaikan 'lonceng kematian' bagi industri rokok. "Kami tidak menyatakan bahwa kami mengetahui yang akan terjadi. Kami tidak tahu. Namun kami yakin bahwa skenario yang kami duga sangat mungkin terwujud. Sangat mungkin tak ada perokok lagi di Inggris Raya, juga di berbagai negara maju, dalam 30-50 tahun mendatang."

Pangsa Pasar Menurut Industri Rokok, 2008 dan 2009



Sumber: Koran Neraca, 29 Juni 2009

Mengingat kuatnya data dan riset industri rokok, saya yakin seribu persen bahwa analisis Citigroup itu sudah disadari kalangan industri sejak lama. Itu sebabnya, raksasa industri rokok dunia amat serius menggarap pasar dunia ketiga seperti Cina, Rusia, India, dan Indonesia. Populasi yang luar biasa besar menjanjikan kue pasar yang menggiurkan. Dan, lebih-lebih lagi, peraturan di negara dunia ketiga masih bisa dibengkokkan dengan sentimen nasionalisme, nasib petani, dan nasib buruh industri rokok.

Indonesia dengan 240 juta penduduk dan regulasi yang lemah, serta pemerintah dan badan legislatif yang belum peduli pada kepentingan kesehatan publik, merupakan target sasaran dengan ramuan yang tepat. "Indonesia adalah *the last frontier*, benteng terakhir bagi industri rokok," kata Dr. Widyastuti Soerojo, praktisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Maka, sejak tahun 1980 dan 1990an, berbondong-bondonglah industri rokok multinasional dengan pelbagai strategi yang agresif ke negeri ini. Lemahnya regulasi yang memungkinkan iklan yang gencar, siasat pemasaran yang agresif, dan mekanisasi industri menjadi pupuk super bagi pertumbuhan industri rokok di Indonesia. Apalagi, tarif cukainya juga jauh lebih murah ketimbang negara lain. Rata-rata tarif cukai rokok di Indonesia hanya 37 persen, hanya separuh dari Thailand (75 persen) dan Bangladesh (63 persen). Ini memungkinkan rokok dijual dengan harga murah, sehingga terjangkau oleh kalangan yang lebih luas.



Dr. Widyastuti Soerojo

Tak mengherankan jika populasi perokok di Indonesia terus menggelembung, tahun demi tahun. Pada 1995, hanya 27 persen penduduk Indonesia mencandu rokok. Namun 15 tahun kemudian, Riset Kesehatan Dasar yang digelar Kementerian Kesehatan, 2010, menunjukkan ada 80 juta jiwa atau 34 persen penduduk Indonesia mencandu rokok. Ini berarti satu dari tiga orang Indonesia adalah perokok. Populasi yang gemuk ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara dengan perokok paling banyak, setelah Cina dan India.

Riset Kesehatan Dasar 2010 juga mencatat, 60 persen laki-laki Indonesia yang berusia di atas 15 tahun adalah perokok. Artinya, dua dari tiga lelaki Indonesia dewasa adalah perokok. Setiap perokok Indonesia rata-rata menghisap 3.000 batang rokok setiap tahun. Dengan perokok 80 juta jiwa, maka tiap tahun Indonesia menghisap 240 miliar batang rokok. Waduh, bukan mustahil kita bakal menjadi 'juara' perokok sedunia...

Jumlah perokok yang fantastis ini tidak akan merisaukan jika rokok aman dinikmati atau digunakan, seperti jeruk limau atau tikar pandan. Jika rokok tidak menuntut ongkos kesehatan luar biasa mahal yang harus ditanggung rakyat, tentu kita tak perlu mendorong pengendalian konsumsi rokok. Apabila rokok adalah produk netral, pastilah kita tidak risau menyimak *road map* industri rokok yang memasang target produksi 240 miliar batang per tahun pada 2010-2015.

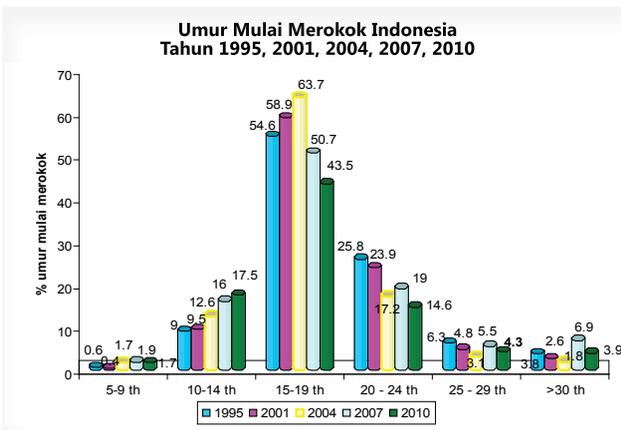
Menyimak deretan angka tersebut, saya ingin rokok perlu diatur dan dikendalikan, dengan sejumlah alasan:

1. Laju Perokok Muda

Aldi Rizal Suganda, 3,5 tahun, membuat heboh dunia melalui layar YouTube. Setahun lalu, saat masih 2,5 tahun, bocah berpipi dan berperut gembung dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini direkam kamera sedang asyik menikmati rokok. Gayanya persis seperti orang dewasa. Asap rokok dihisap dalam-dalam, lalu dihembuskan pelan-pelan. Nikmat betul sepertinya.

Beberapa saat kemudian, adegan beralih. Aldi tampak marah dan

membentur-benturkan kepalanya ke tembok: rupanya dia sedang kehabisan rokok. Anak sekecil itu sudah biasa menghabiskan tiga sampai empat bungkus rokok, sehari. "Dia mulai merokok sejak umur 11 bulan. Kesukaannya merek





Sampoerna," kata Diana, ibu Aldi. Diana terbiasa membawa Aldi ikut berdagang di pasar, ketika itulah Aldi 'berkenalan' dengan rokok. Bayi kecil ini selalu tampak bersemangat ketika sedang memainkan bungkus rokok. "Suatu kali ada orang yang memberinya rokok," kata Diana, "Eh, dia hisap, jadinya keterusan. Kalau tak dikasih rokok, pasti dia mengamuk."

Tayangan itu membuat dunia syok. Kisah Aldi beredar di media lokal dan internasional. Maklumlah, anak balita itu belum genap tiga tahun. Apalagi, dalam film hasil rekaman Ardiles, wartawan lepas jaringan televisi ABC News itu, Diana tak terlihat khawatir dengan kebiasaan Aldi menghisap nikotin. Dalam perbincangan dengan saya di Jakarta, pada 2010, Diana mengaku bahwa selama mengandung janin Aldi, dia juga merokok. "Waktu itu, saya *ngidam* rokok," katanya, "Ini berbeda dengan kehamilan kakak Aldi. Waktu itu saya normal saja: *ngidam* mangga muda."

Kebiasaan Aldi kecil menghisap rokok merupakan sepenggal bukti nyata bahwa negeri ini tidak serius melindungi anak-anak dari gempuran epidemi global kecanduan nikotin. Pada Oktober 2010, saya bertemu dengan Aldi kecil ketika heboh YouTube masih menggema. Dia dibawa ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di Pasar Rebo, Jakarta untuk menjalani rehabilitasi fisik dan psikologis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.



Lisda Sundari

Lisda Sundari dari Komisi Nasional Perlindungan Anak ber-kisah, pekan pertama menjalani terapi, Aldi selalu marah dan hiper-aktif. "Ngamuk berguling-guling itu biasa," kata Lisda. Dengan pendampingan intensif, Aldi diajak bermain bola, petak umpet, berenang, dan lain sebagainya. Perlahan, suhu temperamen Aldi mereda. "Dia tidak lagi gampang ngamuk. Tapi, sesekali kalau melihat orang merokok, Aldi masih suka marah," kata Lisda. Sebulan menjalani terapi di Jakarta, Aldi kembali lagi ke Musi Banyuasin.

Perkembangan terakhir, sesuai tayangan video dari kantor berita Vanguard.com, pada Juli 2011, Aldi telah berubah. Dia kini tak ubahnya anak berusia 3,5 tahun, dengan energi melimpah dan tuntutan perhatian. Sekarang, setelah direhab, dengan nada lucu Aldi menasehati tim reporter Vanguard, "Jangan merokok, ya...!"

Menurut Lisda, Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki data sedikitnya ada 11 anak balita yang telah merokok. Mereka tersebar di berbagai daerah di Indonesia. "Umumnya mereka tumbuh di keluarga yang juga perokok. Sehari-hari mereka melihat orang merokok dan keluarga juga merasa tak ada salah dengan hal itu," kata Lisda.

Begitulah, disengaja atau tidak, keluarga dan masyarakat telah membombardir anak-anak dengan kebiasaan merokok. Ayah, paman, tante, kawan, yang dengan santai menghisap nikotin telah menciptakan *image* yang ingin ditiru sang bocah. Bombardir yang paling kejam apa

lagi kalau bukan iklan yang gencar dalam beragam bentuk dan media.

Betul, sejak dulu merokok merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di kampung-kampung di pedesaan Indonesia, para lelaki melinting tembakau dengan lembaran klobot (daun jagung). Kadang kala, anak-anak juga ikut serta, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mengisap rokok yang dilinting bapaknya.

Namun Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data yang mengkhawatirkan. Hanya dalam lima tahun, selama 2001-2004, persentase perokok belia (umur 5-9 tahun) meningkat tajam dari 0,4 menjadi 1,8 persen. "Melonjak hampir lima kali lipat," kata Hakim Sorimuda Pohan, dokter yang juga anggota DPR dari Komisi IX tahun 2004-2009.

Riset Global Youth Tobacco Survey (GYTS) yang digelar Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada 2006, juga merekam peningkatan serupa. Indonesia memiliki 24,5 persen buyung dan 2,3 persen upik (usia 13-15 tahun) yang perokok. Sebagian anak (3,2 persen) bahkan sudah masuk tahap kecanduan. "Kualitas generasi muda menjadi taruhan apabila tren peningkatan perokok belia ini terus dibiarkan berlanjut," kata Hakim Sorimuda Pohan.

Anak-anak sebetulnya tidak sepenuhnya tinggal diam. Dalam rangkaian Kongres Anak Indonesia, bocah-bocah ini sepakat menuntut pemerintah untuk melindungi mereka dari bahaya rokok, melalui sebuah deklarasi. Namun upaya ini agaknya dihalangi orang-orang yang lebih tua. Tahun 2010, dengan alasan yang tak jelas, anak-anak ini diminta tidak membacakan deklarasi hasil kongres tersebut di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami menduga, larangan itu muncul karena dalam rekomendasinya anak-anak minta pemerintah melindungi



Hakim Sorimuda Pohan

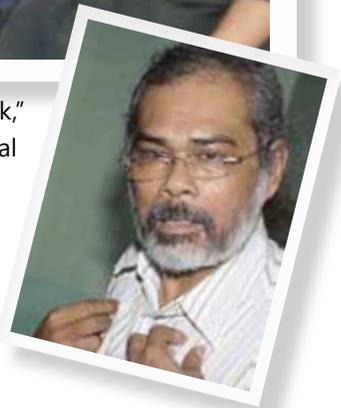
BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA



mereka dari paparan asap dan iklan rokok," kata Arist Merdeka Sirait dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

Juli 2011 lalu, para bocah kembali bertemu dalam Kongres Anak Indonesia ke-10. Mereka kembali menyuarakan kerisauan akibat paparan nikotin. Mereka memang berhasil membacakan deklarasi tersebut, tapi bukan dalam acara puncak yang dihadiri Bapak Wakil Presiden, di Ancol – melainkan di tempat lain. "Sebaiknya orang tua tidak merokok di rumah karena membuat kami terbatuk-batuk," kata perwakilan anak yang membacakan rekomendasi dalam rentetan acara Hari Anak Nasional, di Taman Monumen Nasional, Sabtu, 23 Juli 2011.



Seruan anak-anak ini mestinya dianggap sebagai tuntutan paling serius. Suara mereka adalah panggilan masa depan. Merekalah pemilik negeri ini. Mereka menuntut orang tua, pemerintah, menjalankan fungsinya: melindungi anak-anak, aset bangsa masa depan. "Mestinya kepedulian pada kualitas aset bangsa itulah yang menjadi perhatian

utama," kata Dr. Mawarwaty Djamaludin. Mantan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) ini adalah anggota delegasi Republik Indonesia dalam pembahasan Framework Convention on Tobacco Control di WHO, pada 1995-2003. "Kalau untuk kualitas kesehatan anak-anak, aset kita di masa depan, ini pemerintah tidak peduli," katanya dengan nada prihatin, "Maka apa lagi yang bisa kita harapkan sebagai bangsa?"

2. *Slow Motion Suicide*

Senin, 8 Agustus 2011. Boedi Sampoerna, anggota keluarga HM Sampoerna, mantan pemilik kerajaan rokok PT Hanjaya Mandala Sampoerna, meninggal pada usia 78 tahun. Keterangan Erman Achmad Sulaeman, kuasa hukum Boedi, menyebutkan bahwa Boedi mengidap kanker mulut dan tenggorokan setahun terakhir. (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/08/09/brk,20110809-350805,id.html).

Selama hidup, Boedi dikenal sebagai perokok moderat yang menghabiskan satu pak rokok sehari – kebiasaan yang patut dicurigai memicu kanker di tenggorokan dan mulut Boedi. Sungguh sebuah kisah hidup yang ironis. Pendiri pabrik rokok yang di akhir hidupnya harus berjuang melawan ganasnya efek asap rokok.

Boedi bukan satu-satunya. Ada jutaan kisah ironis lain, seperti lakon hidup Wayne McLaren, koboi penunggang kuda paling keren di tahun 1970-an. Wajah ganteng sangar dan postur gagah McLaren muncul di iklan Marlboro di seluruh jagat. Selama seperempat abad, Tuan Kobi mengasapi paru-parunya dengan 1,5 pak rokok Marlboro setiap hari. Awal 1990, dokter menjatuhkan vonis kanker paru bagi McLaren. Kemoterapi, radiasi, bahkan pemangkas satu sisi paru dilakukan demi menahan penyebaran sel kanker di tubuhnya.

Ketika tersebar berita McLaren dihajar kanker, Philip Morris merilis statemen bahwa Tuan Kobi sama sekali bukan bintang iklan

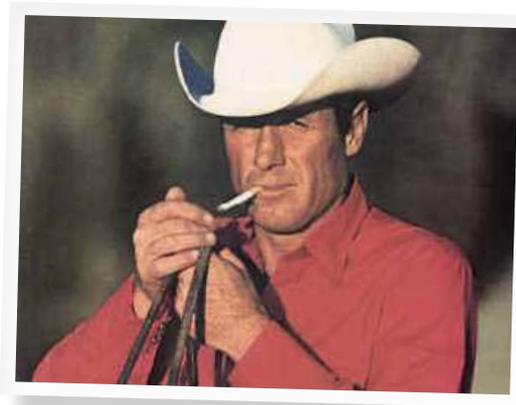


BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYCROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Marlboro. Bantahan ini tak bertahan lama karena begitu banyak *billboard* bergambar McLaren yang terpampang di berbagai lokasi di Amerika.

Dalam keadaan gering, sang koboi segera putar haluan, dari promotor rokok menjadi penganjur *tobacco control*. Dia muncul di rapat umum pemegang saham Philip Morris Co., tahun 1991, dan menyerukan produsen Marlboro ini untuk membatasi agresivitas iklannya. Tuan Koboi yang badannya sudah gering itu juga hadir di hadapan parlemen negara bagian Texas, mendorong pengenaan pajak tinggi bagi industri rokok, terutama untuk pos pendidikan kesehatan.



Setahun kemudian, Juli 1992, Tuan Koboi yang pernah menjadi simbol *machoisme* itu tak mampu membendung ganasnya kanker paru. Ia meninggal. Sel-sel ganas kanker telah terbawa aliran darah, menuju otak, dan membunuhnya. McLaren relatif muda untuk ukuran aktor Amerika, 52 tahun. Seperti dikisahkan ibunya, bintang Marlboro ini

membisikkan kata-kata terakhir, "*Take care of your children. Tobacco will kill you, and I am a living proof of it.*"

Tuan Koboi adalah bukti ganasnya efek nikotin. Tak berlebihan bila Joseph Califano, mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat, menyebut merokok sebagai bunuh diri pelan-pelan. "*It is like a slow motion suicide,*" katanya.

Gaya hidup mematikan ini memiliki sejarah panjang, jauh sebelum McLaren jadi bintang iklan Marlboro Man. Suku Indian kuno menghisap nikotin untuk obat dan pengusir serangga, bukan untuk gaya hidup seperti para pecandu masa kini. Berbeda dengan rokok di zaman baheula, efek buruk rokok modern semakin gawat gara-gara cara menghisap yang intensif dan ramuan kimia di dalam rokok yang makin kompleks.

Pada 1952, *Reader's Digest*, majalah ternama untuk urusan kesehatan, menuliskan "*Cancer by the Carton*" yang mengaitkan kebiasaan merokok dengan kanker paru. Ketika itu publik Amerika masih terpesona dengan sosok macho koboi Marlboro yang gagah menunggang kuda. Hampir semua orang merokok,



dan merasa segagah Pak Kobi. Film dan siaran televisi ketika itu masih dipenuhi adegan orang merokok secara terang-terangan. Artikel *Reader's Digest* membuat publik terkejut, industri rokok terguncang hebat seperti dihantam gempa. Penjualan rokok di Amerika langsung anjlok drastis, suatu hal yang belum pernah terjadi sejak depresi besar tahun 1930.

Setahun setelah artikel heboh tersebut, para petinggi beberapa raksasa industri rokok menggelar rapat rahasia, di New York City. Mereka sepakat untuk membenahi citra yang sedang terpuruk, yakni dengan serentak menerbitkan artikel bantahan di 448 surat kabar di Amerika. Artikel bantahan itu berjudul "*A Frank Statement to Cigarette Smokers*", perbincangan blak-blakan dengan perokok sigaret.

Bekerja bersama agen periklanan papan atas, Hill & Knowlton, raksasa industri menegaskan bahwa mereka tak mungkin berniat mencelakai konsumen rokok. "Kami menilai pentingnya kesehatan publik sebagai tanggung jawab mendasar, di atas segala pertimbangan bisnis," begitu penggalan artikel itu. Pihak industri juga berjanji untuk "telah dan senantiasa bekerjasama secara erat dengan pihak-pihak yang bertugas sebagai penjaga kesehatan publik."

Menurut Kelly D Brownell dan Kenneth Warner, peneliti dari Yale University dan University of Michigan, artikel cuci-bersih itu berhasil merangkul publik. Dalam riset yang diterbitkan pada *The Millbank Quarterly* (Volume 87/2009) dengan judul "*The Perils of Ignoring History: Big Tobacco Played Dirty and Millions Died. How Similar Is Big Food?*", duet



peneliti ini mengatakan artikel industri yang disebar serentak ke seluruh Amerika itu, telah berhasil meningkatkan kembali konsumsi merokok. Publik merasa segalanya aman terkendali. Tak ada risiko kesehatan, *toh* para petinggi industri sudah bekerja keras dengan berbagai instansi yang menjaga koridor kesehatan publik.

Puluhan tahun kemudian, 1994, Kongres Amerika Serikat memanggil sederet eksekutif papan atas industri rokok untuk menjelaskan dukung perkara adiksi nikotin. Seperti tampak dalam adegan film *The Insider* (dibintangi Al Pacino), para top eksekutif ini, di bawah sumpah, berkeras bahwa nikotin bukanlah produk adiktif, meskipun ratusan riset, termasuk dari ilmuwan mereka sendiri, menyatakan sebaliknya. Yang paling sulit dibuktikan Kongres saat itu, adalah tuduhan bahwa industri sengaja memanipulasi nikotin demi mendorong kecanduan rokok.

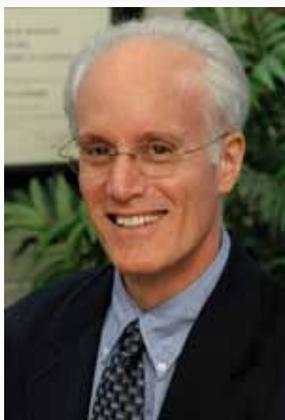
Belakangan, setelah 1998, seiring dengan terbukanya dokumen industri (*lihat Kisah Dokumen Top Secret*), dunia mengetahui bahwa janji industri rokok ini bohong belaka. Sejak awal, top eksekutif industri rokok paham betul bahwa mereka menjual produk yang adiktif --yang mereka sangkal habis-habisan di hadapan Kongres. Pada sebuah dokumen, 1963, terungkap statemen petinggi perusahaan rokok Brown & Williamson yang terkenal: "We are, then, in the business of selling nicotine, an addictive drug." Dokumen ini berstempel "strictly private and confidential". Artinya,

industri rokok paham benar sejak setengah abad lalu, bahwa mereka menjual nikotin yang adiktif.

Dalam paper “The Perils of Ignoring History: Big Tobacco Played Dirty and Millions Died”, Brownell dan Warner menyalahkan sikap manipulatif industri. Seandainya industri lebih jujur tentang sifat adiktif, sehingga masyarakat lebih sadar risiko rokok, kematian akibat rokok di Amerika bisa ditekan. Bukan mustahil, Wayne McLaren tidak mau menjadi bintang iklan rokok. Selama setengah abad sejak artikel cuci bersih “A Frank Statement to Cigarette Smokers” diterbitkan industri, diperkirakan ada 16 juta kematian yang terkait dengan rokok. Ini hanya di Amerika Serikat saja, belum di belahan dunia yang lain. Jika industri menepati janjinya untuk bekerjasama dengan institusi kesehatan masyarakat, lanjut Brownell dan Warner, “Mungkin ada tiga, lima atau tujuh juta kematian yang bisa dicegah. Tak ada yang tahu persis.”



Wajah dunia boleh jadi berubah jika industri rokok, 50 tahun lalu, bersikap lebih terbuka. Dunia mungkin tak dicengkeram kecanduan merokok seandainya pemerintah Amerika lebih ketat mengawasi pelaksanaan “A Frank Statement to Cigarette Smokers”. Tapi, mustahil



menggeser jam ke belakang. Yang kita saksikan kini adalah sebaran epidemi global kecanduan merokok, termasuk di Indonesia. Dunia kini menyaksikan kuasa rokok sebagai produk yang adiktif. Menghisap rokok, ramuan nikotin dan 4000 senyawa kimia, dengan 250 zat masuk kategori berbahaya dan 50 zat yang diduga karsinogenik, merupakan sebuah gaya hidup -- yang mematikan.

Menurut Soewarta Kosen, ahli kesehatan masyarakat, tiap tahun diperkirakan ada 427.948 jiwa melayang

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

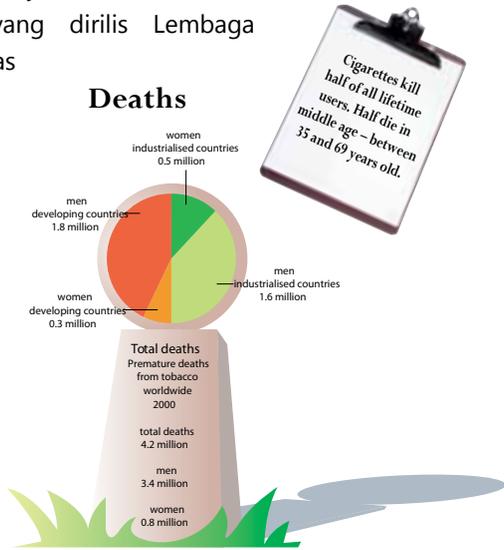


akibat penyakit yang terkait rokok seperti berbagai jenis kanker, penyakit paru, serangan jantung, kelainan janin, serangan asma, dan lain sebagainya. Itu berarti ada 1.172 nyawa yang terenggut akibat rokok setiap hari, atau hampir 50 orang setiap jam -- sungguh sebuah angka yang bikin merinding!

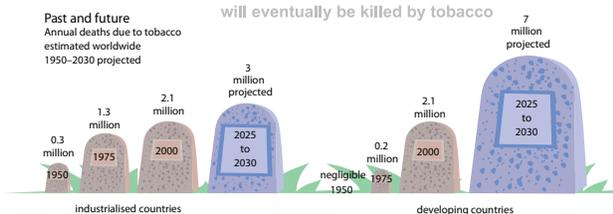
Selain merenggut nyawa, rokok juga merenggut dana tabungan yang disimpan masyarakat. Analisis

“Ekonomi Tembakau” yang dirilis Lembaga

Demografi Universitas Indonesia memperkirakan ongkos yang harus dibayar rakyat Indonesia untuk biaya kesehatan akibat rokok, mencapai Rp 2,9 triliun sampai Rp 11 triliun (angka tahun 2009). Dibandingkan dengan setoran cukai rokok yang Rp 62,7 triliun, ongkos kesehatan ini mungkin tak seberapa. Namun, harus diper-timbangkan pula



of everyone alive today
500,000,000



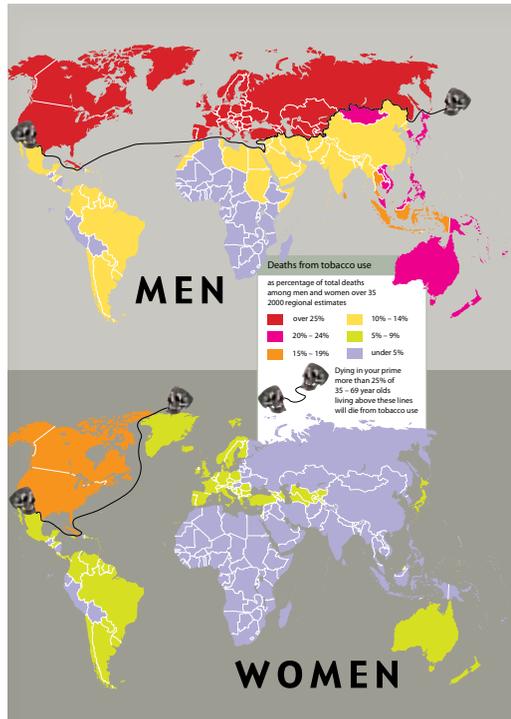
nilai produktivitas, fisik dan mental, yang hilang lantaran banyak anak dan orang dewasa didera sakit lantaran asap rokok.

3. Udara Bersih Milik Publik

Merokok itu hak azasi -- itu yang kerap kita dengar. Tentu ini tidak keliru. Mau menghisap racun, terserah saja, mana suka. Namun kita tidak hidup di ruang hampa. Hak azasi seseorang dibatasi hak azasi orang lain, dalam hal ini hak publik untuk tidak ikut menghisap asap rokok.

Harus diakui, sebagian besar perokok di Indonesia tidak atau belum menghormati hak publik atas udara bersih. Di mana saja --di stasiun, bis, kereta, terminal, kantor, kafe yang berpendingin udara, di jalan-- kita jumpai kaum penghisap rokok beraksi dengan santai. Para "ahli hisap" ini tak peduli, meskipun di tempat tersebut ada tanda "Dilarang Merokok" atau "Kawasan Bebas Rokok". Riset Dasar Kesehatan, 2010, menghitung ada 97 juta perokok pasif di Indonesia -- 43 juta di antaranya anak-anak di bawah umur 15 tahun yang hidup serumah dengan perokok dan otomatis terpapar asap nikotin.

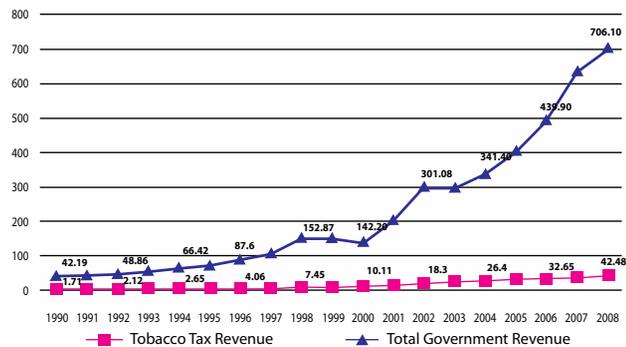
Efek nikotin tak cuma menyerang perokok aktif. Perokok pasif, yang terpapar asap rokok tanpa dia mau, juga tersengat dampak yang sama buruknya. Inilah bedanya rokok dengan produk adiktif lain, seperti heroin, kopi, minuman beralkohol, atau *junk food* -- jika yang terakhir ini juga dianggap memicu kecanduan dan biang obesitas. Mereka yang berada di lingkungan pecandu miras dan narkoba, umpamanya, tak ikut terkena efeknya, sepanjang tak mengkonsumsinya sendiri.



BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

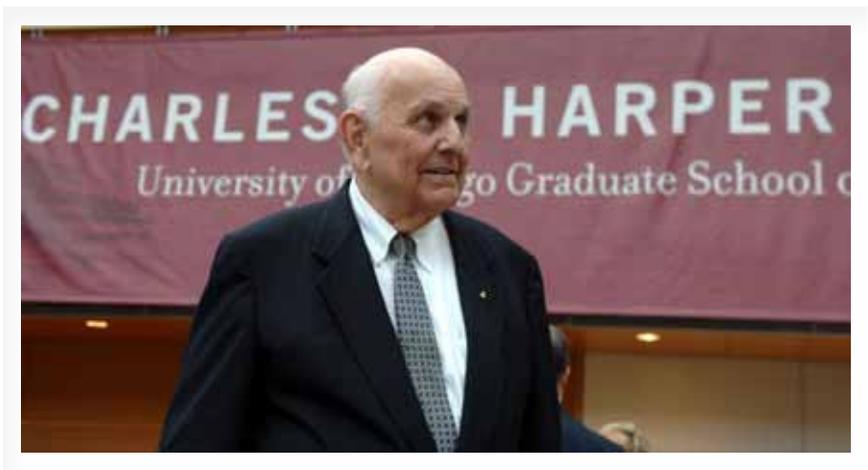
MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Tobacco Excise Tax Revenue In Indonesia From 1990 - 2008 (In Rp. Billion)



Source : State Budget Note 1990-2007 and Custom and Excise 2009

Posisi tanpa daya perokok pasif ini tergambar dengan bagus pada dokumen internal industri rokok. Pada 17 April 1996, dalam rapat tahunan pemegang saham RJ Reynolds Nabisco, perusahaan rokok besar di Amerika, seorang pengunjung rapat, namanya Miss Doley, bertanya kepada Charles Harper, petinggi Nabisco.



Berikut ini kira-kira rekonstruksi percakapan yang terekam dalam dokumen notulensi RJR Nabisco, antara Nona Doley dan Harper:

- + Apakah Tuan membolehkan orang merokok di dekat anak dan cucu-cucu Anda, baik di ruang publik atau di ruangan pribadi?

- Ini persoalan serius yang mesti saya respon. Saya dan istri saya, kami berdua adalah perokok. Kami punya empat anak, yang anehnya, semuanya tumbuh sehat. Sekarang saya punya 12 cucu. Saya tidak ingin membatasi hak mereka untuk merokok. Tapi, saya akan men-*discourage* mereka untuk jadi perokok.
- + Bukan itu yang saya tanyakan. Maaf menginterupsi jawaban Anda. Saya bertanya, apakah Anda menginginkan orang lain merokok di sekitar mereka?
- Saya tidak akan membatasi hak orang untuk merokok. Kalau anak itu tidak suka berada di ruangan yang berasap rokok, pasti dia akan keluar meninggalkan ruangan. Saya tidak tahu apakah Anda punya cucu, saya punya. Dan, mereka meninggalkan ruangan jika merasa tidak nyaman dengan asap.
- + Tapi, bayi tidak bisa meninggalkan ruangan...
- *Well*, pada satu titik, dia akan belajar merangkak, kan? Mereka akan belajar berjalan, dan seterusnya.

Sikap petinggi RJR Nabisco juga merupakan sikap khas mayoritas perokok di Indonesia. Kelompok ini beranggapan bahwa merokok adalah hak azasi tanpa batas. Merokok juga bukan tindakan pidana yang harus dilarang. Jika Anda tak suka, maka Anda yang harus minggir. Anak-anak, bayi yang baru bisa tengkurap, jangan protes: tunggu kalian bisa berjalan dan tinggalkan ruangan jika merasa terganggu. Titik.

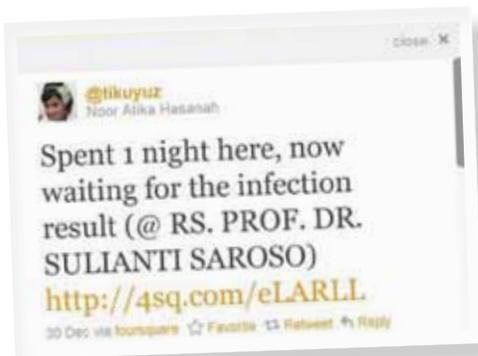


Akibat perilaku seperti ini, muncul tragedi seperti yang dialami Noor Atika Hasanah (Tika). Gadis manis berusia 28 tahun ini terkena penyakit radang paru *bronchopneumonia duplex*. “Hello *bronchopneumonia duplex!* I am not afraid of you,” begitu tulis Tika di akun twitternya, @tikuyuz. Menurut dokter, paru-paru Tika gering dihajar asap rokok. “Karena jadi perokok pasif,” kata Tika pada 26 Desember 2010.

Berat badan Tika merosot dari 42 menjadi 35 kilogram. Tika ‘berkicau’ soal berat badan ini, “Bismillah... Semoga berat badanku bisa lekas kembali normal dari yang sekarang cuma 35 kg. Syukur-syukur lebih berat dari normal.”

Radang paru ini telah membuat Tika sesak napas, batuk keras, dan tak henti pilek. Tika dirawat di Rumah Sakit Sulianti Suroso, Sunter, Jakarta. Dalam sebuah status di akun Facebook, perempuan kelahiran 8 November 1982 ini menulis: "Bagi para *ortu* perokok, aku mohon banget supaya *ngerokok* sejauh mungkin dari anaknya supaya jauh dari kemungkinan terkena flek paru."

Kicauan terakhir Tika terekam pada 30 Desember 2010, pukul 5.30 pagi. "Spent 1 night here, now waiting for the infection result (@ RS Prof. Dr. Sulianti Saroso)." Apa daya, sepuluh jam setelah kicuan ini, Tika menghembuskan napas terakhir. Satu kehidupan belia telah berakhir, tersebut oleh asap rokok.



Kisah Tika membuktikan bahwa efek yang diderita perokok pasif bukan hal yang main-main. Perokok pasif berisiko 30 persen terkena penyakit terkait asap rokok, mulai dari sakit pernapasan, kanker paru, sampai kelainan tumbuh-kembang anak-anak. Data Komisi Nasional Penanggulangan Dampak Produk Tembakau, pada 2009, menyebutkan ada 32.400 balita yang mengalami gizi buruk akibat terpapar asap rokok sejak di dalam kandungan. Bayangkan jika satu dari ribuan anak ini anak anda -- tentunya tak ada yang ingin si kecil bernasib seperti Tika.

4. Rokok Vs Kebutuhan Dasar

Bagian paling menyebalkan dari kecanduan, apa pun itu, adalah menjadi tidak rasional. Para pecandu rokok lebih mengutamakan

menghisap rokok ketimbang membeli susu dan lauk-pauk untuk keluarga. Biaya pendidikan anak-anak dikalahkan demi menjaga kelangsungan ritual menghisap rokok.

Penelitian tim Lembaga Demografi UI yang dipimpin ekonom Abdillah Ahsan menunjukkan hal itu. Sebagian besar rakyat miskin, kata Abdillah, membelanjakan 70 persen pendapatannya untuk membeli rokok. Rata-rata, rumah tangga perokok menghabiskan 11,5 persen uang belanjanya untuk rokok, 11 persen untuk lauk-pauk, dan hanya 3,2 persen untuk biaya pendidikan. "Rokok menempati peringkat kedua pos belanja setelah makanan, tapi lebih tinggi dari pos lauk-pauk dan pendidikan," kata Abdillah.

"Bagi pecandu rokok, yang otaknya sudah dirasuki nikotin, seluruh

**Perkiraan Total Biaya Medis (Tanpa Subsidi)
Dari Penyakit Yang Terkait Dengan Tembakau, Indonesia 2008**

No:	Nama Penyakit	No, Kode ICD-X	Rata-rata biaya medis per episode penyakit (Rp.) (tanpa subsidi)	Perkiraan jumlah kasus pada tahun 2008	Total Biaya Medis dalam Rupiah pada tahun 2008 (tanpa subsidi)
1.	Malignant neoplasm of the lip	C00	7,403,404	3,300	8,143,744,400
2.	Malignant neoplasm of tongue	C02	14,541,038	1,200	5,234,773,680
3.	Malignant neoplasm of gum	C03	6,490,933	1,700	3,310,375,830
4.	Malignant neoplasm of the mouth	C06	1,165,806	1,600	559,586,880
5.	Malignant neoplasm of parotid gland	C07	1,864,851	2,200	1,230,801,660
6.	Malignant neoplasm of other major salivary glands	C08	2,303,348	2,600	1,796,611,440
7.	Malignant neoplasm of nasopharynx	C11	7,422,836	1,350	3,006,248,580
8.	Malignant neoplasm of oesophagus	C15	21,150,508	1,513	9,602,330,632
9.	Malignant neoplasm of stomach	C16	15,162,314	11,928	4,521,402,035
10.	Malignant neoplasm of liver & intrahepatic bile ducts	C22	12,985,735	9,126	1,185,597,606
11.	Malignant neoplasm of pancreas	C25	6,100,032	2,524	3,080,516,160
12.	Malignant neoplasm of larynx	C32	18,219,205	944	5,156,035,015
13.	Malignant neoplasm of bronchus and lung	C34	18,856,144	21,659	326,720,407,100
14.	Malignant neoplasm of cervix uteri	C53	7,853,809	25,443	4,622,751,977
15.	Malignant neoplasm of ovary	C56	10,846,818	7,004	7,592,772,600
16.	Malignant neoplasm of kidney	C64	16,818,418	230	3,868,236,140
17.	Malignant neoplasm of bladder	C67	10,602,507	6,604	6,997,654,620
18.	Myeloid leukaemia	C92	8,932,176	5,300	7,101,079,920
19.	Monocytic leukaemia	C93	24,867,093	5,560	20,739,155,560
20.	Essential (primary) hypertension	I10	6,257,186	3,635,764	2,274,962,657,000
21.	Ischaemic Heart Diseases	I20-I25	8,607,333	151,828	455,758,282,400
22.	Cerebral Infarction	I63	5,647,596	47,000	106,174,804,800
23.	Other cerebrovascular disease	I67	12,716,899	70,504	358,641,703,600
24.	Aortic Aneurysm and dissection	I71	14,824,867	1,700	2,520,227,390
25.	Pneumonia	J12-J18	7,063,430	9,707,865	6,857,078,956,000
26.	Bronchitis	J40	6,641,717	529,856	2,463,406,194,000
27.	COPD	J44-J47	10,851,437	257,710	1,957,566,680,000
28.	Disorders related to short gestation and Low Birth Weight	P07	7,845,569	226,560	533,247,633,800
29.	Burns of external body surface	T20-T25	39,051,708	23,497	4,569,049,836
	TOTAL				15,438,396,270,661

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYCROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

pikirannya terpusat pada rokok,” kata Kartono Mohamad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Nikotin, Kartono menjelaskan, bekerja langsung pada jutaan sel syaraf pada otak tengah. Asap nikotin memiliki struktur kimia yang mirip dengan *neurotransmitter*, zat penyampai pesan, yang disebut *acetylcholine* dan *dopamine*. Begitu dihisap, secara aktif maupun pasif, asap nikotin akan menuju paru dan terbawa ke otak kurang dari delapan detik. Nikotin atau *acetylcholine* dan *dopamine* akan menciptakan suasana euforia. Pemakai merasa seolah rileks, senang, dan lega. “Inilah yang menyebabkan orang kecanduan,” kata Kartono.



Pada situasi kecanduan, pemakai tak lagi bisa berpikir normal. “Bangun tidur, langsung merokok. Buka puasa, langsung merokok, bukannya makan,” kata Kartono. Akibatnya, kebutuhan dasar seperti gizi dan sekolah anak pun sering kali diabaikan. Kecanduan nikotin, sayangnya, susah disembuhkan. National Institute of Health (NIH), Amerika Serikat, menyebut bahwa hanya kurang dari tujuh persen pecandu rokok yang bisa disembuhkan dari kecanduan.



Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Bambang Darmono, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, mengisahkan pengalamannya berhadapan dengan kecanduan di kalangan tentara. Tahun 1980-an, Bambang ditugaskan memimpin anak buah di Kalimantan Timur. Bambang rajin menjalin hubungan dengan prajurit dan keluarganya. “Saya

lihat," katanya, "Prajurit yang perokok anak-anaknya lebih kurus dan penyakitan."

Bersama sang istri, Sri Murwanti, Bambang lalu merilis peraturan untuk prajurit dan keluarganya. "Ukuran prestasi prajurit saya kaitkan dengan kualitas tumbuh kembang anak," kata Bambang. Darma Pertiwi, organisasi istri tentara, mengelola Pos Pelayanan Terpadu yang menimbang berat anak-anak, dan memeriksa kesehatan mereka. "Prajurit yang berhenti merokok, kami beri insentif," kata Bambang. Pelahan, anak-anak tumbuh lebih sehat, para istri lebih gembira, dan solidaritas prajurit ikut terbangun.

Sayangnya, inisiatif yang dilakukan Bambang Darmono masih bersifat sporadis dan tergantung pada individu. Belum ada sebuah sistem atau kebijakan terpadu yang memberi insentif bagi keluarga yang menjaga kesehatan, termasuk menjaga kesehatan keluarga. Perilaku positif, antara lain menjaga perilaku dan adab merokok, otomatis menyumbang produktivitas dan menghemat belanja kesehatan negara. "Hal seperti ini seharusnya diapresiasi oleh sistem negara," kata Bambang.

5. Apakah Kita Bukan Bagian dari Dunia Internasional?

Pemerintahan yang konsisten melindungi kepentingan publik pasti mendapatkan marwah dan wibawa. Produk peraturannya akan dipatuhi warga. Sayang, hal seperti ini tak terjadi di Indonesia. Kepentingan publik sering kali dikorbankan dan bahkan sama sekali tidak muncul dalam proses pengambilan kebijakan. Hasilnya, marwah pemerintahan itu pun jatuh.

September 2001, tiga produsen rokok raksasa, yakni British American Tobacco, Philip Morris, dan Japan Tobacco, sepakat membuat patokan pemasaran yang disebut International Tobacco Marketing Standard. Isinya, antara lain, tidak beriklan secara masif, menghentikan *sponsorship* kegiatan olah raga, tidak menggunakan selebritas untuk iklan, dan tidak beriklan yang bertendensi mendorong anak-anak untuk merokok. Kesepakatan ini mestinya berlaku internasional, seperti halnya kesepakatan industri susu formula untuk tidak memaksa ibu berpaling dari air susu ibu (ASI).

Di Indonesia, Philip Morris International sempat mematuhi sebagian kesepakatan tersebut. Setahun setelah kesepakatan 2001, tak ada lagi iklan Marlboro--bergambar lelaki koboi penunggang kuda, Wayne McLaren--di layar televisi kita. Namun kepatuhan sekilas ini kembali mentah setelah Philip Morris membeli 40 persen saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna pada 2005. Produk-produk Sampoerna, antara lain A-Mild dan Dji Sam Soe, tetap diiklankan bebas merdeka di segala jenis media, termasuk menggunakan selebritas dan ikon-ikon kegemaran anak muda. BAT International dan Japan Tobacco, yang tadinya berjanji turut mengawasi polah tingkah sesama koleganya, Philip Morris, juga tidak berbuat apa-apa.

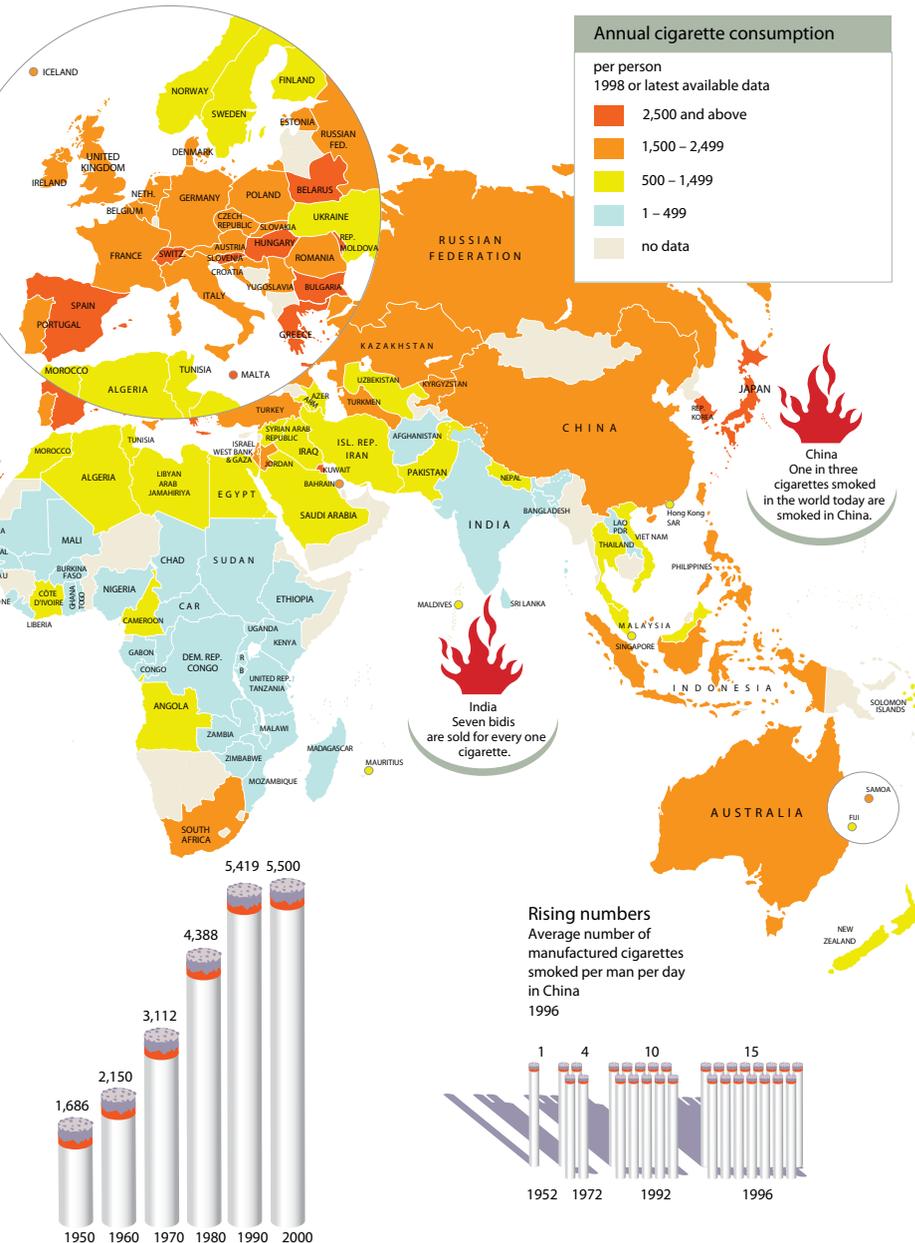
Kedaaan di atas membuktikan bahwa kesepakatan internasional bisa saja tidak dijalankan di sini, seolah-olah Indonesia bukan bagian dari masyarakat internasional. "Itu namanya industri rokok melecehkan Indonesia," kata Hakim Sorimuda Pohan. Memang benar, kesepakatan internasional tadi bersifat sukarela, tanpa sanksi mengikat. Tapi

Cigarette Consumption



pemerintah seharusnya menegakkan aturan lebih ketat, demi kepentingan publik dan demi marwah pemerintahan itu sendiri.

Muhaimin Moefti, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia



(Gaprindo) dalam sebuah wawancara dengan saya di tahun 2006, beralih, "Rokok produk legal. Kami berhak mengiklankan sesuai ketentuan yang berlaku." Dalih ini, meskipun pahit, harus diakui memang benar. Industri memanfaatkan pemerintahan yang belum menjalankan tugas dan belum menegakkan regulasi yang membela publik.

Lima alasan di atas meyakinkan saya bahwa rokok perlu diatur dan dikendalikan, agar kualitas kesehatan masyarakat dan produktivitas bangsa dapat membaik. Selain itu, pengaturan dan pengendalian perlu dilakukan agar negara lebih punya kesadaran melindungi kepentingan warga dan bukan hanya melihat aspek ekonomi jangka pendek. Juga: agar industri rokok lebih santun dalam memasarkan produknya yang 'berdosa".

Bagi saya, sebuah negara yang beradab dan berniat serius melindungi kepentingan publik harus berani menentukan pilihan -- antara membiarkan industri rokok terus meraksasa atau mengerem pertumbuhan industri rokok, demi terwujudnya kualitas kesehatan publik. Sang raksasa kini sudah telanjur besar dan digdaya. Ada 80 juta penduduk Indonesia yang sudah terjerat adiksi nikotin, mereka tak akan seketika berhenti *ngebul* hanya lantaran ada regulasi. Industri rokok dan berbagai derivatnya tak akan mungkin mati besok pagi hanya karena aturan ditegakkan.

Bab III

Pertaruhan Nasib Industri

Kita hidup di sebuah zaman yang penuh curiga. Apa daya, itulah yang terjadi. Siapa di balik sebuah kegiatan, siapa yang mendanai gerakan, apa motifnya, berapa dia dibayar, kenapa begini dan bukan begitu, adalah sederet pertanyaan yang lazim kita hadapi. Tak terkecuali untuk urusan pengendalian produk tembakau.

Tak gampang meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kami lakukan bertujuan sederhana: peduli pada kualitas kesehatan masyarakat. Motif ini mungkin terdengar klise, tapi memang benar begitulah adanya. Sederhana.

Biasanya, hujan pertanyaan muncul setelah saya jelaskan motif saya terlibat dalam isu pengendalian rokok. Pertanyaan atau tuduhan yang nadanya seperti ini:

- Anda pasti dibayar kapitalis industri farmasi dan industri asuransi kesehatan yang punya kepentingan di balik meredupnya industri rokok.

- Nasib petani tembakau jadi taruhan, apakah Anda mau bertanggung jawab?
- Bukankah masih banyak zat lain yang juga bahaya, misalnya *junk food* yang penuh kolesterol, kok Anda sibuk mengurus rokok?
- Ini pilihan orang dewasa, mau merokok atau tidak? Kenapa repot?

Sekarang, mari kita simak dengan kepala dingin dan bersama kita mencari jawaban dari hujan pertanyaan tadi. Pertanyaan paling provokatif adalah yang terkait kecurigaan bahwa ada yang mendanai gerakan *tobacco control*, termasuk yang saya lakukan dengan cara menulis buku ini. Tidak sekadar menyinggung integritas saya dan kawan-kawan lain yang punya kepedulian sama, pertanyaan ini juga membawa efek diametral,

membuat jaringan *tobacco control* berhadapan dengan kelompok masyarakat lain, terutama petani, buruh linting, dan industri rokok. Ini efek yang sama sekali tidak menyenangkan karena bukan niat saya untuk membunuh industri rokok dan mematikan pertanian tembakau.

Berbagai Kegiatan yang Didanai Industri Rokok Tahun 2007

No	Bidang yg Didanai Industri Rokok	Jumlah Kegiatan Dalam Setahun
1	Olahraga	870
2	Seni Budaya	438
3	Keagamaan	24
4	Lingkungan	5*)
5	Pendidikan	5*)

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2007. *) angka estimasi yang diolah dari berbagai sumber

Kapitalis Di Balik Layar?

Pertama-tama, kalau boleh blak-blakan, potensi bayaran yang bisa saya gaet jika memihak industri rokok jauh lebih menggiurkan ketimbang bayaran sebagai wartawan yang peduli soal kesehatan publik.

Pada 2007, seorang teman dari Singapura menelpon saya. “*Gua* tahu *elu enggak* mau terima duit, tapi bagaimana kalau *elu* difasilitasi sekolah sampai dapet gelar doktor? Kampus mana saja di seluruh dunia. Terserah pilih mana, *you name it*,” kata kawan yang juga seorang *lobbyist* kelas kakap ini. “Syaratnya gampang. *Elu* konsentrasi saja sekolah, lupakan soal urusan pengendalian tembakau.”

Tawaran melanjutkan sekolah tentu sangat menggoda, terutama karena bisa menetap di luar negeri. Tapi, entah mengapa saya tidak



menanggapi tawaran tadi. Tawaran itu saya lupakan dan kawan saya tak pernah lagi menelpon. Cerita selesai.

Kembali pada persoalan utama: benarkah ada industri farmasi atau asuransi yang berkepentingan dengan meredupnya industri rokok? Mari kita bedah bersama-sama.

1. Industri farmasi, dalam pengertian produsen obat-obatan, menurut saya, justru akan diuntungkan dengan banyaknya orang sakit dan gering lantaran terjerat adiksi rokok. Obat kanker, obat sakit jantung, obat



impotensi, obat asma, obat pembersih gigi yang menghitam, suplemen pendongkrak stamina perokok, pasti menjadi laris manis. Walhasil, ada logika yang tidak jalan bila yang dimaksud sebagai dalang gerakan pengendalian rokok adalah industri farmasi penghasil obat-obatan.

2. Bagaimana dengan industri farmasi penghasil produk pengganti rokok? Permen, koyo nikotin, atau rokok sintetik? Saya rasa, sensasi yang digandrungi perokok adalah saat rokok dibakar dan mengebulkan asap bergulung-gulung. Produk pengganti rokok tidak akan sanggup mengganti sensasi tersebut. Lagipula pengaturan dan pengendalian konsumsi tembakau tak akan menghentikan orang yang sudah terlanjur kecanduan rokok. Pengendalian hanya mengatur mereka agar menelan asap untuk paru-parunya sendiri, bukan mem-



bagikannya kepada orang lain. Produk pengganti nikotin, walaupun ada, tak akan diuntungkan oleh aturan pengendalian rokok.

3. Bagaimana dengan industri asuransi kesehatan? Di negeri ini, hanya 50,8 persen penduduk yang terlindungi program jaminan dengan berbagai bentuk, mulai dari Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk kelompok miskin. Sebagian kelompok menengah ke bawah menggantungkan pemerintah sebagai penjamin, yakni melalui Jamkesmas. Artinya, dengan begitu banyaknya masyarakat miskin, industri asuransi tidak berjalan dengan mekanisme yang sepenuhnya diatur pasar.



Dengan berbagai poin di atas, tidak masuk akal jika industri farmasi dan asuransi dituding berkepentingan meredupkan industri rokok. Kedua industri ini praktis tidak punya motif untuk merontokkan industri tembakau. Pihak yang berperan seolah-olah jadi korban, *playing victim*, siapa lagi kalau bukan industri rokok. "Siapa yang memainkan siapa?" kata Dr. Mawarwaty Djamaludin, mantan anggota delegasi RI dalam pembahasan awal FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). "Yang sesungguhnya jadi korban adalah publik yang menanggung biaya kesehatan tinggi. Namun, dalam setiap pembahasan FCTC, industri rokok berteriak paling kencang," kata Mawar.

Lalu, siapa *dong*, yang mestinya mengerem laju industri rokok? "Seharusnya pemerintah dan negara," kata Mawar. "Negara harus berusaha menjaga kualitas generasi muda, aset masa depan. Kalau itu tak dilakukan, apa lagi yang bisa diharapkan?" Seperti halnya rakyat, pemerintah menanggung biaya kesehatan tinggi akibat epidemi kecanduan merokok. Kalau industri rokok meredup dan kesehatan publik membaik, produktivitas bangsa pun akan melaju. Sayangnya, pemerintah belum 100 persen berpihak pada kepentingan kesehatan publik. Buktinya,

sejumlah aturan pengendalian tembakau sampai saat ini masih terganjal berbagai sebab. Ketimbang menyehatkan publik, pemerintah masih mengutamakan pemasukan cukai.



Imam Prasodjo, sosiolog dari Universitas Indonesia, menjawab kecurigaan adanya kekuatan kapitalis di balik gerakan *tobacco control* ini dengan sikap enteng. “Kalau benar ada yang *mbayarin* kami, buat saya tidak masalah,” katanya. Berbagai lembaga internasional, antara lain WHO, Bloomberg Initiatives, dan Global Fund, memang diketahui aktif mendukung gerakan pengendalian tembakau di seluruh dunia.

“Bagus,
dong. Itu
artinya

mereka membayar untuk melakukan kebaikan, mendorong kebijakan publik untuk kesehatan masyarakat. Tugas yang seharusnya dilakukan pemerintah,” kata Imam.



Imam membuat analogi ratusan ribu mahasiswa yang mendapat beasiswa kuliah di Amerika Serikat, termasuk yang pernah dijalani tokoh nasional Amien Rais. “Apa ya terus dibilang bahwa mereka, juga Pak Amien Rais, adalah antek Amerika?” katanya.

Tak sedikit pula pihak yang menuding bahwa kelahiran FCTC pada 2004 dibidani negara-negara industri. Tujuannya, begitu menurut tudingan yang beredar: untuk mematikan ekonomi negara dunia ketiga yang masih bergantung pada industri tembakau.

Tudingan tak berdasar ini ditangkis Mawar. “No way. Tidak benar itu,” kata anggota Delegasi RI untuk Pembahasan FCTC di Badan Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Mawar, justru negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang yang awalnya menentang ide FCTC. Negara-negara maju tersebut membawa suara dan kepentingan raksasa industri rokok di negara mereka seperti Philip Morris, BAT, Japan Tobacco,

dan lain-lain.

Mawar berkisah, inisiatif perlunya kesepakatan internasional tentang pengendalian tembakau muncul dari negara ketiga yakni Indonesia, India, Thailand, dan Bangladesh. "Kami-kami ini merasa risau, kecanduan merokok semakin luas. Kesehatan publik jadi korban," katanya. Pembahasan ini muncul di berbagai pertemuan menteri kesehatan sedunia. "Nggak ada urusan dengan industri. Kepedulian kami cuma pada kualitas kesehatan publik dan generasi muda," lanjutnya. Kesepakatan internasional dianggap penting karena pengendalian tembakau tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. "Jangkauan iklan mendunia, begitu pula dengan penyelundupan rokok," kata Mawar, "Dunia perlu bekerja sama."

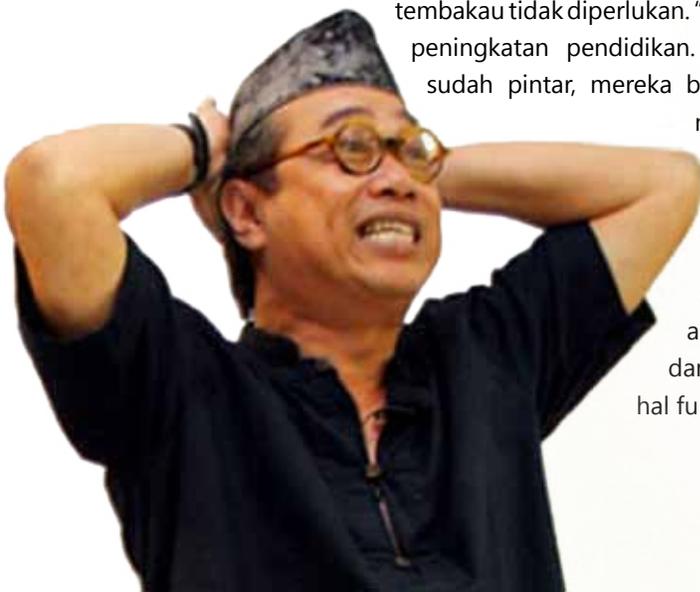
Pilihan Orang Dewasa

Rokok merupakan pilihan orang dewasa. Begitu sering ditekankan oleh industri rokok. Adegan dalam film "Thank You for Smoking...!" dengan bagus menggambarkan hal ini. Kalau Anda bijak, dengan sendirinya Anda bisa memilih mana yang baik untuk diri Anda. Merokok atau tidak sepenuhnya pilihan individu. Tak ada yang memaksa. Ini pilihan bebas.

Butet Kartaredjasa, seniman terkenal dari Yogyakarta, menangkap semangat pilihan bebas itu. Karenanya, Butet lebih menekankan prioritas pendidikan ketimbang regulasi rokok. Dalam sebuah artikel (<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/408162/>), Butet

menyatakan bahwa regulasi yang mengatur produk tembakau tidak diperlukan. "Yang diperlukan adalah peningkatan pendidikan. Kalau masyarakatnya sudah pintar, mereka bisa menyeleksi sendiri mana yang baik buat dirinya," tulis Butet.

A r g u m e n seperti itu lazim kita dengar -- sebuah argumen yang lemah dan mengabaikan satu hal fundamental: semaju apa





pun pendidikan di sebuah negara, pastilah ada banyak lapisan yang tak berdaya (kaum miskin, bayi, balita, remaja, dan orang tua), yang berisiko menjadi perokok pasif, dan tak kuasa menolak gempuran agresivitas iklan industri rokok. Akankah mereka dibiarkan tak terlindung, seperti halnya bayi yang tak bisa meninggalkan ruangan yang dipenuhi asap rokok?

Lagipula, menunggu kualitas pendidikan membaik di negeri ini merupakan sebuah ajakan yang tak jelas ujungnya. Entah kapan pendidikan berkualitas yang dimaksud Bung Butet bisa tercapai.

Ihwal pilihan orang dewasa ini juga menjadi tidak klop dengan agresivitas industri dalam beriklan. Pagi, siang, malam, di layar kaca, di panggung musik, layar film, riuh digempur iklan rokok. Kemasannya pun keren dan sangat apik (lihat *Bab-5 pada Boks-2: Berderap Memangsa Kaum Muda*). Lalu, bagaimana bisa disebut ini pilihan orang dewasa?

Regulasi = Industri Mati Besok Pagi

Regulasi mematikan industri. Pernyataan ini seperti menjadi mantra kalangan industri. "Banyaknya peraturan membuat penjualan rokok merosot," kata Muhaimin Moefi, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia, yang dimuat dalam laman Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (www.amti.or.id).

Keberatan industri akan regulasi dikuatkan berbagai kalangan. “Kami tak mau tembakau diatur pemerintah. Kalau penjualan dibatasi, kami bisa terjepit,” kata Imron, 40 tahun, petani tembakau dari Temanggung, Jawa Tengah, yang diwawancarai Koran Tempo (15 Maret 2010). Bersama ratusan petani, Maret 2010, Imron datang ke Jakarta, menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan.

Migir, 45 tahun, teman sedesa Imron, juga diwawancarai Tempo. “*Ongkos kulo saged mriki, dateng Jakarta, saking adol wedhus* (ongkos saya datang ke Jakarta sini dari jual kambing),” kata Migir. Langkah ini ditempuh Migir demi membendung Rancangan Undang Undang Pengendalian Produk Tembakau yang sedang dibahas parlemen. “*Kulo pingin mbako tetep wonten* (saya ingin tembakau tetap ada),” kata Migir.

Suara orang kecil seperti Imron dan Migir bergema dengan dahsyatnya. Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menyambut suara wong cilik ini dengan tangkas. “Saya menghormati hak azasi manusia, tapi saya juga harus menghormati hak azasi para petani dan buruh industri rokok,” katanya saat diwawancarai tim penulis buku ini. Anggota dewan dari daerah pemilihan Kudus, salah satu jantung industri rokok di Jawa Tengah, ini melanjutkan, “Bagaimana pun kepentingan negara kita saat ini adalah agraris, termasuk pertanian tembakau.” Dia menambahkan, “Gila apa? Masak saya mengutamakan WHO yang membela kepentingan negara maju?”

Dengan segala hormat kepada Mbak Eva, satu dari sedikit anggota dewan yang kritis dan punya keberpihakan pada rakyat, saya merasa ada yang keliru dalam pemahaman anggota dewan tentang *tobacco control*. Regulasi produk tembakau tak mungkin serta-merta membunuh industri tembakau, seperti yang dirisaukan Eva Kusuma Sundari.

Hakim Sorimuda Pohan, mantan anggota DPR yang aktivis jaringan ITCN, menilai pendapat bahwa industri bakal



ambuk kalau regulasi diterapkan adalah kekhawatiran berlebihan, asumsi yang simplistik, tidak logis, dan menyesatkan. "Itu mitos yang digembar-gemborkan industri," kata Hakim.

Rokok merupakan produk non-elastis yang tingkat penjualannya hampir-hampir tak terpengaruh harga dan regulasi. Mereka yang sudah mencandu tak akan begitu saja berhenti merokok hanya karena

harganya tinggi. Itu sebabnya, produksi rokok di Indonesia terus meroket meski cukai dinaikkan. "Tidak ada riwayat konsumsi rokok turun hanya karena regulasi," kata Hakim. Pengendalian rokok yang superketat di Thailand, misalnya, hanya sanggup menurunkan 1 (satu) persen jumlah perokok per tahun.



Regulasi ketat yang hanya sanggup menurunkan satu persen perokok ini juga memicu pertanyaan. Pada sidang *judicial review* Undang-Undang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi, awal 2009, Ketua MK Mahfud MD bertanya kepada saya:

- + *Mengapa Anda repot-repot mengusulkan pengendalian rokok kalau pengalaman regulasi di Thailand hanya bisa menurunkan satu persen perokok?*
- Langkah kecil harus dimulai, Yang Mulia. Kalau tidak dimulai, anak-anak dan remaja akan lebih banyak menjadi korban kecanduan nikotin.

Penting bagi kita untuk mendudukkan perkara dengan jernih. Saat ini ada 34 persen penduduk Indonesia (sekitar 80 juta jiwa) yang mencandu rokok. Para pecandu ini tidak akan serta-merta stop total menghisap nikotin hanya karena ada larangan iklan, kenaikan harga, atau penerapan kawasan tanpa rokok. Artinya, industri rokok dan seluruh roda yang terkait tidak akan mendadak bangkrut ketika regulasi diterapkan. Adalah omong kosong jika ada kampanye yang simplistik menyebut: jika undang-undang pengendalian tembakau diberlakukan, maka industri rokok pasti mati seketika.

Fatwa ulama pun tak akan mempan menghalangi mereka yang tubuhnya sudah *sakaw* menagih nikotin --kecuali jika yang bersangkutan punya tekad kuat ingin berhenti mencandu. Yang bisa diharapkan dari regulasi paling banter hanya ini: puluhan juta pencandu nikotin itu terpaksa merokok dengan cara lebih santun (bukan di tempat publik atau orang lain yang tak merokok). Selain itu, iklan dan pemasaran rokok harus diatur, tak bisa lagi semaunya industri, seperti sekarang. Dengan pengaturan iklan dan pemasaran, pertumbuhan pendatang baru, perokok usia muda, bisa direm.

Pengendalian konsumsi rokok mungkin baru kelihatan hasilnya belasan tahun kemudian. Sebelum itu, masih cukup waktu untuk bisa menyiapkan skema alternatif pertanian tembakau, baik beralih komoditi tanam atau mencari alternatif penggunaan daun tembakau untuk farmasi.

Skema kerjasama internasional FCTC, menurut Widyastuti Soerojo, ahli kesehatan masyarakat, dilengkapi dengan berbagai paket *workshop* eksplorasi pertanian tembakau, seperti *workshop* beralih ke komoditi lain atau tetap bertanam tembakau tapi



dengan peruntukan yang variatif di sektor farmasi. Persoalannya, petani di Indonesia tidak bisa memanfaatkan skema kerjasama internasional ini, kata Widyastuti, "Karena kita belum juga meratifikasi FCTC."



Kartono Mohamad, dokter yang juga pegiat di jaringan *tobacco control*, sepakat dengan Widyastuti. Upaya pengendalian rokok sebenarnya lebih bertujuan untuk mengerem laju perokok belia. "Juga untuk memaksa industri agar tidak semata-mata menjadikan masyarakat sebagai target pasar," katanya.

Saat ini Indonesia bagaikan benteng terakhir industri untuk mempertahankan pasar raksasa. Bersama India, Cina, dan Rusia, Indonesia tergolong pasar gemuk lantaran populasi penduduknya dahsyat. Bedanya, India-Cina-Rusia sudah meratifikasi FCTC dan sudah menjalankan regulasi industri rokok, sedangkan Indonesia belum. Indonesia masih berstatus pasar menggiurkan: populasi gemuk, regulasi lemah, dan kepedulian yang rendah akan pentingnya kesehatan masyarakat. "Itu sebabnya industri berupaya habis-habisan untuk mencegah jangan sampai Indonesia meratifikasi FCTC," kata Kartono.

Walaupun manfaat pengendalian rokok tak mungkin bisa dipetik tiba-tiba, langkah harus dimulai. Bagi saya, langkah kecil itu dimulai dengan menulis buku ini. Buku ini juga saya tulis sebagai bentuk kepedulian atas usaha pengaturan produk tembakau, yang bertahun-tahun diperjuangkan tapi selalu mental, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat maupun kementerian teknis.

Saya dibantu teman-teman wartawan yang tergabung dalam Campaign of Free Tobacco Kids (CTFK) dan KOJI (Koperasi Jurnalis



Independen), yakni Wahyu Dhiatmika, Felix Lamuri, Yus Ardhiansyah, Jojo Raharjo, Anita Rahman, Bibin Bintariadi, dan Parlindungan Sibuea. Mereka inilah yang mengumpulkan informasi, mewawancarai berbagai sumber, dan belanja data-data baru. Farid Gaban dan Alfian Hamzah melengkapi buku ini dengan beberapa tulisan.

Buku ini juga diperkaya dengan mozaik tulisan para wartawan peserta program *fellowship* liputan *tobacco control* yang digelar AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta, sejak tahun 2007. Harapan kami, buku yang jauh dari sempurna ini bisa menjadi salah satu rujukan dalam upaya pengendalian dan pengaturan produk tembakau di Indonesia.

Foto : Mawarwati Djamaluddin,

“Indonesia Ikut Melahirkan FCTC”

Mawarwati Djamaluddin,
mantan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan
Makanan

Gaya bicaranya tegas dan penuh semangat. Meski sudah lima tahun pensiun dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Mawarwati Djamaluddin masih ingat betul lika-liku perjuangannya saat masih bertugas di lembaga itu. Perannya kala itu memang tak bisa dibilang sepele.

Mawarwati adalah salahsatu pejabat penting di jajaran pemerintah Republik Indonesia yang terlibat aktif dalam perumusan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) atau konvensi internasional soal pengendalian tembakau. Pada sidang-sidang Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) yang membahas FCTC di Jenewa, dia bahkan pernah didaulat menjadi Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Karena itulah, Mawarwati sekarang termasuk yang paling kecewa dengan sikap pemerintah Indonesia yang belum juga meratifikasi FCTC.

“Apa sih yang ditakutkan? Itu kan hanya regulasi pelengkap saja,” katanya. Dia juga membantah kalau konvensi internasional ini merupakan pesan industri farmasi di negara maju yang ingin menghancurkan industri tembakau nasional milik negara berkembang. “Justru sebaliknya, inisiatif FCTC ini merupakan aspirasi negara berkembang,” kata Mawarwati.

Akhir Juli 2011 lalu, perempuan enerjik ini meluangkan waktunya untuk bicara panjang lebar soal riwayat kampanye pengendalian tembakau di Indonesia dan peran pemerintah Indonesia dalam perumusan FCTC. Berikut ini petikannya:

Bagaimana awal kampanye pengendalian tembakau di Indonesia?

Ketika menjabat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada awal 1990-an, saya dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan mulai melihat potensi ancaman dari epidemi merokok terhadap kesehatan masyarakat.

Ketika itu, konsumsi rokok kita tumbuh paling cepat di dunia. Pada kurun waktu 1990-1999 saja, konsumsi rokok bertambah 4 persen. Kami bicara di berbagai media soal ancaman ini. Kami menganggap ini ancaman serius bagi kesehatan generasi muda kita.

Kebijakan apa yang lalu dirumuskan pemerintah?

Kami berpikir ini harus dikendalikan dari hulunya: tembakau. Kebiasaan merokok ini wabah, ancamannya tidak hanya menimpa individu, melainkan juga masyarakat. Perokok aktif membuat orang di sekelilingnya menjadi perokok pasif, termasuk anak-anak dan bayi. Tanpa harus merokok sendiri, masyarakat menjadi korban. Para perokok juga kecanduan seperti terkena narkoba. Situasi ini membuat kami sebagai praktisi kesehatan *concern*.

Kami lalu merumuskan peraturan perundang-undangan soal pengendalian tembakau. Saat itu belum ada FCTC. Kami berhasil mendorong keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 pada masa Presiden BJ Habibie dan Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moeloek.

Apa isi peraturan itu?

Memang belum menyeluruh tapi sudah ada beberapa aspek pengendalian tembakau yang masuk. Misalnya soal label peringatan bahaya merokok. Ini terkait peran pengawasan BPOM. Pembatasan waktu iklan produk rokok waktu itu sudah ada.

BPOM sejak awal memang aktif terlibat dalam kampanye pengendalian tembakau?

Kami di BPOM menggolongkan rokok sebagai salah satu zat adiktif. Jadi pengawasannya pun khusus, ada di bawah Deputi Pengawasan Obat dan Direktur Khusus untuk Narkoba dan Zat Adiktif. Kami mengawasi di lapangan, apa saja zat yang ada di dalamnya, apa sudah sesuai label, kandungan nikotinnya berapa, dan seterusnya. Kami punya alat pengukur kandungan nikotin dan tar dalam rokok, di laboratorium BPOM.

Bagaimana kemudian Indonesia terlibat aktif dalam perumusan FCTC?

Kebetulan ketika itu Indonesia juga anggota aktif WHO yang memang mulai membicarakan isu pengendalian rokok. Sejumlah rapat WHO banyak membahas ancaman wabah epidemi rokok yang mengancam banyak negara. Dari sana, mulailah ada pemikiran tentang konvensi dasar pengendalian tembakau atau *framework convention on tobacco control*, yang bisa berlaku secara internasional.

Dasar pemikiran kami waktu itu sederhana. Kalau pengendalian tembakau hanya diatur masing-masing negara, bisa dipastikan akan



terjadi penyelundupan rokok yang terus meningkat. Karena itu dibutuhkan sebuah pengaturan lintas negara untuk memastikan efektivitas pengendalian tembakau. Pada tahap pembahasan awal ini, Indonesia – bersama banyak anggota WHO lain—mendorong WHO membentuk tim khusus untuk mengkaji masalah ini.

Ada informasi, kelompok negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa yang awalnya mendorong pembahasan soal FCTC ini...

Itu tidak benar. Justru motornya berasal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand dan India. Negara-negara di kawasan Amerika Latin juga pro peraturan ini. Dari kelompok negara maju tentu tidak semua menolak, ada juga pendukung regulasi ini. Tapi negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina justru awalnya menolak pengaturan tembakau.

Bagaimana waktu itu, kubu Anda meyakinkan kelompok penentang akan pentingnya FCTC?

Data kami kuat. Kelompok masyarakat sipil yang berdiri di belakang inisiatif WHO ini juga bukan sembarangan. Mereka terdiri dari asosiasi spesialis jantung, asosiasi dokter dan lainnya. Kami tidak *just campaign*, tapi didukung data. Memang ini pekerjaan berat, tapi untungnya Sekjen WHO ketika itu, Gro Brundtland dari Norwegia, amat hebat dan mendukung kami.

Apa contoh dukungan Sekjen WHO pada saat itu?

Ibu Brundtland adalah sosok yang cukup kuat dan bisa mengarahkan forum. Akhirnya, semua anggota WHO sepakat akan pentingnya sebuah kerangka regulasi internasional untuk pengendalian tembakau ini.

Apa benar dukungan Indonesia karena intervensi kekuatan internasional?

Tidak benar. Pemerintah Indonesia setuju bukan karena mau diatur-atur oleh kekuatan asing, tapi kami melihat ada peluang untuk memperkuat aturan internasional. Kami ingin regulasi internasional ini bisa melengkapi undang-undang nasional kita. Itu yang kita inginkan. Jadi tolong jangan dibalik-balik.

Sebuah *framework* yang bersifat menyeluruh, menurut kami, bisa mendorong penataan masalah rokok ini secara *integrated*. Tujuan

utamanya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita dengan melindungi generasi muda --baik saat ini maupun di masa depan—dari bahaya rokok. Tidak kurang dan tidak lebih dari itu.

Mengapa FCTC dianggap tonggak penting dalam kampanye global untuk kesehatan masyarakat?

Konvensi ini adalah peraturan internasional pertama yang berangkat dari data dan bukti ilmiah. Berdasarkan dorongan dari semua bukti ilmiah itu, lahirlah resolusi *World Health Assembly* --pertemuan tahunan antar Menteri Kesehatan sedunia— pada 1995 yang meminta WHO melakukan studi kelayakan soal perlu tidaknya ada instrumen internasional untuk menanggulangi dampak konsumsi tembakau. Setahun kemudian, WHA kembali menelurkan resolusi serupa.

Empat tahun kemudian pada 1999, WHA merumuskan rancangan kasar (*draft*) FCTC untuk dinegosiasikan oleh seluruh negara anggotanya. Setiap tahun hasilnya dilaporkan pada sidang WHA. Setiap negara anggota juga terbagi dalam dua kelompok kerja, membahas secara intensif draft ini. Sampai akhirnya pada 2003, disetujui rancangan final yang kemudian diajukan pada sidang resmi WHO.

Apa peran Indonesia dalam proses itu?

Kita terus aktif sejak 1995 sampai akhir. Bukan hanya saya saja, tapi sampai tingkat menteri. Dalam setiap pertemuan WHO, kita sangat aktif memberi masukan dan kontribusi. Silakan cek bagaimana detail dari diskusi pada saat itu. Semua terekam dan dicatat di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss.

Bisakah Anda gambarkan bagaimana suasana diskusi ketika itu?

Pada diskusi di kelompok kerja misalnya, kami berbicara dengan semua pemangku kepentingan dalam masalah ini. Mulai dari petani tembakau sampai industri rokok, semuanya didengarkan. Informasi masuk dari segala penjuru.

Pada diskusi kelompok kerja ini, selain Indonesia, ada delegasi India, Iran, Turki, Australia dan Amerika Serikat. India yang memimpin penyusunan naskah kasar FCTC.

Apa yang terjadi setelah itu?

Pada 2003, kelompok kerja berhasil menyusun naskah kasar FCTC.

Naskah itu kemudian dilempar ke forum resmi WHO dimana setiap pasal dibahas dan diperdebatkan. Di sela-sela forum resmi itu, juga ada pertemuan-pertemuan informal untuk mencari kesamaan perspektif dan pandangan. Jadi tidak benar kalau FCTC dituduh sebagai buatan Amerika Serikat.

Sepertinya banyak perdebatan yang berat ya...

Iya. Semua pertemuan itu berlangsung dari pagi sampai tengah malam. Semua yang berbicara dalam forum negosiasi itu adalah wakil resmi pemerintah masing-masing. Perdebatannya sangat alot. Kadang kami tidak sempat makan siang.

Negara yang tidak setuju satu pasal, mengajukan data pembanding. Terjadi perang data dan informasi. Di sela rapat, ada forum-forum kecil dimana peneliti dari Kanada, Australia dan negara lain, memaparkan hasil penelitian soal macam-macam, mulai temuan penyakit yang ditimbulkan tembakau, apa penyebabnya, sebab akibatnya dan lain-lain. Semuanya disampaikan dan diekspos, sehingga seluruh delegasi makin paham mengenai dampak negatif tembakau.

Lokasi sidang lebih sering dimana?

Kalau World Health Assembly selalu berlangsung di Jenewa, Swiss. Tapi kalo Rapat *Negotiating Body* berpindah. Dua kali di Jenewa, lalu pindah ke Jaipur, India, kemudian kembali ke Swiss.

Di antara rapat-rapat penting itu, ada forum *Inter-Countries Consultation* yang melibatkan negara dari kawasan yang sama. Saya pernah mewakili Indonesia dalam forum semacam ini di Bhutan. ASEAN juga punya forum konsultasi untuk FCTC, diadakan di Malaysia waktu itu. Dalam semua pertemuan itu, kita sangat aktif.

Bisa diceritakan lebih detail bagaimana peran delegasi RI dalam pertemuan-pertemuan itu?

Delegasi Republik Indonesia terdiri dari wakil Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, juga Kementerian Keuangan yang diwakili Direktorat Bea Cukai. Ada juga perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, dan Kementerian Luar Negeri. Ada juga wakil-wakil asosiasi profesi dan LSM, misalnya Dr Tjandra Yoga Aditama yang dulu mewakili asosiasi ahli paru-paru.



Ketua Delegasi adalah Perwakilan Tetap RI di PBB yang memang berkedudukan di Jenewa. Ketika itu, pada 1999, yang menjadi Ketua Delegasi kita adalah Dr. Nur Hassan Wirajuda yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri. Pak Wirajuda mendukung FCTC seratus persen.

Bagaimana koordinasi di dalam delegasi?

Setiap kali mau berangkat ke pertemuan WHO, BPOM dan Depkes –sebagai dua lembaga atau departemen teknis-- bergantian ditunjuk menjadi koordinator. Kita biasanya rapat dulu, mengatur posisi. Karena ada banyak elemen di FCTC, kita harus mengatur siapa yang bisa berbicara soal apa. Misalnya soal cukai rokok, yang bicara harus wakil Direktorat Bea Cukai.

Jadi tidak semua bisa unjuk bicara?

Semua topik dan usulan kita bahas bersama. Tapi dalam forum pleno, hanya perwakilan resmi yang bisa bicara. Biasanya saya dan Prof. Anhari dari Universitas Indonesia yang sering mewakili delegasi, menyampaikan pendapat dalam forum.

Tapi apa yang kami sampaikan dalam forum, sudah mewakili semua lembaga dan kepentingan yang ada di dalam delegasi. Misalnya,



soal ketenagakerjaan. Wakil dari Kementerian Tenaga Kerja pernah menyampaikan bahwa buruh dan karyawan pabrik rokok itu sebenarnya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Buruh linting rokok ya pekerjaannya itu-itu saja, tidak meningkat, dari dulu. Jadi, Kementerian Tenaga Kerja sudah menyadari kondisi buruh di industri rokok.

Apa pernah ada perbedaan pendapat di kalangan internal Delegasi RI soal FCTC, misalnya dari Kementerian Perindustrian yang biasanya membawa kepentingan industri tembakau?

Saya kira tidak ada. Kita semua sama. Kalau tidak sama, tentunya setiap kementerian itu tidak akan mengirimkan wakilnya ke dalam tim negosiasi Delegasi RI. Tentu saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka masing-masing, tapi sejauh yang saya tahu, kita konsisten menyuarakan sikap resmi kita yakni memberikan dukungan pada FCTC.

Menurut Anda, apa ada potensi gesekan kepentingan dari kementerian lain di luar Kementerian Kesehatan dan BPOM soal isu pengendalian tembakau ini?

Kami memang sering berdiskusi dan berkonsultasi, menentukan bagaimana posisi Indonesia dalam isu-isu detail itu. Elemen pengendalian tembakau itu kan ada dua: pengendalian suplai tembakau dan

pengendalian konsumsi tembakau. Jadi jelas Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam topik ini. Ada elemen pertanian tembakau dan industri pembuatan rokok, ada kompensasi dan macam-macam lagi yang tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Pemerintah tentu tetap mendukung pertanian dan industri tembakau, meski pemerintah punya komitmen untuk perlahan-lahan mengendalikan suplai tembakau ini.

Komitmen macam ini harus diturunkan menjadi kebijakan. Nah disinilah peran Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan untuk membuat kebijakan yang tepat, untuk mengalihkan sektor-sektor ini lewat program jangka panjang 25 tahun misalnya.

Jadi, dari sisi komitmen kita semua ketika itu berangkatnya sama: bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Kesamaan komitmen itu menghasilkan desain kebijakan yang searah. Kalau komitmennya tidak sama, sektor kesehatan yang akan kena dampaknya.

Jadi meski ujungnya adalah peningkatan kesehatan masyarakat, semua sektor sepakat bekerjasama?

Semua harus bekerja keras. Misalnya soal penyuluhan informasi dan edukasi, pemerintah harus memastikan anak-anak menyadari bahaya merokok. Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok harus bersama-sama. Juga pelarangan total semua bentuk iklan rokok. Jadi pendekatannya mesti komprehensif, tidak bisa setengah-setengah.

Kembali ke perumusan FCTC, bagaimana pemerintah menyosialisasikan hasil perundingan FCTC itu di dalam negeri?

Setiap kali selesai perundingan dan kami pulang ke Jakarta, kami selalu menggelar rapat. Industri rokok di dalam negeri, juga selalu diundang dan terlibat dalam rapat-rapat itu. Tentu industri rokok tidak punya hak suara, hanya mendengarkan saja. Kami selalu mem-brief peserta rapat soal hasil perundingan soal FCTC di luar negeri.

Apakah industri tembakau juga diberi ruang pada forum WHO?

Industri tembakau hadir sebagai *observer* di sana. Mereka mendengar semua perdebatan dan pada kesempatan tertentu, diminta menyampaikan hal-hal tertentu. Jadi prosesnya sangat terbuka. Seluruh proses perumusan FCTC ini menghabiskan waktu 8 tahun.

Ada beberapa poin krusial dalam FCTC, mulai dari pencantuman label bahaya bergambar pada kemasan rokok, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai rokok dan pelarangan iklan. Bagaimana perdebatannya di WHO saat itu?

Kira-kira begini. Mulanya, kami membicarakan elemen-elemen apa yang harus masuk dalam suatu *framework*. Akhirnya kita sepakat: pendekatannya harus komprehensif --baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Dari sana, kita turunkan lagi: dari sisi *demand* apa saja yang mesti dilakukan, dan dari *supply* apa saja. Ini kita gabungkan dengan *success stories* dari berbagai negara. Misalnya pencantuman label bahaya rokok di kemasan berhasil menurunkan konsumsi rokok sampai 8 persen di Turki.

Ada usulan Indonesia soal pengendalian rokok yang ditolak dalam forum WHO?

Ada. Misalnya, satu negara mengusulkan agar anak-anak di bawah usia 18 tahun itu tidak boleh membeli maupun menjual rokok. Untuk menegakkan aturan itu, setiap pembeli rokok harus menunjukkan kartu tanda pengenalan atau KTP di kita. Indonesia menolak. Kebetulan waktu itu saya yang mewakili Delegasi RI bicara. Saya sampaikan bahwa membuat aturan macam itu membutuhkan penegakan hukum terus menerus. Harus ada yang memeriksa KTP setiap pembeli rokok dan seterusnya. Itu membutuhkan biaya dan personel yang tidak sedikit. Kami tidak mampu.

Negara mana yang awalnya bersikeras menolak FCTC?

Amerika Serikat, Jepang, Cina. Mereka --sejak awal sampai akhir, menolak FCTC. Berat sekali meyakinkan mereka. Tentu mereka membawa kepentingan industri tembakau di negaranya masing-masing. Tapi kami selalu bertanya apakah kita semua berkomitmen pada perbaikan kualitas sumber daya manusia di negara masing-masing? Semua kepentingan lain seharusnya bisa dikesampingkan.

Jadi memang sejak awal ada kekhawatiran FCTC "membunuh" industri tembakau?

Iya, padahal tidak seperti itu. Bukan berarti begitu suatu negara menandatangani FCTC, industri rokok di negara itu langsung mati. Kesepakatan ini menggarisbawahi komitmen suatu negara terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Apa yang kita susun ini baru telurnya, tapi ini setidaknya sudah memberikan arah perkembangan suatu negara.

Seandainya Indonesia menandatangani FCTC pada 2003, apa Philip Morris, BAT dan industri rokok internasional lain mau berinvestasi di sini beberapa tahun kemudian?

Saya kira tidak. Justru karena Indonesia tidak menandatangani FCTC itulah, mereka tahu arah negara ini kemana. Datanglah kemudian Philip Morris berinvestasi besar-besaran ke Indonesia. Pemerintah pun bangga. Mereka tidak tahu, Philip Morris datang ke sini, karena tidak bisa memperluas usahanya di tempat lain.

Makanya saya heran dan sedih mengapa ada anggapan kalau FCTC ditunggangi oleh kepentingan Barat, padahal perusahaan yang berinvestasi ke sini adalah industri rokok dari Barat, macam Philip Morris. Jadi siapa yang menunggangi siapa? Mengapa ketika kita memperjuangkan hal-hal berbau internasional, kita selalu dituduh ditunggangi asing? Padahal konteks masalahnya berbeda.

Ada tuduhan jika Indonesia meratifikasi FCTC, terjadi intervensi atas kebijakan negara....

FCTC itu tidak memiliki kekuatan mengatur negara kita seperti kekuasaan peraturan perundang-undangan nasional misalnya. Semua orang juga tahu itu. Jadi apa yang ditakutkan? Saya lebih takut pada undang-undang nasional. FCTC ini hanya pelengkap saja. Memang dia adalah regulasi internasional yang lintas negara, namun aturan detailnya tetap harus dirumuskan di peraturan nasional negara kita masing-masing. Jadi, kitalah yang seharusnya memanfaatkan FCTC, bukan sebaliknya.

Tuduhan macam ini muncul dalam dokumen internal industri tembakau. Industri tampaknya menyebarkan pemahaman bahwa FCTC adalah agenda negara maju yang ingin mengintervensi negara berkembang...

Itu akal-akalan saja. Lihat saja siapa pemilik pabrik-pabrik rokok besar di Indonesia. Phillip Morris itu Amerika atau Indonesia? Apa kepentingan Philip Morris itu sama dengan kepentingan nasional kita?

Pada 2003, mendadak posisi Indonesia dalam FCTC berbalik. Anda ingat apa yang terjadi?

Ketika FCTC sudah final dirumuskan pada 2003 itu, awalnya pemerintah Indonesia sudah siap menandatangani. Naskah FCTC sudah jadi, tinggal disahkan di rapat *World Health Assembly*. Indonesia ikut

menyetujui naskah final itu secara aklamasi, sebelum kemudian ada penandatanganan.

Beberapa bulan kemudian, ketika tiba waktunya penandatanganan, ada insiden. Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sudah siap berangkat untuk menandatangani FCTC, namun mendadak batal. Ketika itu, memang menjelang akhir kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, saya dengar situasi politik agak panas.

Apa yang terjadi setelah itu?

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, situasi tidak membaik. Menteri Kesehatan yang baru ketika itu, Ibu Siti Fadillah Supari tidak terlalu mendukung penandatanganan FCTC.

Anda tentu kecewa. Pernah memprediksi bakal berakhir seperti ini?

Ya jelas kecewa dong. Kita yang mendorong kelahiran FCTC. Indonesia ikut melahirkan peraturan ini. Saya membayangkan kita ikut menandatangani. Saya tidak tahu kenapa jadi seperti ini.

Padahal Anda terlibat sejak awal ya...

Saya benar-benar merasa *hopeless*. Saya berusaha untuk tidak apatis, tapi kadang saya bertanya, dimana komitmen kita? Semua yang dulu kita bangun, tidak jalan. Nasib FCTC ini sama dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementerian Kesehatan yang dulu pada 1994 pertama kali menyusun RUU-nya. Tapi karena tarik menarik kepentingan, tidak jalan sampai sekarang.

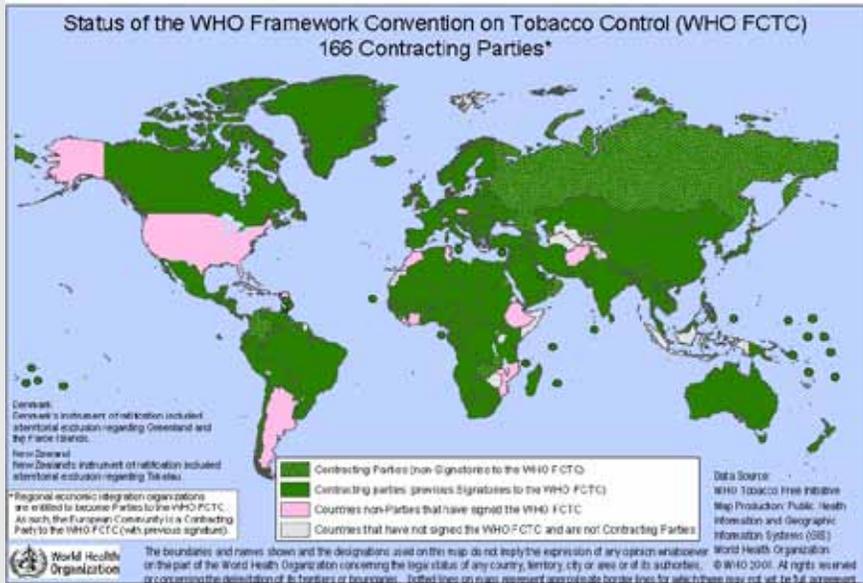
Apa akar persoalannya?

Kita senang mengulur waktu, tidak cepat membuat keputusan. Akibatnya Indonesia ini banyak kehilangan kesempatan. Sejak saya pegawai junior sampai pensiun, gejala itu tidak berubah. Masalah yang sebenarnya sudah bisa diputuskan, diulur-ulur terus.

Apa yang urgen dilakukan saat ini?

Selain meratifikasi FCTC, pemerintah seharusnya segera membuat UU Pengendalian Tembakau yang bersifat nasional. Jangan seperti sekarang, Rancangan Peraturan Pemerintah-nya saja direvisi terus dan tidak jadi-jadi. Makin direvisi, kok ya makin pro industri rokok.

Saya sering bertanya dalam hati soal argumentasi pabrik rokok melawan aturan pengendalian tembakau. Mereka mengaku sebagai



industri nasional, kretek dianggap warisan budaya bangsa. Tapi coba lihat pemilik pabrik-pabrik rokok itu? Siapa mereka? Apa benar mereka mengedepankan kepentingan nasional?

Anda pernah ditekan atau diintimidasi akibat perjuangan Anda menggolkan FCTC?

Ada yang pernah mendatangi saya. Tapi mereka tidak berani terus terang meminta saya untuk mundur, atau menahan diri. Yang pernah frontal memaki saya justru Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Ismanu Soemiran.

Ketika itu, saya baru berbicara dalam forum sosialisasi FCTC. Saya menekankan pentingnya pelarangan iklan rokok dan seterusnya. Saya juga tegaskan bahwa industri tembakau ini sudah *sunset*, tidak bisa berkembang lagi. Eh dia marah bukan main dan menyumpah-nyumpah saya. “Bu Mawar, saya sumpahin Anda kalau yang bakal *sunset* itu Anda, bukan industri rokok,” katanya.

Bagaimana Anda melihat komitmen para pejabat yang dulu ikut memperjuangkan FCTC?

Saya tidak mengerti. Saya juga heran mengapa Ketua Delegasi RI ketika itu, Hassan Wirajuda, tidak terus memperjuangkan ini ketika

diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Mungkin buat dia, ini soal yang tidak penting, bukan masalah politik, sehingga tanggungjawab mendorongnya diserahkan pada Menteri Kesehatan saja. Atau mungkin ada pemikiran, sudahlah FCTC ini nanti saja dulu, daripada ada demonstrasi terus.

Bagaimana dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat?

Saya yakin kebanyakan anggota DPR tidak begitu paham soal regulasi ini. Itu yang saya khawatirkan. Ketika masih di BPOM, saya sering rapat kerja dengan DPR, setiap bulan atau dua bulan, laporan soal ini selalu kami berikan secara rutin. Tapi apakah mereka memahami laporan kami soal FCTC ini, saya tidak tahu.

Belakangan sejumlah kementerian malah membuat roadmap industri tembakau yang memasang target peningkatan produksi rokok sampai 240 miliar batang per tahun...

Itu yang sangat saya sayangkan. Terus terang saja, saya belum melihat komitmen pemerintah secara utuh. Seharusnya komitmen itu dimulai dari yang *number one* ya, yang paling atas. Bukan dari pejabat yang hanya ikut delegasi seperti saya.

Kalau memang pemerintah berkomitmen menandatangani FCTC, pucuk pimpinan yang *number one* harus memberikan perintah yang jelas kepada jajaran kementeriannya. Perintah itu diterjemahkan menjadi program-program konkret. Kalau saja, sepuluh tahun lalu, Kementerian Pertanian sudah membuat program diversifikasi untuk petani tembakau misalnya, ya selesai persoalannya. Tidak ada maju-mundur seperti sekarang.

Sekarang pemerintah hanya menonjolkan pencitraan. Berapa jumlah petani tembakau di Temanggung? Berapa buruh pabrik rokok di Jawa Timur? Apa benar beberapa puluh juta? Itu angka yang dibesar-besarkan. Tapi pemerintah tidak peduli, yang penting mereka terkesan membela rakyat kecil, terkesan membela petani dan buruh. Apa pemerintah tahu berapa gaji buruh pabrik rokok? Apa mereka sudah sejahtera? Kenapa untuk pencitraan ini, masa depan generasi muda kita, nasib ratusan juta penduduk negeri ini harus dikorbankan?

Apa dampak dari penolakan Indonesia menandatangani FCTC?

Dengan tidak ikut menandatangani, maka posisi kita dalam FCTC

menjadi lemah, kita bukan *participating countries* melainkan hanya sebagai pengamat (*observer*) saja dan tidak ikut menentukan.

Kita jadi kehilangan momentum. Lihat saja, pihak lain sudah mulai maju, sementara kita begini saja. Negara-negara penandatangan FCTC sudah mulai merumuskan aturan atau prosedur formal untuk pemberlakuan aturan ini, sementara Indonesia tidak bisa ikut.

Artinya kita tidak bisa berperan dalam perumusan aturan operasional FCTC?

Tepat. Padahal peran Indonesia seharusnya di situ. Prosedur standar ini mulai lebih teknis dan detail. Kalau tidak dibahas, kita tidak bisa menyuarakan kepentingan kita. Misalnya Indonesia berkepentingan agar industri tembakau tidak langsung ditutup, melainkan diminta beradaptasi dalam kurun waktu tertentu. Kalau kita tidak ada sebagai penandatangan FCTC, ya suara itu tidak bisa diperjuangkan. Kepentingan kita jadi tidak terwakili.

Banyak negara produsen tembakau yang sudah menandatangani FCTC sekarang mulai mengalihkan pertanian tembakau ke komoditas lain, dengan bantuan pendanaan internasional. Apa ini contoh kesempatan yang hilang itu?

Kalau dihitung sejak 2002 silam, artinya kita sudah hampir 10 tahun *lost momentum*. Banyak negara di Amerika Latin sekarang sudah mulai melakukan diversifikasi dari perkebunan tembakau menjadi perkebunan coklat, kopi dan lain sebagainya. Komoditas baru itu ternyata itu lebih meningkatkan *income* para petani. Semua program peralihan itu didukung oleh *Global Fund* yang memang diberikan pada negara anggota FCTC.

Bagaimana awalnya bisa muncul program Global Fund untuk pengalihan pertanian tembakau ini?

Kami tidak mau FCTC ini semata-mata melindungi satu hal dengan mengorbankan sisi lain. Tidak begitu. Karena itu ketika sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina meminta agar pertanian tembakau ini diatur, tidak hanya dilarang-larang, kami semua setuju.

Jadi sebenarnya FCTC ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengendalian tembakau ya?

Iya, sudah digodok dengan cukup matang. Bayangkan, proses perumusannya saja delapan tahun dan melibatkan banyak negara di

dunia. Perdebatannya amat intensif dan berkelanjutan, tidak hanya satu pertemuan dalam satu tahun, tapi terus menerus.

Terakhir, apa kunci keberhasilan kampanye pengendalian tembakau?

Yang paling penting adalah komitmen negara. Jangan benturkan pengendalian tembakau dengan risiko jutaan petani tembakau kehilangan mata pencaharian. Kalau benar ada risiko itu, maka itu bagian pekerjaan Menteri Pertanian, bukan Menteri Kesehatan. (*)

Bab IV

Kisah Dokumen TOP SECRET

Sebagai jurnalis yang banyak menggeluti isu kesehatan dan sains, pada Oktober 2005, saya mengajukan aplikasi *fellowship* mengikuti Konferensi Kanker Sedunia (World Cancer Congress) di Washington, Amerika Serikat. Ini kesempatan yang langka, dan menyenangkan, bertemu para ahli kanker sedunia. Salah satu sesi yang disuguhkan dalam konferensi ini adalah kaitan antara rokok dan kanker.

Pada kongres inilah saya berkenalan dengan dokumen industri rokok yang masuk kategori TOP SECRET. Ross Hammond bersama timnya dari CTFK (Campaign for Free Tobacco Kids, sebuah NGO di Washington) membawakan *workshop* mengenal dokumen industri rokok. Bagaikan harta karun, timbunan dokumen ini tak putus dipelajari para ahli hukum dan ahli kesehatan dari berbagai belahan dunia. Jurnal bergengsi seperti BMJ (British Medical Journal) dan NEJM (New England Journal of Medicine) telah merilis puluhan studi penelusuran dokumen ini.

Pada *workshop* itu, kami, para jurnalis dari berbagai negara yang menjadi peserta konferensi, dibuat terkesima dengan beberapa bundel dokumen yang dibawa tim University of California San Fransisco (UCSF). Tim ini tergabung dalam program raksasa penyusunan "Digital Library of Tobacco Documents" (<http://legacy.library.ucsf.edu/>).

Dokumen yang dibawa Ross Hammond dan timnya bertanda nomor dan *barcode* pada dua sisi kertas. "Ini penanda otentisitas. Setiap lembar dokumen ini disahkan oleh pengadilan Amerika dan pengacara industri rokok yang menyerahkan dokumen," kata Duncan Campbell, jurnalis investigasi dari Amerika Serikat yang aktif menggali timbunan dokumen industri ini, yang menjadi moderator pada *workshop* di Washington ketika itu.

Kami bersemangat membolak-balik dokumen tersebut. Mengejutkan. Isi dokumen sebagian besar berisi seputar lobi-lobi tingkat tinggi industri rokok, ilmuwan dan media bayaran, strategi pemasaran, dan komunikasi internal tujuh raksasa industri rokok Philip Morris Incorporated, R.J. Reynolds Tobacco Company, British American Tobacco (BAT) Industries, Brown & Williamson, The Liggett Group, dan The Tobacco Institute and The Council for Tobacco Research, dan Lorillard Tobacco Company.

Lalu bagaimana ceritanya industri rokok mau menyerahkan dokumen internal yang seluruhnya bertaburan tanda TOP SECRET, CONFIDENTIAL, atau STRICTLY INTERNAL MEMO itu? Bukankah itu berarti mereka mengekspos kebobrokan dan praktik kotor mereka kepada publik?

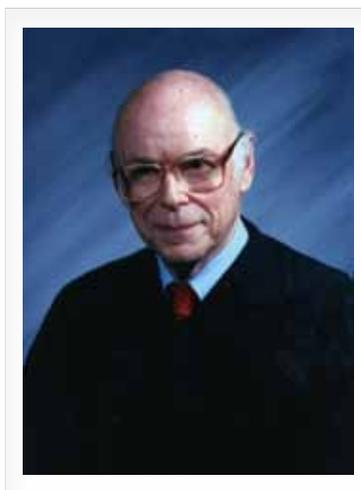
Gunungan dokumen itu memang bisa menjadi bumerang yang membangkrutkan industri rokok. Ribuan gugatan, dengan nilai triliunan dolar, bisa muncul dengan dukungan dokumen otentik ini. Dan, bukan hanya soal uang, terbukanya lembar-lembar rahasia ini juga sangat potensial menjatuhkan reputasi dan citra industri rokok.

Tentu saja ketujuh raksasa industri rokok itu tidak sukarela menyerahkan dokumen internal mereka. Pengadilan Amerika Serikat yang memaksanya. Langkah ini digelar setelah berbagai gugatan konsumen kandas di meja hijau lantaran kurang bukti. Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, ada 800-an gugatan konsumen (biasanya tentang informasi yang *misleading*, klaim berlebihan yang menipu konsumen, dan praktik

pemasaran yang dianggap kelewat agresif) namun hanya dua kasus yang bisa diproses sampai tahap akhir di pengadilan. Kondisi ini memicu rasa frustrasi masyarakat -- begitu digdaya industri rokok sehingga begitu mudah menepis gugatan konsumen.

Hakim H. Lee Sarokin, pada 1992, dalam proses tarik-ulur penyerahan dokumen industri ini merilis sebuah pernyataan yang legendaris:

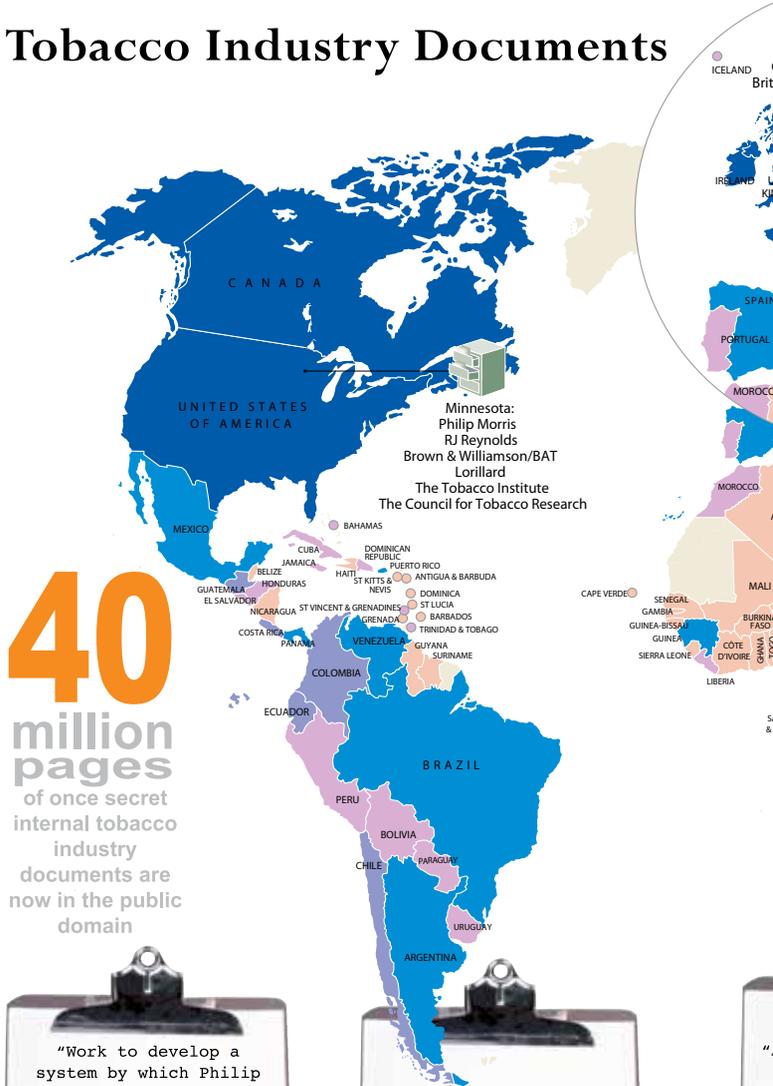
"Sering kali kita dihadapkan pada pilihan antara kesehatan fisik konsumen dan kesehatan finansial bisnis, upaya menutup-nutupi lebih dipilih ketimbang upaya membuka diri, penjualan dimenangkan di atas keselamatan, uang melampaui moralitas. Memangnya siapa orang-orang ini yang mengetahui dan secara rahasia memutuskan untuk menempatkan publik pada situasi yang berisiko, demi mencetak keuntungan? Siapa orang-orang ini, yang percaya bahwa kesakitan dan kematian konsumen adalah harga wajar yang harus ditanggung oleh kesejahteraan si konsumen itu sendiri?"



Kemudian, keputusan dramatis datang pada November 1998. Itulah saat yang terkutuk bagi industri rokok. Jaksa Agung di 46 negara bagian di Amerika Serikat mengeluarkan sabda mengejutkan. Tujuh raksasa rokok diwajibkan membuka seluruh dokumen rahasia mereka kepada publik. Perintah ini tercantum dalam rangkaian kesepakatan yang dikenal sebagai *Tobacco master settlement act* (MSA). "Kebenaran harus dikabarkan," kata Jaksa Agung Minnesota Hubert Humphrey III – yang terdengar seperti sepenggal sajak W.S. Rendra bagi telinga kita.

Dokumen internal yang dimaksud memang bukan sembarangan dokumen. Inilah memo internal, pengakuan internal tentang mudharat rokok, surat lobi kepada penguasa, juga daftar ilmuwan dan jurnalis bayaran, yang menjadi bukti nyata betapa gerak dan pertumbuhan industri rokok amat sarat dengan trik dan muslihat. Semuanya demi menggemukkan pundi-pundi penjualan, yang artinya meluaskan kecanduan merokok ke seluruh dunia.

Tobacco Industry Documents

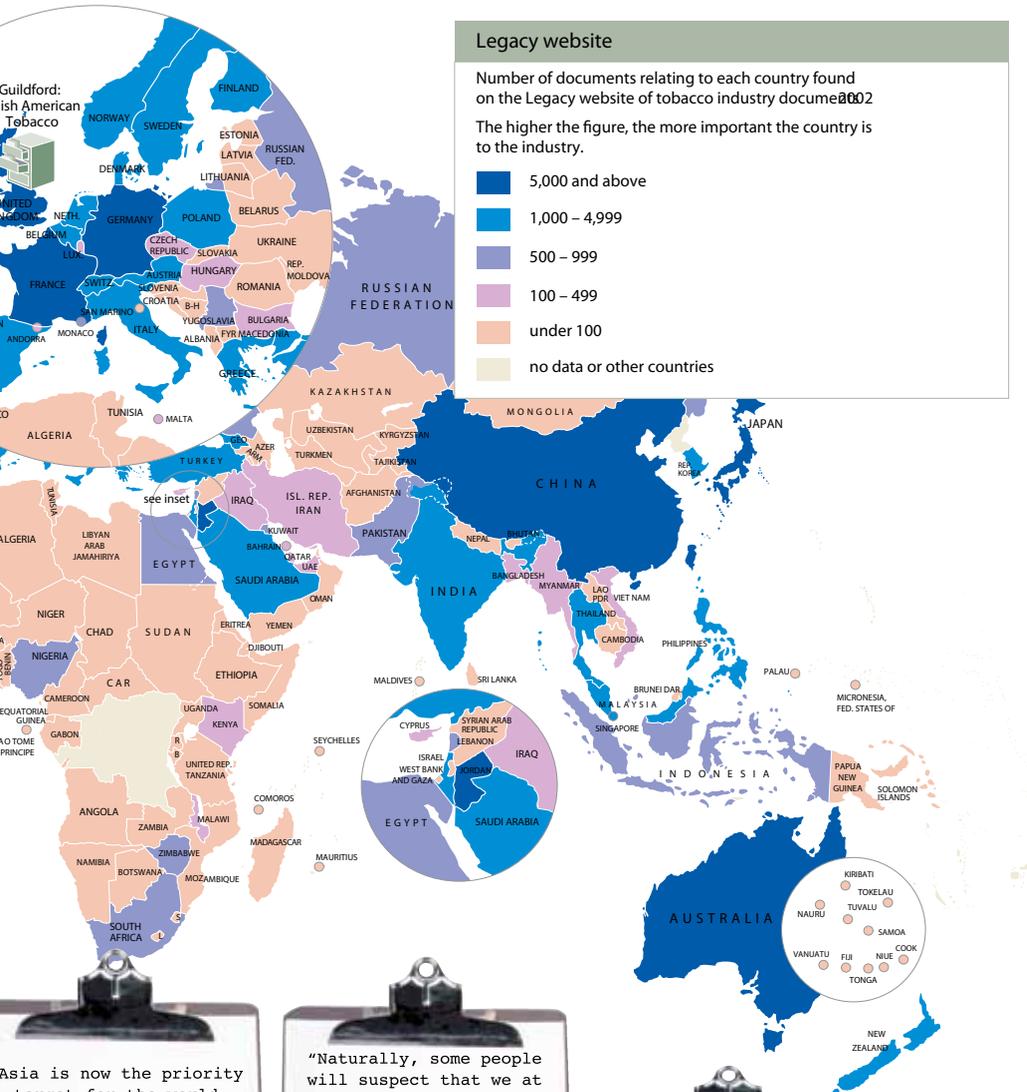


40
million
pages
of once secret
internal tobacco
industry
documents are
now in the public
domain

"Our work in Senegal resulted in a new advertising decree which reversed a total advertising ban."
Philip Morris, 1986

"Work to develop a system by which Philip Morris can measure trends on the issue of Smoking and Islam. Identify Islamic religious leader who oppose interpretations of the Quran which would ban the use of tobacco and encourage support for these leaders."
Philip Morris, 1987

"A law prohibiting tobacco advertising was passed in Ecuador but, after a mobilization of journalists from throughout Latin America and numerous international organizations, it was vetoed by the President."
Philip Morris, 1986



Legacy website

Number of documents relating to each country found on the Legacy website of tobacco industry documents

The higher the figure, the more important the country is to the industry.

- 5,000 and above
- 1,000 - 4,999
- 500 - 999
- 100 - 499
- under 100
- no data or other countries

Asia is now the priority target for the world anti-tobacco movement. We should remember that as U.S. cigarette exports to Asia account for close to 70% of our volume and 97% of our profits... The implications for our business...should this league be successful, are significant."

Philip Morris, 1989

"Naturally, some people will suspect that we at the Tobacco Institute have spent so long fighting the cigarette controversy that we have become a little paranoid. But let me assure you that paranoia is justified. They are out there; they are out to get us."

Tobacco Institute, USA, 1979

"document retention policy."

BAT's description of the policy under which thousands of incriminating documents were destroyed.

Australia, 2002

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Maka tujuh juta dokumen yang terdiri dari 35 juta halaman, membanjiri gudang-gudang milik pengadilan Amerika. Setiap halaman diberi stempel dan nomor kode, yang disahkan pengacara dari pihak industri, untuk menunjukkan keasliannya. Seluruhnya merupakan dokumen yang diterbitkan sebelum tahun 1998. Industri rokok juga diwajibkan untuk terus menyetor dokumen yang terbit setelah 1998 sampai 2008. Namun, dokumen yang diserahkan setelah 1998 (setelah keputusan pengadilan November 1998, yang mewajibkan industri membuka dokumennya kepada publik) cenderung lebih hati-hati, kurang terbuka dan normatif.

Ketujuh raksasa rokok tidak begitu saja pasrah menyerahkan 'harta karun' mereka. Sempat terjadi tarik-ulur yang ketat antara ketujuh raksasa rokok dan kejaksaan Amerika. Lobi-lobi politik penuh intrik kotor ala film *"The Insider"* dan *"Thank You For Smoking"* digelar, hingga akhirnya tercapai kesepakatan formula *master of settlement agreement*. Industri rokok bersedia menyerahkan dokumen internal mereka disertai dana yang cukup besar -- sebagian digunakan untuk program edukasi masyarakat tentang risiko merokok.



Tentu saja industri menuntut sederet persyaratan dan imbal balik. Pemerintah tidak dibolehkan menuntut ketujuh perusahaan rokok tersebut. Gugatan kepada industri rokok hanya boleh diajukan perseorangan, LSM, dan perusahaan swasta.

Industri juga diharuskan membayar US\$ 206 miliar selama 25 tahun masa kesepakatan Tobacco MSA. Dana ini digunakan untuk riset, edukasi konsumen, dan pengembangan fasilitas pengobatan konsumen rokok yang mengalami gangguan kesehatan. Sebuah lembaga, yakni American Legacy Foundation, dibentuk untuk mengelola dana tersebut. Bersamaan dengan itu, lembaga yang sebelumnya menjadi corong industri, antara lain Tobacco Institute, Council for Tobacco Research, dan Center for Indoor Air Research, dibubarkan. Persyaratan yang diajukan industri, American Legacy Foundation tidak dibenarkan melontarkan kritik terhadap industri.

William Godshall, Direktur Eksekutif Smoke Free Pennsylvania, menyebut kesepakatan ini sangat berat sebelah. "Giving 10% to gain eternity," demikian tulis Godshall dalam *British Medical Journal*, 1999.

Walaupun dikritik, tak bisa kita ingkari bahwa dokumen dalam paket formula MSA tadi merupakan harta karun. Para penggiat kampanye pengendalian rokok sedunia mesti melek terhadap fakta-fakta yang diungkap dalam labirin dokumen ini: bagaimana jurus dan siasat industri dalam menutupi fakta, bagaimana mereka merenggut pasar muda, menggelar lobi dengan penguasa, dan lain sebagainya.

Pada awalnya, gunung dokumen penting ini sempat merepotkan para aktivis pengendalian tembakau, sehingga nyaris tak bisa dimanfaatkan. Para pejabat kesehatan, aktivis, juga akademisi, sesak napas di antara dokumen yang menggunung. "Kami dibuat kewalahan," kata Ross Hammond, aktivis Campaign for Tobacco Free Kids, lembaga nirlaba yang berdedikasi menjauhkan anak-anak dari rokok, dalam sebuah percakapan di Washington, Amerika Serikat, tahun 2005.

Tahun 2002, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merilis panduan pertama bertajuk "Tobacco Document Manual". Isinya meliputi penjelasan apa dan bagaimana dokumen ini, cara penggunaannya, dan betapa penting arti dokumen bagi upaya program pengendalian produk tembakau di masa depan. Sejak itulah penggalan dokumen mulai terarah dan intensif. Para

peneliti, aktivis pengendalian dampak rokok, ahli hukum, dan jurnalis dari berbagai negara serius meneliti dokumen ini sampai sekarang.



Seiring dengan kemajuan dunia teknologi informasi, plus revolusi dunia piranti lunak komputer, akses menuju dokumen semakin terbuka. Inventarisasi dokumen dipermudah dengan fasilitas *scanning*, teknik mengemas file dalam bentuk pdf, dan juga koneksi internet yang kian mudah. Bukan cuma WHO, berbagai pihak secara intensif turut terlibat membuat dokumen TOP SECRET ini bisa diakses publik secara *online*.

Salah satu upaya penyusunan dokumen tembakau yang cukup penting adalah proyek pengarsipan dokumen British American Tobacco (BAT). Berbeda dengan dokumen lain yang tersimpan di Minnesota, Amerika Serikat, gunung dokumen BAT secara khusus tersimpan di sebuah gudang di Guilford, Surrey, Inggris.

Pihak BAT, diperkuat barisan pengacara lihai, memainkan beragam manuver demi membatasi akses publik terhadap isi gudang dokumen. Misalnya, mereka membatasi jam buka gudang hanya 6 jam sehari (di Minnesota, gudang dokumen buka 12 jam sehari), membatasi kunjungan hanya dalam grup, mempersulit perizinan, dan menetapkan birokrasi berbelit. Butuh waktu sedikitnya lima bulan sebelum pengacara BAT mengizinkan seorang pemohon memasuki gudang di Guilford. Akses sedikit dilonggarkan ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyampaikan komplain terhadap BAT.

Menyimak kondisi ini, sekelompok aktivis pengendali rokok yang dimotori Universitas California San Fransisco, AS, menggelar Proyek Arsip Guilford. Tujuannya, memuat seluruh dokumen BAT di Guilford dalam situs *online*. "Bukan hal yang gampang. Tidak jarang pengacara BAT mendatangi kami, mengulur waktu pendokumentasian dengan alasan harus melakukan verifikasi keaslian dokumen," demikian tulis pengelola Proyek Guilford dalam situs www.library.ucsf.edu/tobacco.

Empat tahun bekerja keras, melakukan *scanning* lembar demi lembar dokumen, akhirnya pada tahun 2004, Proyek Guilford resmi selesai. Tujuh juta lembar dokumen rahasia industri rokok, sebagian besar milik BAT, bisa diakses publik secara *online*, meskipun ada 181 ribu berkas -berisi puluhan ribu lembar dokumen- yang hilang sebelum sempat dimuat dalam situs *online*. "Kami tidak tahu apa saja isi berkas yang hilang. Bisa jadi yang hilang menyangkut praktek bisnis mereka di negara Anda," kata Duncan Campbell yang juga ikut bergiat dalam ikhtiar membuat dokumen industri rokok bisa diakses publik di seluruh dunia.

Benar, dokumen industri rokok yang kita bicarakan panjang lebar ini terutama menyangkut operasional industri di Amerika dan Eropa. Namun, sepak terjang mereka di Asia, termasuk Indonesia, juga terungkap. Secara gamblang memo-memo internal mereka menuturkan rancangan besar industri rokok menaklukkan pasar dunia.

Sepulang dari Konferensi Kanker Sedunia itu, saya terus terpesona pada dokumen internal industri rokok. Saya mencoba menelusuri perpustakaan online Digital Library for Tobacco Document. Semakin



saya telusuri, semakin terbuka horizon saya akan kedigdayaan dan kebohongan yang disebar industri rokok. Saya juga semakin paham bahwa paparan dokumen internal industri ini merupakan langkah monumental. Sebuah milestone global yang turut mengubah wajah industri rokok dunia. Hampir semua negara kemudian mengatur gerak industri rokok demi kepentingan publik, antara lain mendorong terwujudnya kerangka Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

dokumen yang diterima.

Dana yang sebenarnya tak banyak ini kami gunakan untuk empat bulan riset, bersama Farid Gaban dan Alfian Hamzah (keduanya dari *Kantor Berita Pena Indonesia*). Layar komputer kami telusuri dan menemukan paling tidak ada 3.000 dokumen yang terkait dengan Indonesia, sebagian besar berisi lobi-lobi politik dengan pejabat berbagai instansi, ilmuwan, legislator, wartawan, demi mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan industri. Rincian temuan dokumen ini akan diungkapkan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

3. Kata dan Istilah Kunci

Industri menggunakan istilah teknis yang terkait dengan strategi pasar mereka. Misalnya, perokok muda diistilahkan dengan *young adult smokers* (YAS) dengan berbagai variasi. Gunakan kata-kata kunci seperti :

- Indonesia
- Rising market
- Young adult smokers (YAS)
- Young adult female smokers (YAFS)
- Young adult urban smokers (YAUS)
- Beginner of smokers
- Lobbying strategy
- Scientific controversy
- Legislation
- Smoking Issue
- Chemical hazard
- Addictive
- Confidential strategy
- Health Law
- Urgent Situation



4. Tentukan periode/tahun kira-kira dokumen diluncurkan.
Misalnya, jika mengenai kontroversi FCTC maka kurun waktunya adalah 1995 - 2003. Atau, bahasan tentang RUU Kesehatan 1992 terkait dengan dokumen pada Mei - Oktober 1992.
5. Save, save, save....!
Dokumen hasil pencarian bisa disimpan dalam bentuk pdf atau disimpan dalam fasilitas *bookbag* yang disediakan website.

Selamat menggali dokumen...!

Bab V

Relevansi Dokumen Industri

Benar, dokumen yang saya telusuri bersama Farid Gaban dan Alfian Hamzah itu relatif bisa dibilang sudah *out of date*. Semua korespondensi internal itu dirilis pada dasawarsa 70, 80, dan 90-an. Selusin pejabat eksekutif BAT, Philip Morris Indonesia, GAPPRI/GAPPRINDO, yang saya jumpai menyebut bahwa apa yang ada di dokumen itu adalah masa lalu. Praktik yang sudah kuno dan tidak lagi dijalankan. “Itu semua masa lalu. Kita hidup di masa kini,” begitu kata Deradjat Kusumanegara dari Philip Morris Indonesia, dalam sebuah pertemuan dengan saya dan Alfian Hamzah, tahun 2006. Begitu pula surat jawaban resmi yang kami terima dari tim manajemen PT British American Tobacco (BAT) Indonesia.

Okelah, benar. Secara faktual memang dokumen itu sudah masa lalu. Tapi, bukan berarti nilainya sudah kuno dan tak pantas dipelajari. Justru sebaliknya, dokumen tersebut tetap aktual dan mendapat konfirmasi nyata dari rentetan kejadian belakangan ini.



Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut membantu kita memahami perilaku para juragan rokok di seluruh dunia. Siasat industri dalam beriklan, strategi pemasaran, teknik memupuk anak muda dan perempuan sebagai pasar, dan selap-selip menyembunyikan kebenaran informasi, secara terang-benderang terungkap dalam jutaan memo. Gambar besar ini juga cocok bila kita gunakan untuk menyoroti industri rokok meyasar pasar anak muda di Jakarta, Kudus, Malang, Jember, atau Kediri, tentu dengan berbagai variasi.

Konfirmasi yang nyata dari rangkaian dokumen industri ada pada jejeran spanduk, billboard, poster film, sponsorship konser musik, dan segala sesuatu yang menasar kaum muda. Strategi berderap memangsa kaum muda, seperti tersebar dalam ribuan dokumen, betul-betul terjadi di lapangan (*lihat: "Berderap Memangsa Kaum Muda"*).

Salah satu yang mengejutkan dalam dokumen itu adalah preseden intervensi industri rokok terhadap produk legislasi, yakni intervensi proses pembuatan Rancangan Undnag-Undang Kesehatan Tahun 1992. Proses lobi dan intervensi politik yang dahsyat ini, sayangnya, tidak terdeteksi oleh media dan publik pada saat itu.

Kejadian pada 1992 itu, bagaikan bel yang berdering kencang, hari-hari ini ketika Rapat Paripurna Pengesahan RUU Kesehatan berlangsung di Gedung DPR, tanggal 14-15 September 2009, kembali bergema. Dalam RUU tersebut, yakni pada pasal 113 ayat 2, tercantum bahwa nikotin yang terkandung di dalam rokok merupakan zat adiktif. "Ini kemajuan. Sekian lama kita berjuang untuk mendapat pengakuan bahwa nikotin adalah zat yang bisa menimbulkan kecanduan, baru di RUU ini bisa masuk," kata Kartono Mohamad, salah satu motor jaringan ITCN.

Kegembiraan jaringan pegiat ITCN tak berlangsung lama. Pada saat pengesahan RUU menjadi Undang-Undang Kesehatan, 15 September 2009, ayat penting tersebut raib. Pasal 113 tidak lagi menyebutkan bahwa

nikotin adalah zak adiktif. "Padahal, di naskah yang disampaikan di sidang paripurna, sehari sebelumnya, ayat itu masih ada," kata Kartono, tenaga ahli yang diundang hadir pada Rapat Paripurna DPR. "Mana bisa hilang begitu saja? Prosedurnya, setelah rapat paripurna, sudah ketok palu, maka Sekretariat DPR tinggal mengemasnya dan membawa ke Sekretariat Negara untuk menjadi dokumen negara," kata Kartono.

Situasi pun jadi gonjang-ganjing. Saling tuding berlangsung. Beberapa politikus yang ada di Komisi 9 DPR diduga kuat terlibat, antara lain Ribka Tjiptaning (Fraksi PDI Perjuangan), Maryati Baramuli (Fraksi Golkar), dan Asiyah Salekan (Fraksi Golkar). Pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal Polri juga mengindikasikan adanya pejabat Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penghilangan ayat tersebut.

Gelombang protes pun muncul. Penghilangan ayat, setelah proses sidang paripurna, jelas tak bisa dibenarkan. Dalam di berbagai kesempatan, Ribka menyebut inisiatif mencabut ayat tersebut bersumber dari surat keberatan petani tembakau. "Sebagai bukti bahwa saya menerima aspirasi petani tembakau, maka saya tandatangani draf perubahan ayat tersebut," kata Ribka. Secara prosedural, pembelaan Ribka ini tidak masuk akal karena proses pembahasan sudah final dan RUU telah pula diketok pengesahannya dalam sidang paripurna, 15 September 2009.



Singkat kata, setelah muncul gelombang protes dari berbagai pihak, pada 10 Oktober 2009, ayat yang hilang resmi dikembalikan pada naskah UU Kesehatan 2009. "Kami tetap membawa proses raibnya ayat itu kepada proses hukum. Tapi, sampai sekarang belum ada kemajuan berarti," kata Tubagus Haryo Kirbyanto, pengacara jaringan *tobacco control*. "Pengembalian ayat itu tidak menghilangkan esensi telah terjadi usaha korupsi ayat dalam undang-undang."

Drama korupsi ayat UU Kesehatan 2009 itu tidak berdiri sendiri. Ada konteks yang bisa menjelaskan duduk perkara peristiwa tersebut. Penggelapan ayat nikotin sebagai zat adiktif merupakan konfirmasi telak dari sepak terjang kotor yang selama ini dilakukan industri rokok, seperti



terungkap dalam dokumen internal mereka. Penelusuran dokumen secara jelas menunjukkan bahwa upaya mengintervensi produk legislasi bukan jurus baru. Kejadian yang sama pernah dilakukan, yakni pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan 1992.

Mari kita tengok kutipan surat Dahlia Sardjono, eksekutif BAT Indonesia, kepada Dr. Sharon Boyse, petinggi BAT di kantor pusat di London, Inggris. Dokumen termaksud bernomor kode 304046112, bertanggal 5 Agustus 1992.

Re: Indonesian forthcoming law on health

The Industry had a meeting last Friday to discuss the above mentioned. The Situation is quite urgent as the Ministry of Health tend to publish the legislation for the 19th September, In fact, the legislation will focus on abortion and pharmaceuticals. On the pharmaceutical chapter, the subject analysed will be the medicines using chemical addictives. During that session by one of the member party, nicotine is claimed to be an addictive substance although it does not specifically stated that this claim will appear in the forthcoming law. This claim might strongly influenced the antismoking body to develop view that nicotine is addictive and is definitely refer to tobacco/cigarette market (apply to all kind of cigarette) that cigarette sales will probably be controlled like other addictive substance i.e. drugs. Furthermore, we presume that they will bring this session up to the House of Representative and give sanction into a peace of legislation.

As well as the proposal in relation to ingredients, what are they going to reflect to. Whether it inquires the 'recipe' or 'generic' or other interpretation that we would not wish to disclose.

All chapter of the legislation will be clarify in the Government's Implementary Regulation section. Therefore, it is important to know the Implementary Regulation to clearly understand the exact perceptions of

both chapters. The industry (BAT, Rothmans, Djarum, HM Sampoerna/RJR, Bentoel/Philip Morris and GAPRI/GAPPRINDO) will approach the Government Institutions to have the possibility to influence the context of the said draft law. For lobbying, we are going to use three booklets on smoking and environmental tobacco smoke that we received recently from Millbank (The Science, The Scientific Controversy, Habit or Addiction). However, we would be grateful if you could give us more informations of similar matter that has happened in other countries, for us to be able to use as comparative study.

With regard to this situation, the Cigarette Association (White and Kretek) feel that inviting some key members (two persons) of the parties involved in Commission 9 of the House of Representative by whom the draft law will be executed, to attend our Media Briefing in Bali could be very useful. Your view on this suggestion is much appreciated.

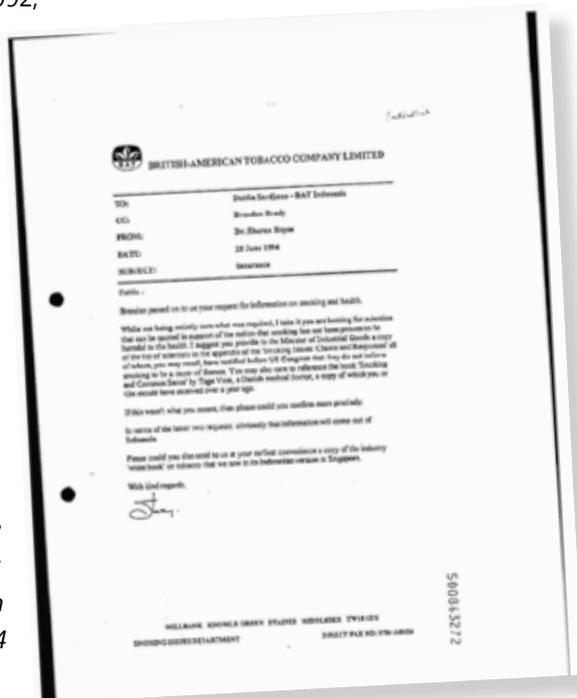
.....

Kami tidak menemukan balasan Dr. Sharon Boyse atas surat Dahlia Sardjono dalam kepastakaan digital dokumen industri tersebut. Namun, pada 24 September 1992,

Dahlia mengirim surat lagi kepada Boyse, yang dengan gembira melaporkan 'kemajuan' yang dicapai terkait isu ayat nikotin sebagai zat adiktif dalam UU Kesehatan 1992. Surat ini berkode dokumen 304044598.

.....

I have a good news for you regarding the draft legislation. It has been signed officially on 17 September chapter 44



disclosed about the safety of using addictive substances without further mentioning any particular substance i.e. nicotine. Thank you for your briefing to some member of parliament the other day in Jakarta. We will not stop here, we'll still have further lobby with Director General of Medicine and Food Control of the Ministry of Health and later to the Minister of Manpower also to Department of Excise, and other party concern with our industry.

.....

Korespondensi Dahlia Sardjono - Sharon Boyse menjelaskan konteks peristiwa korupsi ayat UU Kesehatan 2009. Pengakuan bahwa nikotin adalah zat adiktif sebetulnya bukan hal baru, setiap kemasan rokok menegaskan bahwa nikotin menyebabkan kecanduan dan dampak kesehatan. Situs resmi Philip Morris International juga menegaskan ihwal ini: *nicotine has been identified by public health authorities as addictive substance in tobacco smoke* (www.pmi.com/eng/our_products/whats_in_smoke/pages/whats_in_smoke.aspx).

Persoalan jadi lain jika soal nikotin adiktif ini resmi masuk produk hukum. Rentetan konsekuensinya bisa panjang. Begitu disebut bahwa nikotin merupakan zat adiktif, maka rokok sebagai produk yang terkait harus mengikuti aturan yang berlaku seperti halnya zat adiktif lain seperti minuman beralkohol dan narkoba. Produk semacam ini tak boleh diiklankan dengan gencar dan leluasa. Itulah sebabnya, seperti ditulis Dahlia dalam suratnya kepada Boyse, industri berkepentingan untuk mencegah pasal yang menegaskan nikotin adalah zat adiktif.

Surat Dahlia juga menyebut bahwa industri rokok bersepakat dalam misi mencegah nikotin adiktif masuk ke dalam undang-undang. Mereka adalah BAT, Rothmans, Djarum, HM Sampoerna/RJR, Bentoel/Philip Morris and GAPRI/GAPPRINDO. Jadi, ini



bukan kepentingan satu dua perusahaan semata melainkan kepentingan industri rokok secara menyeluruh.

Sayangnya, Dahlia Sardjono, yang kini mengelola perusahaan IdeaMarcomm, tak mau menanggapi permintaan wawancara yang saya ajukan. Dahlia membenarkan bahwa pada tahun 1990-an dia menjadi karyawan BAT Indonesia. Namun, untuk soal dokumen yang dibahas dalam buku ini, Dahlia tak mau berkomentar. "Ada orang lain yang lebih kompeten menjawab," kata Dahlia dalam surat elektronik kepada saya, pertengahan Juli 2011.

Lalu, bagaimana dengan kasus Ayat 2, Pasal 113, Undang-Undang Kesehatan 2009? Adakah keterlibatan industri dalam penghilangan ayat penting ini?

Dalam berbagai kesempatan, Ribka Tjiptaning yang anggota DPR dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, menyangkal adanya intervensi industri. "Kami dituding menerima ratusan miliar dari industri. Tidak benar itu," kata Ribka dalam sebuah konferensi pers, tak lama setelah kasus ini terungkap.

Sayangnya, industri rokok menolak kami wawancarai terkait skandal ayat hilang ini. Rumor tentang bagi-bagi uang ratusan miliar di balik penghilangan ayat ini, bertebaran. Namun susah dibuktikan kebenarannya. Permintaan tim penulis buku, diwakili oleh Parlindungan Sibuea, mewawancarai pihak industri tidak dilayani, dengan berbagai alasan.

Untuk sementara, kasus penghilangan ayat masih berstatus misteri sampai ada investigasi lebih lanjut untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung Senayan di hari-hari itu. "Sulit untuk mempercayai tidak ada keterlibatan industri dalam kasus ayat hilang dalam Undang-Undang Kesehatan 2009," kata Dr. Kartono Mohamad, motor penggerak Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR). "Soalnya, ada riwayat serupa, yang dibuktikan dalam dokumen, pada tahun 1992, yang mengindikasikan keterlibatan kuat industri." Mengingat kejadian 1992, keterlibatan industri amat layak dicurigai "Tapi, memang sejauh ini hal itu belum bisa dibuktikan. Masih misterius," kata Kartono mengakui.

Kembali pada dokumen TOP SECRET industri, kita perlu menggali

dan mencari tahu. Menelusuri apa saja praktek yang dilakukan industri rokok raksasa dalam ekspansi bisnis mereka yang agresif dan kerap mengabaikan keselamatan publik. Ekspansi yang hanya digerakkan oleh keinginan mencetak untung seperti ditulis Ross Hammond, dari *Campaign for Tobacco Free Kids*, dalam papernya yang berjudul *'Addicted to profit: Big Tobacco's Expanding Global Reach'*. "Industri rokok punya sejarah panjang dalam membohongi publik," kata Hammond.

Pejabat industri rokok multinasional (BAT, Philip Morris, dan lain-lain) boleh saja menyebut bahwa ribuan dokumen ini tidak lagi relevan. "Itu urusan masa lalu. Kami bekerja di masa kini," demikian komentar seorang pejabat BAT Indonesia. Namun, ribuan dokumen ini setidaknya menunjukkan fakta bahwa mereka pernah menjalankan bisnis secara tidak *fair*, di masa lalu. Dan, tak ada seorang pun bisa menjamin bahwa praktik tersebut sudah berakhir, saat ini. Terlebih di negeri dengan penegakan hukum yang loyo, pemerintah yang abai, dan masyarakat yang sebagian besar berpendidikan rendah seperti Indonesia.

Kesimpulan yang solid dari timbunan dokumen *top secret* ini adalah: industri rokok bekerja secara amat sistematis dan terencana dalam menjual keraguan, kontroversi. Mereka memiliki semacam panduan bermain, buku putih, *playbook*, yang diterapkan para pengacara, *lobbyist*, top eksekutif, ilmuwan, dan juga pejabat pemerintah yang berteman dengan industri tembakau. Dalam sebuah laporan berjudul "A Question of Intent", seorang komisioner Food and Drug Administration (FDA), Amerika Serikat, menulis:

Pada dekade 1950 dan 1960, industri rokok punya strategi yang naskahnya ditulis para pengacara. Setiap eksekutif perusahaan rokok, untuk berhadapan dengan publik, harus mempelajari naskah ini dari depan sampai belakang, tak boleh ada penyimpangan. Premis dasar yang digunakan amat sederhana, yakni bahwa merokok belum terbukti benar menjadi penyebab kanker. Belum terbukti, belum terbukti, belum terbukti --ini jurus yang harus diulang secara intensif. Selalu suntikkan kepada publik rasa ragu, menciptakan kontroversi, jangan pernah menyimpang dari garis yang sudah direncanakan. Ini rencana yang sederhana dan manjur.

Jurus menciptakan keraguan bin kontroversial ini memang manjur,

terutama di tengah masyarakat yang gemar mencari rasionalisasi, pembenaran, atas kecanduan yang disandangnya. Penyebab kanker toh bukan hanya rokok, ada ribuan faktor lain. Lagipula, nikotin baru diduga kuat penyebab kanker, belum ada hubungan kausalitas 100 persen. Bukankah udara berasap rokok bukan satu-satunya parameter dalam polusi? Begitu sedikit contoh kontroversi yang senantiasa dihidupkan industri.

Pada kasus Indonesia, jurus menghidupkan kontroversi ini tampak pada dokumen BAT (<http://legacy.library.ucsf.edu/action/document/page?tid=xyg10a99>). Ketika itu, 24 September 1994, sebuah artikel muncul di harian The Jakarta Post. Judulnya, "Smoking Kills About Six People Every Minute, Study Says" yang ditulis Patricia Rooney. Artikel kecil ini sekilas tampak biasa, tak ada yang istimewa.

Bagi Dahlia Sardjono, dari BAT Indonesia, berita itu perkara besar. Dia segera mengirim surat kepada bos besar, yakni Sharon Boyse, di markas besar BAT di London. Pada suratnya, Dahlia menulis, "Silakan membuka artikel terkait yang dimuat di Jakarta Post hari ini. Artikel dengan *headline* mengejutkan selalu datang melalui kantor berita internasional. Kami membutuhkan bantuan Anda untuk mengirim respon secara berimbang. Dengan demikian, kontak atau penulis kita bisa menulis dengan porsi yang sama."

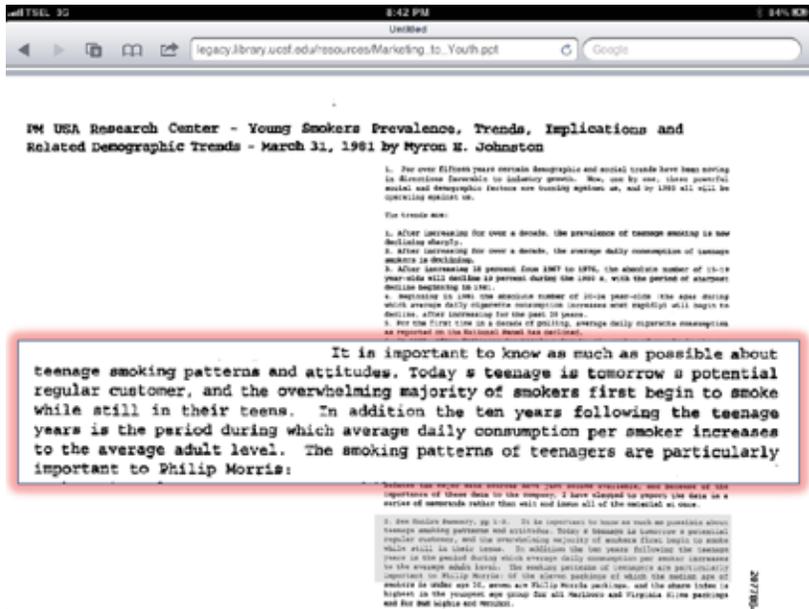
Surat ini menunjukkan betapa BAT berkepentingan menyalakan api keraguan, memberi ruang pada kontroversi. Dahlia meminta nasihat Sharon Boyse untuk segera menggerakkan jaringan, misalnya kolonnis atau ilmuwan, yang ada dalam radar BAT untuk menulis tanggapan dengan porsi yang sama.

Kiat menghidupkan kontroversi ini pula yang digarisbawahi paper berjudul "The Cigarette Controversy". Paper ini ditulis K.M. Cummings, A. Brown, dan R. O'Connor, pada 2007 dalam jurnal *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*. Mereka menulis, "Jika 50 tahun terakhir ini mengajarkan sesuatu pada kita, maka itu adalah bahwa industri rokok tak boleh dipercayai untuk menempatkan urusan kepentingan publik di atas keuntungan mereka. Apa pun yang mereka katakan."

Setelah menyimak hasil penelusuran dokumen industri, saya

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA



berharap publik dan pemerintah terdorong untuk menegakkan peraturan yang komprehensif dan berpihak pada konsumen. "Kita harus memastikan industri rokok berpraktik lebih *fair* di masa kini dan masa mendatang," kata Hakim Sorimuda Pohan.

Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau, yang diusulkan oleh 200 anggota DPR, pada 2007, adalah salah satu ikhtiar memastikan praktik industri bisa lebih fair. Sayangnya, sampai kini RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau masih terkatung-katung tanpa kejelasan.

Berkomplot Memasung Hak Konsumen

Oleh : Alfian Hamzah

**Artikel ini ditulis pada pertengahan 2006*

Tiga bulan kami memelototi komputer, menggali 'harta karun' *online* tentang dokumen tujuh raksasa rokok di dunia. Tercengang kami dibuatnya. Memo-memo itu bercerita tentang sebuah kerja besar. Kerja raksasa industri rokok demi menjadikan dunia terkena epidemi global: kecanduan merokok.

Membaca memo-memo *top secret* ini, saya menjadi paham mengapa jumlah orang yang kecanduan rokok di negara berkembang, terutama Indonesia, terus bergerak naik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut lonjakan konsumsi rokok di Indonesia kurun 1990-an merupakan yang tertinggi di dunia, naik hampir 50 persen, sedangkan di negara-negara maju populasi perokok cenderung menurun. Secara khusus, lembaga itu menyatakan tujuh dari sepuluh pria berumur di atas 15 tahun di Indonesia rutin mengisap rokok, utamanya mereka yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta.

foto : Alfian Hamzah

Benar, dokumen ini sudah zadul, zaman dulu, kebanyakan merekam aktivitas industri rokok kurun 1960 hingga paroh awal tahun 2000-an. Gunungan dokumen ini juga tidak secara khusus menyoroti kiprah bisnis industri rokok di Indonesia. Tapi, dari merekalah kita bisa memahami perilaku global perusahaan rokok --tentang cara-cara mereka mencengkeram dunia begitu kokoh dan mendulang untung tentunya.

Selama tiga bulan, kami mengumpulkan dan menelisik 28.000 lebih dokumen internal BAT Indonesia di perpustakaan digital *University of California*, San Francisco, Amerika Serikat. Saat yang sama, kami juga mengakses *Legacy Tobacco Documents Library*, situs publik di Amerika yang memuat dokumen internal raksasa tembakau seperti Philip Morris, RJ Reynolds, Lorillard, dan Brown and Williamson.

Ini pekerjaan relatif susah, sebenarnya. Dalam beberapa hal, kami nyaris sesak nafas dibuatnya, tersedak data yang menggunung. Tak ada panduan cara mudah menelusuri dokumen, terutama dalam hal kata-kata kunci untuk mesin pencari, semuanya serba coba-coba, *trial and error*. Belum lagi karena ada begitu banyak dokumen, tujuh juta totalnya, sementara di sisi lain kualitas jaringan internet kerap sukar diandalkan. Tidak jarang, satu berkas dokumen mengandung 200-500 halaman yang harus dibaca perlahan lantaran mungkin saja ada 'mutiara' tersimpan di antara ratusan halaman itu.

Kami mulai menelusuri situs dua perpustakaan *online* itu dengan memasukkan sejumlah kata kunci, antara lain "*ingredients*", "*smoking issue*", "*chemical hazard*", "*additives*", "*Indonesia*" dan "*legislation*". Asumsi kami, kata-kata kunci ini bisa menjadi awal menyibak sepek terjang industri rokok di bidang periklanan, produksi, pemasaran, penjualan dan riset ilmiah atas sejumlah produk tembakau. Belakangan, kami mencoba kata kunci istilah teknis industri rokok seperti YAS (young adult smokers), YAUS (young adult urban smokers), YAUS (young adult female smokers), dan YAMS (young adult male smokers).

Betul saja, perlahan-lahan, lembar demi lembar labirin gua harta karun dokumen terungkap. Berikut ini beberapa poin yang sangat layak diketahui publik.

Kongsi Industri Rokok

Mereka saling bersaing ketat, jika perlu saling sikut. Tapi, untuk beberapa kondisi krusial, industri rokok tidak segan berkongsi. Mereka merapatkan barisan demi tujuan bersama: mengukuhkan posisi pasar.

Pada 1992, Departemen Kesehatan menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang akan menempatkan perusahaan rokok layaknya perusahaan makanan dan minuman; wajib mengumumkan komposisi dan bahan yang digunakan, di setiap kemasan rokok -- lengkap dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. "Demi melindungi konsumen dari mengkonsumsi substansi adiktif yang tak memenuhi standar kesehatan," begitu tulis draft tersebut.

Draft Rancangan Undang-Undang Kesehatan 1992 ini mengekor aturan serupa di sejumlah negara, seperti Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Thailand. Kendati model pengawasan dan jenis informasi yang harus dipublikasikan berbeda di setiap negara, tapi kewajiban ini tetap menjadi mimpi buruk perusahaan rokok. Andrew Yeung, salah seorang eksekutif BAT di Thailand, menyebut regulasi semacam ini berpotensi menghadirkan "dampak memukul bagi bisnis kita (*sic*) untuk waktu yang lama."

Kecemasan itu bisa dimengerti. Publikasi akan melapangkan jalan pemerintah memonitor seluruh zat kimia yang digunakan produsen rokok. Sementara itu, di sisi lain, tak satupun perusahaan rokok yang bisa menjamin komposisi setiap produk mereka memenuhi standar kesehatan. "Dalam ukuran yang paling sederhana dan jamak diyakini orang, rokok pemicu sejumlah penyakit serius," kata Adrian Payne, salah seorang petinggi British American Tobacco di London, dalam sebuah makalahnya berjudul "*Smoking & Cigarette Technology*." "Tidak ada itu yang namanya rokok aman."

Mereka dapat membayangkan apa yang bakal mendera sekiranya pemerintah menemukan satu saja di antara zat kimia yang digunakan --apalagi jika itu aroma buatan yang membuat rokok laris, misalnya-- tidak lolos standar kesehatan. Mereka dapat diharuskan untuk menarik produk dari pasar atau mengganti formula. Ini bisa berakibat pada kempisnya keuntungan bisnis. Kiamat kecil.



Bayang-bayang kecemasan seperti itu jelas terbaca dalam korespondensi BAT Indonesia, produsen Dunhill, Lucky Strike, Ardath, Commfil, dan Kansas, dengan induk perusahaan di London. Sebuah surat bertanggal 5 Agustus 1992, satu bulan menjelang keluarnya Undang-Undang Kesehatan, merekam itu semua:

Situasi saat ini sangat genting mengingat Departemen Kesehatan ingin menerbitkan legislasi itu pada 19 September ... Dalam bab tentang farmasi, salah satu pokok bahasannya adalah obat-obatan yang menggunakan substansi adiktif.

Saat pembahasan, seorang anggota parlemen menyatakan nikotin adalah substansi adiktif kendati tak merinci apakah klaim itu akan tercantum dalam undang-undang yang baru nanti. Klaim ini bakal sangat mendorong lembaga anti-merokok untuk berpikiran bahwa nikotin adalah zat adiktif dan ini pasti bakal merujuk ke pasar tembakau/rokok (berlaku untuk seluruh jenis rokok) sehingga penjualan rokok kemungkinan akan dikontrol pemerintah seperti substansi adiktif lainnya, termasuk obat-obatan.

Inisiatif Departemen Kesehatan tersebut menempatkan produsen rokok untuk merapatkan barisan dan melupakan seluruh perbedaan mereka. Di Thailand, Philip Morris dan BAT berkongsi untuk menggajal aturan itu dengan menyorong Kedutaan Amerika, Inggris, dan Jepang sekaligus. Momen yang sama mendekatkan industri rokok di Indonesia. Produsen rokok putih sekelas BAT dan Philip Morris bergabung dengan raksasa kretek seperti HM Sampoerna, Gudang Garam dan Bentoel. "Industri rokok," kata Dahlia Sardjono dalam sebuah suratnya ke London menyebut Rothmans, Djarum, HM Sampoerna, RJR, Bentoel, Philip Morris and GAPPRI/GAPPRINDO, "akan mendekati pemerintah guna mencari peluang untuk mempengaruhi draft legislasi itu."

Sehari kemudian, dari London Sharon Boyse merinci kiat melobi pemerintah. Berikut ini penggalan wejangan Boyse jika pemerintah menghendaki setiap perusahaan rokok membuka bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan:

Beri mereka tawaran sebuah daftar yang berisi semua jenis bahan yang diizinkan penggunaannya di sejumlah negara ... Negara yang punya daftar seperti itu adalah Inggris, Jerman, Perancis, Belgia dan Swiss. Setiap perusahaan rokok kemudian akan memberi jaminan ke pemerintah bahwa semua bahan yang mereka gunakan ada dalam daftar itu. Pendekatan ini telah kita coba di New Zealand dan di Thailand ... Sebelum memberikan jaminan seperti itu ke pemerintah, kita perlu mengecek lagi ke Divisi Riset dan Pengembangan (BAT Co.) di Souththompson adakah semua rokok kita di Indonesia sejalan dengan daftar itu.

Dalam surat yang sama, Boyse menyarankan BAT Indonesia menawarkan kepada pemerintah metode pengawasan ala Amerika jika tawaran pertama mentah. Di Amerika, katanya, setiap perusahaan rokok menunjuk dan menyerahkan daftar lengkap bahan mereka ke kantor hukum tertentu. Daftar dari setiap perusahaan itu kemudian digabungkan sehingga terciptalah daftar keseluruhan bahan yang digunakan industri rokok. "Semoga saja sampai di sini pemerintah Indonesia puas. Jika ini gagal, mereka mungkin akan meminta daftar komposisi rokok per perusahaan, atau lebih parah, per merek. Lobi atas dua pilihan di awal tadi karenanya sangat penting," katanya.

Sampai di sini, sukar rasanya bagi kita menerima fakta yang terungkap

dalam korespondensi ini: kongsi rokok hendak mengajari pemerintah mana yang boleh diatur dan mana yang tidak -- meski mereka sendiri tak dapat menjamin keamanan setiap produk komersil mereka. Tapi begitulah kenyataannya. Ironinya: mereka berhasil dengan lobi itu.

Dalam sebuah surat ke London pada 24 September 1992, Dahlia menulis:

Saya punya satu kabar baik untuk Anda terkait draft Undang-Undang Kesehatan tempo hari. Draft itu sudah resmi disahkan ... Pasal 14 berisi aturan pengamanan zat-zat adiktif tanpa menyebut jenis tertentu seperti nikotin. Terima kasih telah memberi pengarahan ke sejumlah anggota parlemen tempo hari di Jakarta. Kami tak akan berhenti di sini, kami masih harus melobi lagi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kementerian Kesehatan ... Direktorat Bea dan Cukai dan pihak-pihak lain yang terkait dengan keberadaan industri kita.

Tak hanya soal intervensi RUU Kesehatan 1992, penelusuran dokumen menunjukkan lobi kongsi rokok di Indonesia merambah jangkauan yang lebih jauh. Dalam urusan cukai misalnya, lobi mereka menembus dinding Istana dan menyusup ke Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Berbagai departemen terkait, dari Departemen Perindustrian hingga Direktorat Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan RI, telah pula digarap.



BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYIKRIN KEISDAYAKAN INDONESIA KEKORUPSI INDONESIA



Hanya saja, untuk urusan cukai ini, kongsi industri terpecah dalam berbagai agenda.

Salah satu pemicunya adalah keputusan menteri keuangan mengganti sistem cukai per batang menjadi cukai berdasarkan volume produksi dan harga eceran yang ditetapkan

pemerintah per 1 April 1999. Dengan aturan baru ini, sebagian perusahaan rokok, terutama produsen kretek, mendapat keluasaan karena hanya membayar cukai dalam jumlah relatif kecil bahkan berkurang dari era Soeharto. Sebaliknya, sistem cukai ini menjadikan perusahaan seperti BAT Indonesia harus menanggung cukai dalam jumlah yang membengkak. Dalam sebuah surat, Direktur BAT Indonesia, Mark Jennings, menyebut, jika tak diubah sistem cukai ini berpotensi menghancurkan "80 tahun investasi" perusahaan di Indonesia:

"Kami perlu enam bulan untuk membalik rezim cukai ini," kata Mark Jennings dalam sebuah surat elektronik ke sejawatnya di Jerman dan Inggris pada 10 Oktober 1999. Dalam surat itu, dia menyebut keberhasilan itu tak lain berkat bantuan "banyak teman" di Kantor Menteri Ekonomi dan Keuangan. Dia menyebut kontak yang paling dia andalkan adalah Dipo Alam, staf Ahli Menko Perekonomian kala itu. "Mereka lah yang belakangan sukses memaksakan revisi sistem cukai itu ke Direkrotat Jenderal Bea & Cukai," katanya seraya memadankan Bea & Cukai sebagai Tochtergesellschaft (anak perusahaan) Gudang Garam.

Dalam surat yang sama, Jenning menuliskan bahwa Dipo Alam ingin mengunjungi pabrik salah satu laboratorium pengujian kadar tar dan nikotin BAT di Jerman dan satu laboratorium pemerintah. "Tentu saja kita yang membayar semua biaya perjalanannya," katanya. Dipo Alam menolak diwawancarai soal ini. Dalam sebuah percakapan singkat di telepon, pertengahan 2006, dia menyebut "telah banyak lupa" soal aktivitasnya semasa menjabat staf ahli Menteri Koordinator Perekonomian.

Dokumen BAT menyebutkan konteks di balik keinginan Dipo Alam berkunjung ke Jerman: munculnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Merokok tepat sepekan sebelum Jennings menuliskan surat elektroniknya. "Selain merevisi regulasi cukai," kata Jennings dalam suratnya, "pemerintah juga mengeluarkan aturan baru perlindungan merokok, mengharuskan produsen rokok kretek mengurangi kadar tar dan nikotin hingga separuhnya, menjadi 20 mg tar dan 1,5 mg nikotin. Sekarang mereka yang dalam posisi defensif."

Soal aturan baru pembatasan tar dan nikotin, dia bilang pemerintah Indonesia "goblok", sama sekali tak tahu cara mengukur tar dan nikotin. "Rekan kita ... staf Menko Perekonomian yang paling senior berharap bisa mengunjungi salah satu laboratorium BAT dan jika memungkinkan laboratorium pemerintah untuk melihat langsung proses pengukuran tar dan nikotin," katanya. "Tentu saja kita yang menanggung semua biaya perjalanannya."

Ilmuwan Bayaran

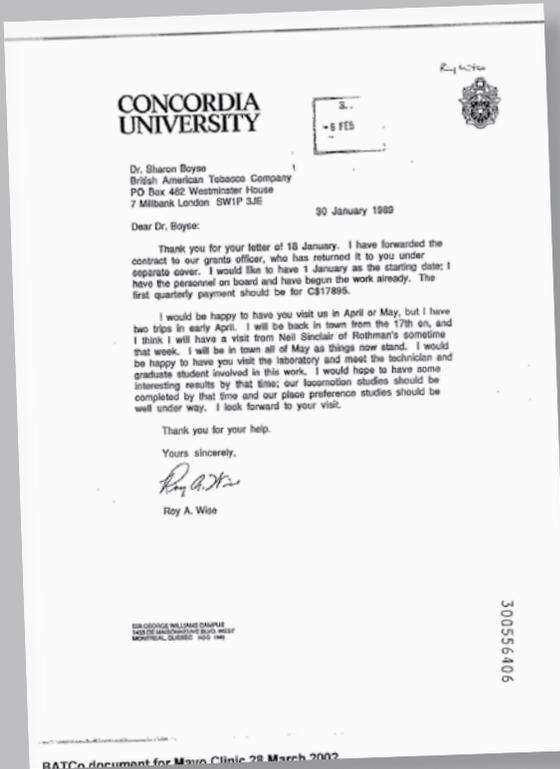
Kongsi rokok juga menunjukkan agresivitasnya dalam mendekati media dan pejabat publik lewat aneka forum diskusi dan *briefing*. Pendekatan makin intensif jika pemerintah dan parlemen sedang menggodok peraturan mengenai rokok.

Salah satu yang terekam dalam dokumen BAT Indonesia adalah *Media Briefing* di Surabaya pada Februari 1995. Acara ini hadir para pejabat dinas kesehatan di Jawa Timur, kalangan dokter, dan wartawan dari berbagai media nasional. Ikut berbicara dalam seminar itu adalah Christopher Proctor, bekas staf riset BAT, yang dalam seminar itu disebut sebagai "ilmuwan independen" dari London.

Dalam sebuah dokumen, Dahlia Sardjono menyebut forum ini pas untuk "mengontrol" semua pihak yang hadir, termasuk pejabat pemerintah. "Pemerintah Indonesia," katanya, "masih terbuka terhadap semua informasi, dan mereka bahkan mendukung usaha industri rokok untuk mendudukkan sejumlah persoalan terkait merokok pada tempatnya, mereka ingin mendengar sudut pandangan lain, so ini kesempatan bagi kita untuk mencuci otak mereka."

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYERONG RAKSASA KEBOHONGAN BAT INDONESIA



Di luar forum “cuci otak” seperti itu, penelusuran dokumen juga menunjukkan BAT Indonesia pada paruh terakhir 1980-an pernah merekrut setidaknya tiga ilmuwan dari Indonesia untuk menggiring persepsi publik bahwa asap rokok di ruang publik seperti restoran, perkantoran dan mall (Environment Tobacco Smoke/ETS) relatif tak seberapa bahayanya ketimbang polusi asap kendaraan. Rekrutmen itu, seperti disebutkan dalam dokumen perusahaan, adalah bagian dari Scientific Consultansi Group on Environment Tobacco Smoke, kelompok kerja yang digagas bersama

Philip Morris, R.J. Reynolds dan Rothmans sejak 1989.

Kelompok kerja ini hadir dengan satu misi: menjadikan persoalan ETS kontroversi meski telah banyak bukti yang menyatakan asap rokok mengandung 4.000 lebih senyawa kimia dan 250 di antaranya masuk kategori berbahaya. Dan untuk itu, mereka perlu “ilmuwan independen”, yang punya kompetensi dan mau “memberikan pandangan saintifik” – menyuarkan kepentingan industri rokok bahwa belum ada ada bukti konklusif seputar bahaya asap rokok di ruang publik.

Izhar M. Fihir, seorang dosen Ilmu Kesehatan Kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Indonesia, termasuk di antara tiga ilmuwan lingkungan yang pernah direkrut oleh Covington & Burling, sebuah kantor hukum yang menjadi perantara industri rokok dengan 20 “ilmuwan independen” di Asia. “Keterlibatan saya sangat sedikit ... Sepenuhnya profesional,” kata Izhar dalam dua kali wawancara di Jakarta,

pertengahan 2006. Dokumen menunjukkan Izhar dua kali ikut seminar Indoor Air Quality di Manila, Filipina dan di Seoul, Korea Selatan. Dalam dua even yang sepenuhnya dibiayai "industri rokok" itu, Izhar berbagi ilmu dan pengalaman seputar kualitas udara di Asia.

Menurut Izhar, dia tak pernah berhubungan langsung dengan BAT Indonesia. Kontak, katanya, hanya melalui staf Covington & Burling. Salah satunya yang dia ingat adalah Christopher J. Proctor, seorang pengacara "muda", yang sebelumnya pernah bekerja sebagai staf divisi riset BAT di Southtompson, London.

Izhar juga mengatakan Covington memintanya mengorganisir sebuah seminar bertajuk Indoor Air Quality di Hotel Hilton Jakarta pada 1991. Sebagai konsultan, Izhar mendapat bayaran US\$ 300 per jam. Seminar itu, katanya dihadiri pakar dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ahli kesehatan lingkungan, ahli tata bangunan hingga dokter paru-paru. "Ini seminar gratis. BAT yang membayai semuanya," katanya.

Salinan makalah yang terekam dalam dokumen internal BAT Indonesia mengisyaratkan ini pola penyebarluasan opini yang digemari perusahaan. Hingga akhir acara, tak ada satupun kata yang terlontar seputar bahaya asap rokok di ruangan publik. Pembahasan kualitas udara di seminar itu lebih banyak berpusat pada jenis-jenis polusi udara yang jamak diketahui orang seperti asap kendaraan.

Orang juga tak pernah tahu, seminar gratis itu sepenuhnya dibiayai BAT. Pengetahuan puluhan dokter dan ilmuwan yang hadir di situ tentang penyelenggara seminar hanya sebatas apa yang tertulis di belasan makalah: Universitas Indonesia, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perdagangan Inggris dan British Council.

Setelah itu, Izhar berhenti menjadi konsultan industri rokok. Saat dia mundur, seorang koleganya di Universitas Indonesia tampil menggantikan. Dokumen menunjukkan ada dua dosen Universitas Indonesia (Dr. I. Soedirman dan Dr. H. Kusnopranto) yang namanya ikut tercantum dalam daftar rahasia anggota Indoor Air International, sebuah organisasi yang kelahirannya dibiayai Philip Morris dan BAT pada 1990-an.

Belakangan, ikhtiar industri tembakau mengubur masalah bahaya perokok pasif dari perhatian publik jadi berantakan. Pada Januari 1993,

lembaga perlindungan lingkungan di Amerika, Environment Protection Agency, mendeklarasikan ETS sebagai *human carcinogen*, penyebab kanker yang sama beracunnya dengan asbestos dan substansi mematikan lainnya. Secara spesifik, EPA menyebut asap tembakau di ruang publik berisiko serius dan fatal bagi kalangan non perokok, khususnya anak-anak. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, pengadilan di sebuah distrik di North Carolina, berdasarkan sebuah gugugatan hukum dari industri tembakau, menganulir laporan EPA tersebut. Pengadilan meyakini tidak ada argumen ilmiah yang cukup pada keputusan sebelumnya dan EPA gagal mendemonstrasikan adanya hubungan yang kuat antara perokok pasif dan aneka penyakit.

Industri rokok bisa bernafas lega setelahnya. Tapi cuma sebentar. Beberapa bulan kemudian, keputusan itu ditinjau kembali. EPA menang setelah menunjukkan ke pengadilan betapa BAT telah menyewa sejumlah ilmuwan untuk memanipulasi opini publik seputar perokok pasif.

"Saya sudah curiga sejak awal," kata Izhar mengingat kembali awal-awal keterlibatannya dalam "kegiatan ilmiah" di Seoul, Manila dan Jakarta. Izhar menegaskan kepada tim kami, "Semua ini akal-akalan perusahaan rokok. Asap rokok itu carcinogen, sama beracunnya dengan asbestos. Titik."

PT BAT Indonesia mengambil sikap yang berseberangan hingga kini. "Pandangan kami terhadap isu perokok pasif," kata Melanie Kridaman, wakil perusahaan PT BAT dalam wawancara tertulis pada pertengahan 2006, "adalah bahwa kami mendukung upaya-upaya untuk mengakomodasi hak perokok dewasa untuk merokok di dalam ruangan, contohnya dalam wujud pemisahan areal merokok, penyediaan ruang merokok dan ventilasi yang memadai."

Berderap Memangsa Kaum Muda

Oleh : Mardiyah Chamim

(artikel ini ditulis pada pertengahan 2006)

Iklan rokok selalu tampil beda. "Keren," begitu komentar yang sering terdengar. Senyum simpul tak jarang muncul seusai iklan rokok tayang di layar kaca. "Jadi inget masa lalu," kata seorang kawan saat menonton iklan tentang sekelompok anak kos yang menyiasati kantong kering dengan makan di warung hanya dengan menu nasi dan kuah.

"Dengan dukungan dana yang hampir tak terbatas, mereka memang jago bermain di wilayah *insight*," kata Ridwan Hasan, pakar komunikasi yang pernah menjadi direktur kreatif sebuah biro iklan di Jakarta. *Insight*, dalam istilah periklanan, adalah sebuah area yang dengan tepat menyentuh sisi psikologis konsumen. Begitu menonton iklan, konsumen akan langsung merasa berasosiasi dengan subyek dan topik dalam tayangan iklan. "Si konsumen akan berkata dalam hati: itu *gue* banget," kata Ridwan dalam sebuah percakapan dengan penulis.

Efek yang muncul tidak main-main. Citra produk yang diiklankan akan tertanam cukup dalam. Pesan, terutama merek, yang disampaikan rokok bersangkutan akan melekat dalam ingatan konsumen. Dan boleh jadi: dengan loyal dia akan mengkonsumsi rokok tersebut.

Tema iklan rokok amat beragam. Mulai dari petualangan di alam bebas, prestasi musik, keberhasilan di dunia olah raga, sukses bergaul, gampang menggaet pacar, santun bermasyarakat, kangen kampung halaman saat jauh di rantau, bahkan juga tema-tema pemberontakan (*rebellious*). Semua subyek ini sangat khas anak muda.

Tentu saja pesan 'ayo terus ngebul' dikemas dalam format yang keren. Kasus Bentoel Remaja, diluncurkan PT Bentoel pada tahun 70-an, yang diprotes ulama dan aktivis kesehatan, menjadi pelajaran berharga bagi kaum industri. Mereka harus menyampaikan iklan dengan canggih dan cerdas.

Masih lekat dalam ingatan kita sebuah iklan *rebellious* versi LA Light, produksi PT Djarum, yang menuai masalah lantaran menampilkan kalimat, "Hati-Hati, Polisi Lagi Tidur. Enjoy Aja". Kepolisian merasa tersinggung dengan kalimat ini dan berencana mengajukan somasi kepada PT Djarum dan biro iklannya. "Jelas iklan ini menghina," kata Inspektur Jenderal Sisno Adiwino, yang pada 2006 menjabat sebagai Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian RI.

Ketersinggungan Pak Polisi mungkin benar, mungkin juga reaksi yang berlebihan. Tapi pesan iklan itu memang kena betul dengan realitas di lapangan. Dan, anak muda suka dengan sindiran tajam kepada otoritas resmi seperti yang diusung iklan ini.

Jimmy, seorang narasumber di biro iklan ternama yang tak mau disebut identitasnya, membenarkan bahwa anak muda menjadi pusat bidikan produsen rokok. "Klien selalu minta supaya iklan difokuskan untuk menggaet konsumen muda," kata Jimmy yang bekerja di sebuah biro iklan asing ternama. Resminya, menurut Jimmy, perusahaan rokok membidik target utama mereka yang berusia 18-30 tahun. Tapi, kenyataannya, iklan juga hampir selalu tepat mengena buat bocah dan remaja di bawah 18 tahun. "Klien kami sama sekali tak keberatan dengan itu. Mungkin malah bersyukur," kata Jimmy sambil tertawa.



Dalam berbagai pertemuan, perusahaan rokok yang menjadi klien Jimmy selalu menekankan bahwa perokok muda sangat krusial bagi mereka. Anak-anak muda yang sedang bergelut mencari identitas inilah yang akan terus menjaga keberlanjutan bisnis industri rokok sampai puluhan tahun mendatang. "Ini karena rokok sangat terkait dengan loyalitas," kata Jimmy. Sangatlah susah untuk menawarkan rokok merek baru kepada seorang pecandu rokok. Oleh karena itu, konsumen muda -yang masih coba-coba merokok- harus digarap dan dipupuk agar tumbuh subur.

Bagaimana cara memupuk konsumen muda? Dokumen industri rokok yang diserahkan kepada pengadilan Amerika Serikat (lihat *Tentang Harta Karun*) banyak berbicara tentang ihwal ini.

Anak muda merupakan subyek paling menarik bagi industri rokok. Berbagai istilah khusus dilekatkan untuk pangsa pasar yang manis ini, antara lain YAUS (*young adult urban smokers*), *young adult female smokers* (YAFS), dan YAMS (*young adult male smokers*). Tak sedikit penelitian didedikasikan industri rokok untuk menggaet darah muda.

Berikut ini adalah kutipan dari memo internal berjudul "*Young adult smokers lifestyle and attitudes*", dengan nomer kode dokumen: 6800696085/6094. Ini merupakan riset penting yang jadi panduan industri rokok untuk membidik kaum muda.

Riset digelar oleh Kenyon & Eckhard Advertising, biro iklan di Chicago, AS, yang disewa Brown & Williamson Tobacco Corp pada tahun 1974. Hasil penelitian di berbagai kota di Amerika ini, meskipun telah berumur 33 tahun, tampaknya masih dijadikan landasan utama strategi pemasaran rokok. Hasilnya, seperti kita saksikan saat ini, jumlah dan prosentase perokok belia di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, terus membumbung.

Mari kita simak beberapa penggalan hasil riset Kenyon & Eckhard :

Kebanyakan pemuda yang kami wawancara mulai merokok sebelum usia 10 tahun, biasanya dengan mencuri-curi sebatang rokok milik orang tua. Kebiasaan ini berlangsung terus selama bertahun-tahun. Tahap berikutnya dari proses ini tampaknya berlangsung saat mereka duduk di sekolah menengah atas.

.....

Alasan lain anak-anak muda merokok adalah tekanan dari teman-teman sebaya. Berulang kali, responden mengisahkan fakta pada saat itu, sebagian besar teman mereka adalah perokok, dan jika ada yang tidak merokok maka dia akan menjadi bahan olokan. Tak sedikit yang pernah dijuluki 'banci' lantaran tidak merokok. Dalam kaitan ini, menarik untuk dicatat bahwa merokok adalah perilaku grup, sedikit sekali yang ingat pada saat itu (di masa sekolah) pernah merokok saat sendirian.

Ada dua alasan lain, menurut riset Kenyon & Eckhard, yang mendorong anak muda merokok. Jiwa-jiwa muda ini, seperti kita tahu, sangat ingin memberontak dari pagar yang ditentukan orang tua. Niat memberontak bakal lebih kuat bila ayah-ibu melarang si anak merokok, padahal mereka sendiri juga perokok berat. Faktor lain adalah, remaja tanggung ingin sekali merasa terkait dengan aktivitas fisik yang menantang. Agaknya, berani merokok merupakan tantangan tersendiri buat mereka.

Dari dokumen tersebut tampak bahwa kalangan industri sangat ingin memahami perilaku anak muda. Keinginan untuk tampak lebih dewasa, keinginan untuk diterima di kalangan teman sebaya, impian untuk terkait dengan aktivitas yang menantang, merupakan pintu masuk paling penting yang kemudian dimanfaatkan untuk membidik kalangan muda.

Hasilnya, kini kita menyaksikan iklan rokok yang memajang gagahnya pendaki gunung, pemanjat tebing tangguh, petualang di rimba raya, juga penggemar olah raga ekstrim *bungee jumping*. Simak pula iklan-iklan yang menyajikan kehidupan kolektif anak muda dengan kalimat pemikat (*tagline*) "Asyiknya ramai-ramai" dan "Nggak ada loe nggak rame".

Belakangan, riset juga digelar di wilayah timur. Pasar memang sedang tumbuh pesat lagi menggiurkan di sini, di Asia. Kepadatan populasi di wilayah ini sungguh menggoda, India dengan 1 miliar penduduk, Indonesia punya 220 juta penduduk, dan Cina yang disesaki hampir 2 miliar penduduk. Ini tambang emas bagi industri rokok, terlebih karena remaja Asia sangat mudah dipengaruhi media Barat.

Serangkaian riset pun digelar dengan fokus anak muda Asia. Riset dilakukan di Tokyo, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, juga

Indonesia. Salah satu riset mereka menunjukkan, anak muda saat ini tak lagi repot dengan batasan wilayah dan budaya. Kebebasan, keinginan untuk independen secara finansial, adalah benang merah utama anak muda di seluruh dunia.

Strategi pemasaran untuk anak muda pun mesti disusun dengan jiwa dan semangat globalisasi. Dunia yang datar tanpa batas. Anak-anak muda Asia bercelesna gombong, gemar menyantap makanan cepat saji, dan berdandan ala bintang pop Hollywood. Kira-kira begitulah garis besar riset gaya hidup anak muda yang digelar Philip Morris di Hong Kong, tahun 1989.

Musik, dalam hal ini, merupakan pintu masuk paling strategis yang harus dirangkul. Philip Morris International, dalam sebuah dokumen, menyebutkan bahwa anak muda zaman sekarang lebih bereaksi terhadap musik dan gambar ketimbang terhadap media cetak. Musik adalah bahasa mereka, sumber ide dan tren anak muda.

Grey Pacific, penanggung jawab kampanye rokok Kent di kawasan Asia, secara khusus juga mengulas kekuatan musik. Dalam dokumen BAT International nomor kode 5000010132, dia menyebut bahwa musik memiliki pesona universal dan berpengaruh kuat untuk menuju target perokok. Maka, di rentang era 80-an, industri rokok mulai bergerak intensif menjadi sponsor puluhan acara musik. Misalnya, acara 'Marlboro Music Hour' di Cina yang menyuguhkan lagu-lagu papan atas demi menggenjot citra produk rokok. Acara serupa dengan berbagai variasi juga disponsori Philip Morris di berbagai kota di Asia.

Situasi di Indonesia juga tak berbeda. Pada awal 80-an, industri rokok -lokal dan internasional- seperti berlomba menggeber acara musik. Agresifitas iklan di masa ini seperti menandai kebangkitan industri rokok di Indonesia. "Yang tadinya cuma beriklan secara tradisional, sekarang harus memasuki dunia periklanan modern yang agresif," kata Ninu, narasumber yang juga minta disembunyikan identitasnya, profesional hubungan masyarakat yang kerap menjalankan program *below the line* -kampanye di luar iklan-produk rokok.

Salah satu bentuk kampanye *below the line* yang jadi favorit perusahaan rokok, menurut Ninu, adalah penyelenggaraan festival musik.

"Awal 80-an saya mengkoordinir Djarum Rock Festival," kata Ninu. Festival ini bergerak dari kota ke kota, menjaring calon musisi muda yang tak jarang adalah siswa sekolah menengah yang belum lagi mencapai usia 18 tahun.

Festival musik tak akan meriah jika berhenti pada hanya sebatas festival. "Kami membagikan rokok gratis bagi pengunjung," kata Ninu. Tidak sekadar gratis. Rokok dibagikan oleh gadis-gadis cantik dengan rok mini. Padahal, menawarkan rokok gratis pada orang dewasa pun tidak etis. "Aktivitas bagi-bagi rokok untuk anak-anak seperti ini nyaris tak pernah dipersoalkan. Tidak disorot kamera televisi, tidak juga diperhatikan oleh media cetak. Praktis kami bergerak merdeka," kata Ninu.

Bagi anak muda, acara festival musik tentu-lah sangat memikat. Betapa tidak, di sana ada musik, teman sehoobi, persaingan meraih hadiah, gadis cantik, plus rokok gratis. Racikan yang tepat untuk mengundang para remaja tanggung memasuki dunia adiksi nikotin.

Tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai hari ini, musik masih menjadi andalan industri rokok. PT Djarum dan PT HM Sampoerna, misalnya,

sudah ribuan kali menggelar konser musik dengan melibatkan artis dan musisi dari berbagai belahan dunia. Akhir tahun lalu, umpamanya, musisi jazz George Benson menggelar konser di Jakarta dengan sponsor PT Djarum. Aktivis pengendalian rokok di Amerika Serikat menanggapi konser Benson dengan petisi *online*, "Tell George Not To Spread Tobacco Addiction in Indonesia". Tapi petisi tinggal petisi. Konser George Benson tetap dipadati



BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENGGOKOH KEBESARAN INDONESIA ROKOK INDONESIA

pengunjung plus papan dan spanduk Djarum yang berkibar. Ajang bergengsi Java Jazz, Maret 2007, juga tidak lepas dari peran sponsor rokok – kali ini Dji Sam Soe, produk HM Sampoerna.

Aneka kompetisi kreatif di kalangan anak muda juga tak luput dibidik perusahaan rokok. Djarum LA Light, contohnya, baru-baru ini menjadi sponsor festival band indie yang sebagian besar pesertanya adalah murid SMP dan SMA.

Selain musik, ada lagi pintu strategis yang juga dimanfaatkan industri rokok: olah raga. Philip Morris Asia menegaskan dalam sebuah dokumen, "Olah raga adalah arena terbaik untuk menarik perhatian, memberi contoh, dan mempengaruhi target kita." Pada kenyataannya, sokongan industri rokok terhadap olah raga memang tak terbantahkan. Penyair Taufik Ismail bahkan menyebut para penyelenggara acara olah raga di negeri ini telah takluk di kaki pengusaha rokok.

Taufik tidak berlebihan. PT Gudang Garam, misalnya, menjadi tulang punggung operasional Persatuan Sepak Bola Kediri, di Kediri, Jawa Timur. PT Djarum juga penyokong utama klub bulutangkis di Kudus, Jawa Tengah.



Berbagai kompetisi sepak bola bahkan diberi nama produk sponsor, umpamanya Liga Djarum dan Copa Dji Sam Soe. Pendeknya, nyaris semua acara olah raga di seluruh pojok negeri ini disponsori oleh pabrik rokok.

Benar, tak cuma musik dan olah raga. Masih ada sederet pintu strategis lain yang dipegang industri rokok demi memasuki dunia kaum muda. Sederet kunci itu adalah dunia fashion, hiburan, dan tak lupa arena balap motor yang identik dengan Lucky Strike.

Nah, dengan memegang sederet kunci utama, industri rokok berderap maju merangsek jutaan pecandu baru. Kaum muda, target pasar potensial, pun telah diraih dengan pergerakan dahsyat. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pada 2001, jumlah perokok belia usia 5-9 tahun hanya 0,5 persen dari populasi. Tapi, pada 2004 sudah melonjak 1,8 persen. "Naik hampir lima ratus persen," kata Hakim Sorimuda Pohan, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hasil riset terbaru, Global Youth Tobacco Survey (GYTS) yang digelar Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2006, juga menunjukkan peningkatan perokok belia. Indonesia memiliki 24,5 persen buyung dan 2,3 persen upik (usia 13-15 tahun) yang perokok. Sebagian anak, 3,2 persen, bahkan sudah masuk tahap kecanduan.

Tentu kualitas generasi masa depan dipertaruhkan. "Risiko terkena berbagai penyakit saat tumbuh dewasa telah menanti mereka," kata Tjandra Yoga Aditama, ahli paru dari Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta. Berbagai jenis kanker, terutama pada esofagus dan paru, adalah risiko yang tak bisa dianggap enteng. Terungkap pula dalam survei Kenyon & Eckhard, perokok remaja sudah mengalami problem kesehatan, misalnya kesulitan bernapas panjang yang mempengaruhi berbagai aktivitas olah raga seperti berenang dan berlari.

Penelitian terpadu Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada juga menghasilkan gambaran yang tak kalah seram. Pada tahun 2000, anak-anak baru merokok pada usia 12 tahun. Lima tahun kemudian, pada 2005, perokok belia diketahui mengawali debut berisiko ini pada usia tujuh tahun. Populasi anak yang jadi perokok pun bukan main, di kota besar mencapai 30-40 persen dari populasi. "Sangat memprihatinkan," kata Tubagus Rachmat Sentika, dokter ahli anak yang pernah menjabat Deputy Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Secara keseluruhan, jumlah konsumen rokok juga meningkat pesat. Ini tampak dari pertumbuhan jumlah rokok yang diproduksi. Sepanjang tahun 2001 tercatat produksi rokok nasional mencapai 182 miliar batang. Kini, tahun 2007, target produksi rokok diperkirakan ada di kisaran 220-224 miliar batang. Jika seluruh rokok itu dibagikan kepada setiap penduduk Indonesia, yang sekitar 220 juta jiwa, maka setiap orang akan mendapatkan minimal seribu batang rokok.

Hakim Sorimuda Pohan sangat merisaukan kenaikan jumlah perokok muda. "Terutama karena rokok menjadi pintu bagi kecanduan lain yang lebih serius di kalangan anak muda," kata Hakim. Riset yang dilakukan Damayanti, ahli kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, membuktikan bahwa kecanduan rokok menggiring anak muda pada kecanduan narkoba. Data juga menunjukkan, pecandu narkoba -terutama dengan jarum suntik- di negeri ini adalah penyumbang utama pergerakan penularan HIV/AIDS. "Ini yang harus kita cegah sebisa mungkin," kata Hakim.

Terkait dengan itu, Hakim bersama 224 anggota Dewan -antara lain Marzuki Darusman, Ribka Tjiptaning, dan Slamet Effendi Yusuf- mendesak DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan segera dimasukkan dalam agenda Program Legislatif Nasional.

Pembatasan iklan secara total, langsung dan tidak langsung, termasuk dalam usulan yang diajukan dalam RUU tersebut. Poin ini boleh jadi akan mendapat tentangan dari berbagai pihak. Terlebih karena industri rokok menempati peringkat kedua terbesar pemasang iklan di media cetak dan elektronik. Berdasar data AC Nielsen, pada 2006, industri rokok membelanjakan Rp 1,6 triliun untuk iklan -setingkat di bawah iklan industri telekomunikasi yang mencapai Rp 1,9 triliun.

Pelarangan total sebenarnya bukan pendekatan baru. Langkah ini telah diterapkan berbagai negara, termasuk Thailand. Tekanan internasional juga telah memaksa kalangan industri untuk lebih santun beriklan. Tahun 2001, tiga produsen rokok raksasa, yakni British American Tobacco, Philip Morris, dan Japan Tobacco, sepakat membuat patokan pemasaran International Tobacco Marketing Standard, yang isinya antara lain, tidak beriklan secara masif, menghentikan sponsorship kegiatan olah raga, tidak menggunakan selebritis untuk iklan, dan tidak beriklan yang

bertendensi mendorong anak-anak untuk merokok. Kesepakatan ini mestinya berlaku internasional, seperti halnya kesepakatan industri susu formula untuk tidak memaksa ibu berpaling dari air susu ibu (ASI).

Philip Morris sempat mematuhi sebagian kesepakatan tadi di Indonesia. Setahun setelah kesepakatan 2001, tak ada lagi iklan Marlboro di layar kaca kita. Tapi, kepatuhan yang sepintas itu kembali mentah lagi setelah Philip Morris membeli 40 persen saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna. Produk-produk Sampoerna, antara lain A-Mild dan Dji Sam Soe, tetap diiklankan bebas merdeka di segala jenis media. BAT Internasional dan Japan Tobacco, yang tadinya berjanji turut mengawasi polah tingkah Philip Morris, juga tidak berbuat apa-apa.

Walhasil, dengan situasi di atas, bisa disimpulkan bahwa kesepakatan etika pemasaran internasional tidak dijalankan di sini. "Itu namanya industri rokok melecehkan Indonesia," kata Hakim. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kesepakatan internasional tadi bersifat sukarela, tanpa sanksi mengikat.

Pada sisi lain, kalangan industri menegaskan bahwa mereka sangat setuju pelarangan rokok bagi anak-anak. "Saya sendiri juga tidak mau anak saya merokok," kata Deradjat Kusumanegara, Manajer Urusan Cukai dan Peraturan Pemerintah PT Sampoerna. Dia mengakui bisa saja terjadi penyimpangan di lapangan, misalnya dengan menawari rokok gratis pada anak-anak. Padahal, "Jangankan pada anak-anak, menawarkan rokok gratis pada orang dewasa juga mestinya tidak boleh," kata Deradjat ketika berkunjung ke Koran Tempo, Februari 2007.

Soal strategi beriklan, sejauh ini memang belum ada peraturan komprehensif yang ketat membatasi strategi periklanan rokok. Jadi, pihak industri tak bisa sepenuhnya disalahkan. "Kami produk legal, berhak beriklan," kata Muhaimin Moeftie, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia. Jalan keluarnya, menurut Muhaimin, pemerintah harus sesegera mungkin menetapkan peraturan periklanan rokok. "Supaya semuanya jelas."

Suara pihak industri sepertinya sangat suportif terhadap pembentukan regulasi yang ketat. Mereka seolah tak sabar menunggu datangnya regulasi yang membatasi agresivitas beriklan. Tapi, apakah

benar demikian? "Tentu saja. Kami mendukung sepenuhnya regulasi ini," kata Moeftie dan Ismanu Soemiran. Entahlah, tak ada jaminan seratus persen untuk ucapan kedua petinggi industri rokok ini.

Yang jelas, seperti dikisahkan Hakim, regulasi produk tembakau di negeri ini seperti berjalan di tempat. Nyaris tak ada peraturan yang membatasi gerak industri. "Mereka seperti mendapatkan surga di sini," katanya. Tak ada pembatasan iklan, tak ada sanksi bagi yang menjual rokok kepada bocah ingusan, dan kawasan bebas rokok pun hanya sebatas basa-basi.

Patut kita catat, Indonesia pun menjadi satu-satunya negara di Asia yang tidak meratifikasi kerangka kerja internasional pengendalian tembakau (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC). "Di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, FCTC sempat mau diteken. Tapi gagal karena lobi industri," kata Hakim. Pemberlakuan FCTC konon dikhawatirkan bakal mengganggu keberlangsungan industri.

Berhubung FCTC mendapat tentangan keras, Hakim dan kawan-kawan lantas mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan. Tapi upaya ini pun tidak berjalan mulus. Sudah sejak tahun lalu rancangan diajukan, tetapi sampai sekarang belum juga dibahas secara resmi. Hakim menduga, kalangan industri melakukan lobi dengan penguasa dan anggota parlemen untuk mengulur-ulur pembahasan RUU ini. Sampai kini pun RUU ini masih terombang-ambing, menanti jadwal pembahasan. "RUU ini dianggap tidak prioritas oleh Badan Legislatif DPR."

Agaknya, para petinggi parlemen perlu mendengar jeritan delegasi anak-anak Jakarta yang menghadap DPR bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak, bulan Juli 2011 lalu. "Seharusnya rokok dijual mahal sehingga anak-anak tidak mampu membeli," kata Alfianita Fitri Ananda, siswi Madrasah Tsanawiyah 4 Jakarta, salah satu delegasi anak yang ikut serta menghadap DPR. Arist Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, juga menyerukan hal serupa. "Lindungi anak-anak dari peredaran rokok," katanya, "Negara untung dari cukai rokok. Tapi, jutaan anak dikorbankan."

Kemunafikan dan Mitos di Balik Kedigdayaan Industri Rokok

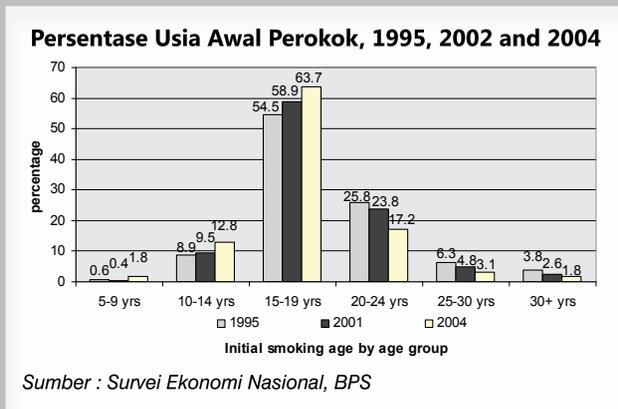
Oleh Farid Gaban
(artikel ini ditulis pada pertengahan 2007)

Mereka bercengkerama siang itu, di kantin luar dekat sebuah sekolah menengah umum di Jakarta. Tiga remaja pria dan dua teman perempuan mereka -- dua remaja pria di antaranya mengepulkan asap rokok.

"Saya sudah merokok sejak kelas tiga SMP," kata Andi, siswa SMU kelas II. "Saya baru setahun mengikuti Andi," kata Budi, teman sekelasnya. "Melihat dia merokok nampak *macho* dan nikmat." Seperti rekan-rekan seusianya, keduanya mengaku suka musik dan menikmati konser band besar yang disponsori sebuah pabrik rokok.

Jumlah perokok remaja di Indonesia, seperti Andi dan Budi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan jumlah perokok belia usia 5-9 tahun, selama periode 2001-2004, dari 0,4 persen - 1,8 persen. "Meningkat hampir lima kali lipat," ujar Hakim Sarimuda Pohan, seorang anggota

DPR Republik Indonesia yang peduli dampak ekonomi dan kesehatan dari merokok.



Komisi Nasional Perlindungan Anak memperkuat data itu. Riset lembaga ini mengungkapkan, 90 persen remaja dipengaruhi oleh iklan rokok yang terutama disiarkan televisi terutama pada petang hari (*prime time*). "Negara diun-

tungkan oleh cukai rokok, tapi jutaan anak dikorbankan," kata Arist Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Tak hanya beriklan di televisi dengan berbagai bujukan yang kian merasuk, industri rokok juga mensponsori aneka pertandingan olahraga dan konser musik yang diminati kaum belia.

Tren mengkhawatirkan itu mengilhami Hakim dan sejumlah anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang baru yang diharapkan bisa membatasi dampak merokok, terutama di kalangan orang muda. Pada Februari 2007, Hakim dan kawan-kawan sudah melakukan presentasi awal, dan pada pertengahan Agustus 2007, parlemen akan mulai membahas rancangan undang-undang pembatasan rokok yang diusulkan oleh 220 anggota DPR itu.

Undang-undang baru diharapkan akan membatasi, jika tidak melarang sama sekali, perusahaan rokok beriklan di media massa atau mendanai kegiatan yang melibatkan anak muda. Aturan baru itu juga menuntut kenaikan cukai (pajak) rokok sampai 60 persen untuk memperkecil peluang orang membeli rokok serta mengusulkan penggalakan riset medis tentang dampak merokok terhadap kesehatan.

Tapi, upaya para anggota DPR ini diperkirakan akan menemukan perlawanan keras dari kalangan industri rokok. Sejumlah pasal dalam

undang-undang yang diusulkan meliputi beberapa poin dalam Konvensi Pembatasan Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control*) yang dikeluarkan WHO, Badan Kesehatan Dunia. Indonesia adalah satu-satunya negeri di Asia yang tidak meratifikasi Konvensi tersebut, dan industri rokok akan berjuang keras untuk menjamin Indonesia akan tetap begitu.

Sebuah investigasi yang kami lakukan menunjukkan perusahaan rokok di Indonesia memakai banyak kiat di masa lalu untuk mematahkan kontrol terhadap tembakau dengan cara merangkul para *opinion maker*, baik di lingkungan akademis maupun medis, di samping para wartawan. Kiat seperti ini sudah dilakukan puluhan tahun di Amerika. (Lihat *Kisah Dokumen Top Secret*)



Peraturan tentang pembatasan rokok sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, namun sejauh ini tidak berjalan efektif. Pada 1999, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 81/1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Tata cara iklan produk rokok di media cetak maupun televisi mulai diatur melalui Peraturan Pemerintah 38/2000. Tiga tahun kemudian peraturan ini direvisi menjadi Peraturan Pemerintah 19/2003 yang antara lain berisi keharusan pabrik rokok mencantumkan peringatan pada kemasan produk. Hakim Sarimuda Pohan memandang tiga peraturan itu "kurang kuat" untuk bisa membatasi penyebaran rokok, terutama di kalangan remaja.

Namun, para penyokong undang-undang baru nampaknya tidak hanya akan berhadapan dengan industri rokok, melainkan juga dari sejumlah departemen yang khawatir pembatasan industri rokok akan menyusutkan lapangan kerja, perolehan negara dari pajak dan tersendatnya investasi.

Indonesia memiliki industri rokok terbesar di kawasan Asia Tenggara, mempekerjakan ratusan ribu orang dan mendatangkan triliunan rupiah

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

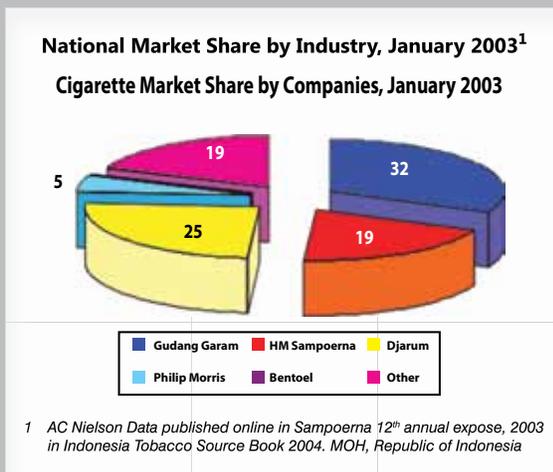
MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI ROKOK DI INDONESIA

pendapatan. Para pendukung pabrik rokok mengklaim industri ini merupakan sumber lapangan kerja yang penting di tengah tingginya angka pengangguran.

"Industri rokok memainkan peran penting dalam ekonomi nasional," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris belum lama ini. Ada 600.000 orang yang bekerja secara langsung di 3.217 perusahaan rokok. Ismanu Soemiran, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, punya klaim lebih fantastis. "Ada 10 juta orang yang bekerja di sektor ini, langsung ataupun tidak langsung," katanya.

Sektor industri rokok juga menyumbang pendapatan signifikan pada negara lewat cukai. Tahun lalu industri ini menyumbang cukai Rp 38,5 triliun, dan tahun ini diharapkan meningkat menjadi Rp 42 triliun, atau 5,5 persen dari total anggaran pendapatan negara tahun 2007 yang Rp 763 triliun.

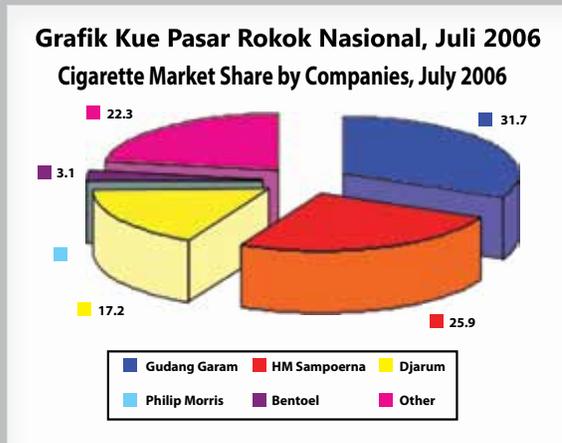
Manisnya bisnis tembakau juga dinikmati sektor lain, termasuk industri media. Belanja iklan industri rokok, menurut AC Nielsen pada 2006, mencapai Rp 1,6 triliun, terbesar setelah belanja iklan sektor telekomunikasi (Rp 1,9 triliun).



Rokok tentu saja merupakan sumber kekayaan besar bagi pemilik pabrik. Hanya ada dua keluarga Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi Majalah *Forbes* tahun ini, dan keduanya dari industri rokok. Keluarga Rachman Halim, pemilik Gudang Garam, ada di urutan 538 dengan aset US\$ 1,9 miliar, dan

Keluarga Budi Hartono, pemilik Djarum, ada di urutan 664 dengan aset US\$ 1,5 miliar.

Profesor Mike Daube, veteran pejuang anti-rokok berkaliber internasional, memprediksi akan ada langkah serius pabrik rokok untuk melindungi bisnis mereka di Indonesia. "Pabrik rokok akan mengklaim kehilangan kebebasan berekspresi lewat media akibat pembatasan iklan dan mereka akan mengatakan banyak pertandingan olahraga dan konser musik akan punah tanpa sponsor mereka," kata Daube seperti dikutip *The Asia Times Online*. "Tapi, pengalaman kami di seluruh dunia menunjukkan itu semua tidak benar. Argumen itu yang sudah gagal di seluruh dunia."



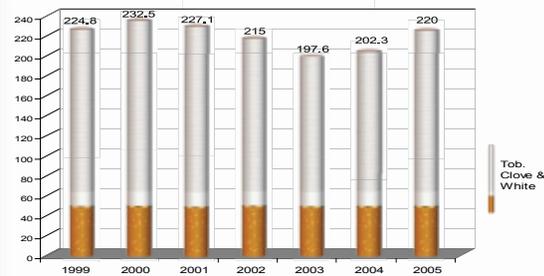
Ismanu yang mewakili industri rokok sendiri sudah mengatakan khawatir jika cukai rokok dinaikkan. Dia mengatakan dengan cukai rata-rata 31,5 persen saja pihak industri "terpaksa" menjual rokok sampai 30 persen di bawah harga banderol. Jika cukai dinaikkan lagi, Ismanu khawatir industri akan terpukul. Harga rokok yang tinggi pun akan membuat "konsumen berpaling mencari rokok palsu". Dan sebagaimana pernah dilansir Menteri Perindustrian Fahmi Idris, rokok *illegal* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan Rp 6-7 triliun per tahun.

Namun, Hakim Sorimuda menilai pihak industri berlebihan. "Tidak ada riwayat konsumsi rokok turun hanya karena regulasi," katanya. Pengendalian rokok yang superketat di negaralain pun hanya sanggup menurunkan satu persen jumlah perokok setiap tahun. Dan fakta menunjukkan bahwa produksi rokok di Indonesia terus meroket termasuk pada tahun-tahun ketika cukai dinaikkan, tentu ini berkat agresivitas periklanan dan pemasaran. Jadi, kata Hakim, "Adalah mitos jika industri mengatakan terpukul regulasi."

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYINGKATKAN KEBERSAMAAN INDONESIA MENYINGKATKAN INDONESIA

Total produksi rokok mesin (miliar batang) di Indonesia 1999-2005²



2 <http://www.wartaekonomi.com/indikator.asp?aid=8208&cid=25>

Pajak rokok di Indonesia memang cenderung naik. Pada 1 Maret lalu, pajak rokok dinaikkan tujuh persen, dan kenaikan sekitar Rp 7 per batang lagi, pada Juli 2007.

Namun dibandingkan dengan negara lain,

rokok di Indonesia tetap sangat murah dan tariff cukainya relatif kecil. Australia, Malaysia, Thailand dan Singapura mengenakan cukai rokok mulai dari 70 persen dan terus meningkat. Tarif cukai rokok Indonesia

yang tertinggi hanya 40 persen. Bahkan dengan kenaikan tahun inipun, harga eceran rokok di Indonesia hanya seperlima harga di negara jiran.

Itulah yang antara lain menjelaskan mengapa konsumsi rokok terus meningkat di Indonesia. Pada 1969, setiap perokok di Indonesia mengkonsumsi 469 batang per tahun. Angka itu kini meningkat tiga kali lipat. Tingkat kematian dari penyakit yang berkaitan dengan rokok dilaporkan mencapai 50 persen, dengan kanker dan serangan jantung merupakan pembunuh utama.

Menurut riset terakhir yang dibiayai WHO dan American Cancer Society, sekitar 70 persen lelaki Indonesia merokok. Kabar baiknya, hanya tiga persen perempuan merokok, terutama karena budaya Indonesia yang umumnya mengidentikkan perokok perempuan dengan prostitusi. Itu tak membuat industri rokok berhenti menjadikan perempuan sebagai sasaran, memasarkan rokok sama dengan orgasme, yang pada

Total Produksi Rokok Kretek (miliar batang) Indonesia 1999-2005³



3 *ibid*

Sumber : Warta Ekonomi

kenyataannya bisa merusak organ reproduktif.

Tapi, Indonesia adalah negeri dengan kontrol rokok paling longgar di Asia Tenggara. Aktivis kesehatan yang peduli pada dampak tembakau relatif sedikit. Belum lama lalu, mereka gagal menuntut agar *sponsorship* program televisi oleh perusahaan rokok -- termasuk dalam segmen berita -- dikategorikan sebagai iklan tersamar dan karenanya harus dilarang. Suara aktivis kesehatan anti-rokok juga terbenam oleh rimba *billboard* iklan rokok yang mendominasi panorama kota-kota besar Indonesia. Peraturan baru yang melarang ditampilkannya gambar rokok atau orang sedang merokok hanya membuat biro iklan rokok makin kreatif.

Perusahaan rokok Djarum misalnya kini tengah gencar mempromosikan rokok dengan gambar cangkir cappuccino yang bentuknya memanjang mirip rokok. Hampir semua pabrik rokok secara sengaja mengkaitkan rokok dengan citra keperkasaaan seksual, petualangan di alam dan kelelahan sejati. "Pria Sejati", "Selera Pemberani" dan "Pria Punya Selera" merupakan beberapa slogan yang paling populer.

Sementara itu, pembatasan merokok di ruang publik yang peraturannya diperkenalkan belum lama ini di Jakarta tidak nampak efektif. Para perokok berkilah bahwa polusi asap truk, mobil dan bus milik pemerintah lebih berbahaya ketimbang asap rokok dan semestinya diurus dulu. Pencantuman peringatan bahaya merokok di kemasan produk relatif kecil dan bersifat verbal, berbeda dengan kemasan rokok Thailand yang wajib mencantumkan potret visual betapa buruk penderitaan para perokok.



Walaupun penjualan rokok kepada anak-anak dilarang, peraturan ini jarang ditegakkan secara konsisten. Pemandangan anak-anak sekolah merokok di jalanan adalah pemandangan yang umum. Di beberapa kota Jawa Timur, salah satu pusat industri rokok di Indonesia, rokok tanpa cukai dijual murah di pinggir jalan, Rp 3.000 per bungkus berisi 12 batang – hanya separuh harga rokok bermerk. Padahal, pencegahan merokok pada usia dini merupakan kunci penting. Para ilmuwan telah menemukan bahwa satu batang rokok pertama yang dihisap oleh seseorang memberikan “efek pencetus ketergantungan” yang membuat mereka berpotensi menjadi perokok selama masa kurun waktu tiga tahun atau lebih.

“Selama ini kita mengetahui bahwa proses dari pengalaman menghisap satu batang rokok pertama sampai menjadi seorang perokok dapat melalui waktu selama beberapa tahun,” kata Jennifer Fidler dari University College London, seperti dilansir *Reuters*, Maret 2007. “Namun untuk pertama kalinya kini kami menemukan bukti kerentanan terhadap ketergantungan nikotin yang dapat memakan waktu beberapa tahun lamanya.”

Fidler menganalisa dampak dari menghisap rokok pertama terhadap lebih dari dua ribu anak dalam kisaran umur 11 hingga 16 tahun selama lima tahun berturut-turut. Dari 260 anak yang memiliki pengalaman menghisap rokok pertama mereka pada usia 11 tahun, 18 persen diantaranya telah menjadi perokok berat pada saat mereka mencapai usia 14. Tapi hanya tujuh persen dari anak usia kelompok 11 tahun yang tidak pernah mempunyai pengalaman merokok sama sekali yang menjadi perokok berat selang tiga tahun kemudian. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pertama menjadi faktor penentu utama bahwa seseorang akan menjadi seorang perokok berat di kemudian hari,” kata Fidler yang melaporkan penemuannya dalam jurnal *Tobacco Control* yang terbit Maret ini. “Penelitian ini merupakan kunci utama untuk mengembangkan upaya mencegah para remaja mempunyai keinginan memulai mencoba-coba merokok untuk pertama kalinya,” kata Jean King dari Lembaga Penelitian Kanker di Inggris.

Rokok juga memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Sepanjang tahun 2006, produksi rokok diperkirakan mencapai 225 miliar batang, dan sebagian besar diserap oleh orang miskin. “Pendapatan utama

industri rokok pada kenyataannya datang dari kalangan miskin," kata Hakim. Menurut data BPS pada 2001, orang kaya hanya membelanjakan 7,5 persen pendapatan mereka untuk rokok. Belanja rokok di kalangan miskin lebih tinggi, mencapai 9,1 persen dari pendapatan mereka.

Hakim menekankan bahwa orang miskin cenderung mengorbankan kebutuhan gizi, termasuk beras, susu dan daging, demi mencandu rokok. Pada 1999, orang miskin menghabiskan 28 persen pendapatan mereka untuk nutrisi utama. Angka ini terus merosot menjadi 19 persen empat tahun kemudian. Tapi, orang miskin justru cenderung meningkatkan belanja untuk rokok, dari 8 persen pada 1999 menjadi 13 persen pada 2003. "Itulah mengapa kualitas kesehatan orang miskin terus merosot," kata Hakim. "Kami juga melihat ada peningkatan di kalangan miskin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok."

Indonesian Forum on Parliamentarians for Population and Development (IFPPD) mengungkapkan pula kaitan rokok dan kemiskinan. "Dua dari tiga ayah di Indonesia adalah perokok," kata Sri Utari Setyawati, Sekretaris Jenderal IFPPD. Dengan keluarga termiskin di Indonesia mencapai 19 juta, ada 12 juta kepala rumahtangga miskin yang menjadi



BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYIKRIN KEJADYAN INDIOSYTIKOKO INDIOSIA

perokok. "Katakan mereka merokok 10 batang sehari dan harga rokok mencapai Rp 500 per batang," kata Sri. "Keluarga miskin ini menghabiskan Rp 23 triliun untuk rokok, sama dengan uang yang bisa dipakai untuk membeli 3,4 miliar kg beras."

Bagi kalangan miskin, rokok dapat dibeli satu per satu. Salah satu cara mengurangi konsumsi rokok di kalangan miskin, menurut Hakim, adalah dengan mengatur agar rokok hanya boleh dibeli dalam bungkus, dengan harga yang lebih mahal.

Dengan berbagai dampak yang mengerikan, tak heran jika perusahaan rokok Indonesia enggan diprotret sebagai penyebar racun dan pembunuh masyarakat. Mereka mencoba membalikkan citranya melalui berbagai kampanye yang menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggungjawab besar secara sosial. Belakangan ini mereka bahkan memotret diri sebagai perusahaan yang cinta lingkungan. Sampoerna, pabrik rokok terbesar



kedua di Indonesia, yang kini dimiliki Phillip Morris, misalnya, belum lama ini menyebarkan papan peringatan agar orang tidak membuang sampah sembarangan. Cara lain adalah membiayai lembaga pendidikan dan beasiswa, sebuah praktek yang dikategorikan *illegal* di banyak negara lain jika perusahaan memakai nama yang bisa dikaitkan dengan produk rokok.

Sampoerna juga melakukan kampanye mendekati media massa, salah satu *opinion maker*. Perusahaan ini menyelenggarakan "Anugerah Adiwarta Sampoerna", sebuah penghargaan jurnalistik tahunan bagi para wartawan.

Untuk menunjukkan citra bertanggungjawab secara sosial, sebuah pabrik rokok bahkan secara hipokrit mensponsori kampanye anti-narkotika, sementara banyak ahli kesehatan mengatakan nikotin merupakan pintu masuk ke arah kecanduan narkotika.

Profesor Daube mengatakan salah satu taktik yang sering digunakan oleh industri rokok di masa lalu memang merekrut para wartawan ekonomi-bisnis untuk menulis berita yang membesarkan dampak kontrol tembakau terhadap kesehatan industri rokok dan para dokter yang menolak bukti medis ancaman rokok.

"Rokok membunuh separo perokok. Dan bertanggungjawab atas 10 persen kematian di dunia," kata Daube. "Industri akan mengklaim mereka punya hak untuk beriklan karena tak ada bukti ilmiah bahwa iklan mendorong orang mulai merokok dan bahwa produk mereka legal. Koran dan majalah akan protes karena takut kehilangan perolehan iklan. Pengelola olahraga akan mengatakan pertandingan akan berhenti. Kita telah mendengar argumen seperti itu sebelumnya dan semuanya sudah dibantah."

Di Australia, Thailand dan negeri lain, keterlibatan profesional medis dan kesehatan dalam kampanye anti-rokok sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya rokok dan dalam menurunkan jumlah perokok. Namun, di Indonesia, lebih dari 30 persen dokter adalah perokok dan bagi perusahaan rokok tak ada promosi lebih baik untuk konsumsi rokok dari dokter yang mencandu rokok.

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYINGKAT KEBIDAYAAN INDUSTRI ROKOK DI INDONESIA

Bab VI

Hampanan Bukti di Lapangan

Dokumen rahasia industri tembakau menunjukkan sepak terjang industri rokok di Indonesia. Meskipun disangkal, buktinya bertebaran.

Jutaan dokumen industri tembakau internasional membuka celah bagi siapapun untuk mengintip sepak terjang perusahaan rokok dunia yang selama ini dirahasiakan: siasat mereka menembus pasar, menekuk peraturan di satu negara, bahkan melobi kalangan istana.

Tigabelas tahun lalu, pengadilan Amerika Serikat memerintahkan tujuh perusahaan rokok besar yang beroperasi di negara itu –antara lain Philips Morris, British American Tobacco, Brown&Williamson dan R.J. Reynolds Tobacco-- untuk menyerahkan seluruh dokumen internal perusahaan, termasuk yang selama ini masuk kategori *top secret*. Keputusan ini diambil karena seringnya tuntutan publik terhadap praktek perusahaan rokok (lihat *Bab III Pertaruhan Nasib Industri*). Semula, jutaan dokumen itu membuat *mblenger* siapapun yang melihatnya: total sekitar 35 juta halaman, disetor begitu saja, tanpa dipilah dalam kategorisasi yang ringkas. Tapi kini dengan kemajuan teknologi, semua data itu sudah didigitalisasi dan bisa diakses lewat internet.

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYGROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

Penelusuran dokumen internal itu dapat menunjukkan pelbagai siasat bisnis pabrik rokok, tak hanya cara kerja mereka yang legal, tapi juga praktek tak terpuji -- misalnya lobi tingkat tinggi ke sejumlah pejabat negara terutama yang mengurus soal cukai, kesehatan dan pembuatan peraturan. Berdasarkan dokumen surat menyurat internal antara tahun 1960an – 1998 itu, kini publik dapat meraba atau menduga bagaimana industri rokok beraksi dan bereaksi terhadap pelbagai isu mutakhir yang mereka hadapi saat ini, termasuk respon industri menghadapi kampanye pengendalian tembakau yang makin masif di banyak negara. Kumpulan dokumen yang juga berisi rencana ekspansi jangka panjang 10-20 tahun mendatang itu juga dapat menjadi petunjuk strategi ekspansi global industri rokok di masa datang.

Dari kumpulan dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa “pertahanan” dan “serangan” industri tembakau telah memiliki pola tertentu. Contohnya, siasat industri dalam memobilisasi petani dan asosiasi petani untuk melawan upaya pemerintah dan otoritas kesehatan mengendalikan dampak buruk tembakau. Strategi ini ternyata bukan



hanya digunakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara Amerika Selatan dan China. Di tengah pertarungan di parlemen untuk menggolkan legislasi soal pengendalian tembakau, misalnya, ada saja organisasi yang mengaku mengatasnamakan petani, berdemonstrasi mengecam perumusan legislasi itu. Politikus yang tak punya prinsip, umumnya akan termakan klaim industri rokok dan asosiasi "petani" tembakau bahwa mereka mewakili sekian juta suara di daerah pemilihan.

Contoh pola yang lain: siasat industri rokok dalam menysar anak muda sebagai target pasar masa depan – langkah yang oleh peraturan diharamkan. Berbagai kegiatan promosi, *sponsorship* dan iklan rokok tampak dirancang khusus untuk menarik simpati dari kelompok ini. Di banyak acara pagelaran musik yang melibatkan anak-anak muda, para *sales promotion girls* perusahaan rokok selalu menyebarkan tembakau secara gratis.

Campur tangan pabrik rokok dalam pelbagai kebijakan pemerintah, juga merupakan bagian dari strategi industri tembakau yang getol digunakan, di Indonesia dan negara-negara lain. Lazimnya, industri menggunakan pelobi dari firma hubungan masyarakat (*public relation*) yang mumpuni dan berpenampilan menarik. Di Indonesia, para pelobi ini sering bergerak di Senayan, tempat anggota DPR berkumpul untuk sekadar mencari informasi apa yang tengah terjadi. Agar dapat menelusup lebih jauh, para pelobi ini direkrut dari bekas-bekas pejabat publik yang tahu persis seluk beluk struktur kekuasaan di Senayan maupun di Istana.

Terakhir, siasat yang juga lazim digunakan adalah menggunakan pendapat ilmuwan yang belum teruji benar dasar ilmiahnya. Pendapat 'ilmiah' seperti ini terus dibesar-besarkan untuk meragukan klaim bahwa rokok berbahaya untuk kesehatan. Melalui berbagai teknik komunikasi publik, industri terus menghujani masyarakat dengan '*fake science*' sampai publik ragu-ragu. Akibatnya, pelbagai legislasi yang lebih ketat soal tembakau ditunda atau dibatalkan, karena dinilai tidak penting.

Beberapa gelagat yang kami temukan di lapangan menunjukkan bahwa keempat siasat di atas --memanfaatkan asosiasi petani tembakau, menysar kaum muda, mengintervensi legislasi dan menyebarkan keraguan bahwa rokok merupakan racun-- juga dilakukan di Indonesia, selama bertahun-tahun. Hasil dari jurus-jurus pabrik rokok itu seperti yang kita lihat hari ini: normalisasi perilaku merokok. Mayoritas rakyat

menilai merokok di tempat umum dan di depan publik itu lumrah saja, bukan sesuatu yang berbahaya, atau pantas dipertanyakan.

Bukan mustahil, berkat empat siasat dasar itu dan sejumlah trik lain, Indonesia tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dari World Health Organization (WHO), sampai sekarang. Semua upaya legislasi seperti UU Kesehatan, UU Pengendalian Dampak Tembakau – bahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengendalian dampak tembakau, diganjal habis-habisan. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum mengesahkan aturan pengendalian tembakau. Semua ini membuat kita bertanya-tanya: sebegitu besarkah pengaruh industri tembakau pada elite pemerintahan?

MENGATASNAMAKAN ASOSIASI PETANI TEMBAKAU

Ini siasat lama industri tembakau di manapun. Industri ingin mengelabui khalayak dengan menegaskan bahwa para petani kecil dan buruhlah yang menolak RUU yang membatasi konsumsi tembakau, bukan mereka. Asosiasi ‘petani’ digiring dan dimobilisasi ke Gedung DPR di Senayan atau di depan Istana Merdeka mengusung isu ‘Tolak RUU Pengendalian Dampak Tembakau, yang merupakan pesanan asing.’



Pelbagai penelusuran di lapangan membuktikan para petani tembakau tak semakmur yang dikabarkan. Petani di sekitar Parakan, Temanggung, dan Wonosobo, Jawa Tengah, yang selama ini disebut-sebut sebagai 'surganya' tembakau, sering tak berdaya: rantai tata niaga teramat panjang, dan merugikan. Celaknya, para tengkulak dan pembeli tembakau (grader dan pabrikan) melanggengkan mata rantai yang memukul nasib petani ini.

Sejumlah petani yang dijumpai Kompas.com di beberapa desa di Kabupaten Temanggung, pertengahan September 2010 lalu bisa memberikan kesaksian. Seorang petani, sebut saja namanya Eno, menjelaskan tembakau harus melalui tiga tangan sebelum sampai ke pabrik. Panen petani biasanya dibeli pengepul yang kemudian menjualnya kepada grader, orang kepercayaan pabrik yang ditunjuk untuk memenuhi stok gudang. Grader inilah yang punya kuasa atas harga.



Para pengepul yang biasanya merupakan orang 'binaan' grader lazimnya memiliki wilayah operasi tertentu. Para pengepul ditugaskan berkeliling membeli hasil panen petani untuk memenuhi target yang dibebankan pabrik kepada grader. Petani kesulitan mencari pembeli lain karena biasanya sudah 'diikat' dengan pinjaman modal yang harus dibayar dengan hasil panen.

Pengepul akan membawa sampel tembakau milik petani --berupa gulungan kecil tembakau yang diikat dengan kertas berwarna coklat--ke gudang untuk dibaui dan dinilai grader. Ketika itulah, nasib petani 'ditulis' dan digariskan: grader akan menetapkan kualitas tembakau petani, sekaligus menentukan harga. Dalam perdagangan tembakau di Temanggung, ada enam kualitas tembakau dari kelas mutu A sampai F. Grader juga akan menentukan berapa banyak keranjang tembakau yang akan dibeli.

Tembakau yang sudah diberi label harga akan dibawa ke *gudang tamplek*. Di sini 'tukang cocok' --yang juga orang kepercayaan grader-- akan mencocokkan antara sampel dengan tembakau dari tiap keranjang yang disetorkan (ditumpahkan/ditemplekan). Setelah dinyatakan cocok, tembakau yang lolos diizinkan masuk gudang. Proses pembayaran kepada petani dilakukan setelah seluruh proses ini dilalui.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Ahmad Fuad mengisahkan, permainan 'nakal' kerap terjadi pada proses pencocokan. "Ada pedagang nakal yang 'bermain' dengan tukang cocok," kata Fuad. Pedagang minta tukang cocok meloloskan tembakaunya, meskipun berbeda dari sampelnya. Tentu saja dengan imbalan.

Tata niaga yang panjang dan berada dalam kuasa para grader menunjukkan bahwa petani tembakau cuma sekrup kecil dalam mesin perdagangan tembakau di Indonesia. Direktur Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Dr. Sonny Harry B Harmadi, mengatakan, pola tata niaga tembakau masih menggunakan sistem tradisional: petani tak punya daya tawar, kualitas tembakau ditentukan sepihak dan subyektif oleh para grader. "Ukurannya tergantung grader. Meskipun ada kemungkinan dipermainkan, petani harus menerima karena kalah dalam posisi tawar. Seharusnya ada standarisasi kualitas tembakau," ujar Sonny.



Seorang petani yang lain, Muji mengatakan mereka tak mempunyai pilihan ketika seorang pengepul hendak membeli hasil panen. Proses tawar menawar itu tak pernah ada. "Harga tembakau bukan milik petani tapi milik orang sana (pengepul, grader, gudang). Petani tak punya daya tawar, padahal kami yang bekerja keras. Tapi daripada *enggak* dibeli. Kami mau makan apa?" katanya.

Banyaknya tangan yang menangani tembakau sebelum sampai ke gudang, membuat bagian petani amat kecil. Temuan Kompas.com menyimpulkan selisih harga di tingkat petani dengan gudang bisa mencapai 50 persen lebih. Kuasa penuh penentu harga ada di tangan pengepul atau grader. "Pengepul bisa menekan petani dengan mengatakan barangnya nggak laku. Kita memang berpihak pada petani, tapi tak mungkin meninggalkan pedagang atau gudang. Kalau kita tekan gudang dan gudang tidak mau membeli, hancur semuanya," kata seorang petugas Dinas Pertanian Temanggung.

Sistem perdagangan ini pula yang membuat petani terlilit utang. Tiap awal masa tanam, petani berutang pada pengepul dan rentenir, mirip model ijon. Wahono, petani asal Desa Bansari, mengaku modal tanamnya selalu diperoleh dari juragan. Kepada juragan yang memiliki akses penjualan ke gudang inilah hasil panen akan dijual. Juragan akan memotong satu bagian dari setiap lima bagian hasil panen, sebagai cicilan pinjaman. Itu belum termasuk biaya transpor dan biaya numplek, yang juga harus ditanggung petani. "Semua petani rugi, nggak ada yang untung," kata Wahono.

Jika posisi petani begitu lemah, bagaimana peran paguyuban seperti Asosiasi Petani Tembakau dalam mengatasi soal yang timpang ini? Sayangnya, nyaris tidak ada. Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Jawa Tengah, Nurtantio Wisnu Brata, bahkan menilai tata niaga yang jomplang itu sudah membantu petani. Soal tidak adanya akses langsung petani ke gudang/pabrik sehingga mereka sangat tergantung kepada pengepul, menurut Wisnu, tak perlu dirisaukan. "Petani *enggak* mau *ngantri* langsung ke gudang," katanya, "Mereka banyak kerjaan lain menggarap lahan."

Untuk memperbaiki daya tawar petani, kata Wisnu, justru jumlah pedagang yang musti diperbanyak, agar harga bisa bersaing. Langkah ini mungkin ada gunanya, jika para pedagang tak terikat pada pembeli tunggal: pabrik rokok. Selain itu, tanpa standarisasi kualitas tembakau yang jelas, petani tetap tak bisa berkutik. Mereka berada dalam posisi yang lemah – posisi yang pasrah menerima apapun vonis para grader atas mutu tembakau yang mereka miliki. “Masalah harga memang tidak ada jaminan, kita ini pasar bebas,” kata Wisnu tanpa menjelaskan apa maksud ‘pasar bebas’, jika petani tak pernah bisa memilih pembeli.

Sikap Asosiasi yang cenderung ‘membiarkan’ nasib petani ini mengundang pertanyaan apa benar organisasi ini mewakili kepentingan petani. Soal ini terjawab dari selembur dokumen laporan keuangan yang diperoleh Kompas.com. Surat itu merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk aksi demonstrasi Asosiasi Petani Tembakau ke Jakarta, awal 2010 lalu. Ketika itu, hampir 50 bus berangkat dari Temanggung ke Jakarta untuk menghadiri unjukrasa.

Menurut dokumen bertanggal 5 Maret 2010 itu, aksi demonstrasi yang menghabiskan dana hampir Rp 368 juta itu disokong penuh oleh pabrik rokok. Empat pabrik rokok besar yang punya gudang tembakau di Temanggung masing-masing menyumbang, Gudang Garam Rp 33 juta, Djarum (Rp 34 juta), Bentoel (Rp 5,5 juta) dan Nojorono (Rp 5,5 juta),



atau total jendral Rp 78 juta. Di akhir aksi, tercatat ada defisit anggaran sebesar Rp 12.495.000, yang kemudian ditalangi oleh Gudang Garam dan Djarum.

Dokumen itu merupakan bukti telanjang bahwa industri rokok berada di belakang asosiasi petani tembakau. Asosiasi seperti boneka atau wayang yang digerakkan dari balik layar.



MENYASAR ANAK MUDA DAN REMAJA

Atas desakan para penggiat pengendalian rokok, tiga pabrik rokok besar dunia yaitu British American Tobacco, Philip Morris, dan Japan Tobacco, membuat kesepakatan 'empat tidak': (1) tak beriklan secara masif, (2) tidak memberi *sponsorship* bagi kegiatan olah raga, (3) tidak menggunakan selebritas untuk iklan, dan (4) tidak beriklan yang bertendensi mendorong anak-anak untuk merokok. Kesepakatan yang dibuat September 2001 itu, berlaku secara internasional.

Tapi apakah kesepakatan itu dipatuhi, setidaknya di Indonesia? Ternyata tidak. Orang muda merupakan pasar masa depan. Merangkul konsumen muda merupakan bagian dari ikhtiar untuk bertahan hidup -- tak terkecuali industri rokok.

Siasat untuk merangkul pasar remaja, tampak jelas di lapangan. Industri rokok berebut memasang spanduk, billboard, poster film, sponsorship konser musik, dan segala hal yang menysar kaum muda. Dengan dana promosi dan iklan yang tak terbatas, mereka berusaha menyejajarkan diri dengan selera anakmuda yang terus berubah.

Untunglah, berondongan iklan untuk remaja ini tak sepenuhnya 'bebas hambatan'. Ada lembaga seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak yang, meskipun tak sepenuhnya mampu, getol membendung serbuan ini. Lembaga ini tak segan menyetop pagelaran musik, menggelar demonstrasi dan memboikot pagelaran musik yang disponsori industri rokok – di antaranya dilakukan pada Agustus 2008 ketika penyanyi terkenal dunia, Alicia Keys, akan manggung ke Indonesia pada konser yang disponsori industri rokok.

Sebulan sebelum kedatangan Alicia, Komnas Anak telah mengirim surat protes minta konser dibatalkan. Alicia adalah duta gerakan 'Save a Child', sebuah kampanye untuk menyelamatkan masa depan anak di seluruh dunia. Tentu ironis jika tokoh seperti Alicia justru menjadi alat promosi industri rokok.

Alicia rupanya tidak tahu bahwa konsernya ikut disokong industri



rokok. Hanya dua hari menjelang konser, penyanyi ini minta semua logo dan nama rokok dihilangkan dari atribut promosi konsernya, mulai dari baliho sampai tanda pengenal kru panggungnya. Permintaan ini dipenuhi. Ketika Komnas Anak mengirim tim pemantau di hari pertunjukkan, terbukti semua atribut konser sudah bersih dari logo dan promosi rokok.

Akhir Mei 2009 Komnas Anak juga menghadang upaya pabrik rokok mengobral produknya pada acara "A Mild Live Wanted 2009", sebuah ajang 'pencarian bakat bermusik' yang digelar rokok Sampoerna A Mild, di Eldorado Bandung, Jawa Barat. Penonton yang kebanyakan anak-anak SMA dan SMP disodori rokok di pintu masuk, dengan harga miring. Ini siasat klasik industri rokok menggarap anak-anak muda.

Melihat aksi agresif ini, Komnas Anak bergerak. Pada babak final kontes ini, puluhan sukarelawan dari berbagai kelompok menggelar aksi di pintu masuk. Para demonstran menyerukan "Tolak Sponsor Rokok" pada tiap pengunjung. Dengan mengacungkan poster 1172 (melambangkan 1.172 orang yang tewas karena rokok setiap hari di seluruh dunia) dan melibatkan seorang berkostum malaikat maut, unjukrasa ini berhasil menarik perhatian. Manajemen A Mild akhirnya mengganti nama acaranya di Bandung, dari semula "A Mild Live Wanted" menjadi "Wanted" saja.

Maret 2008, Komnas Anak menghadang iklan rokok Avolution produksi PT HM Sampoerna. Komnas Anak memperkarakan iklan televisi yang menampilkan wujud rokok itu dengan berkirim surat pada Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Iklan dengan wujud rokok melanggar UU Penyiaran. Tak berapa lama, iklan ini dicabut dan diganti iklan versi lain.

Komnas Anak mungkin giat menghadang upaya pabrik rokok merebut hati remaja. Tapi ini saja tak cukup – kemampuan logistik dan 'nafas' Komnas Anak tentu tak sepanjang industri rokok. Dengan pelbagai upaya dan kreativitas, kampanye industri rokok, akhirnya toh menyerbu anak-anak muda juga. Diperlukan ikhtiar yang lebih serius, seperti aturan yang mengikat, untuk menghadang berondongan iklan yang akan meracuni generasi masa depan ini.

MENGABURKAN BAHAYA ROKOK BUAT KESEHATAN

Dalam hal 'melunakkan' bahaya merokok, industri banyak membiayai riset-riset 'ilmiah' yang mencoba membuktikan bahwa zat yang sejak puluhan tahun lalu terbukti adiktif ini 'tidak berbahaya'.

Yang paling baru, kita disodori 'pengobatan alternatif' --yang menggunakan asap rokok sebagai bahan terapi-- yang dikembangkan Universitas Brawijaya. Caranya: melururkan asap rokok ke seujur tubuh pasien. Meski terdengar menggelikan, banyak orang percaya khasiat pengobatan berbahaya ini. Tujuan besar pabrik rokok pun tercapai: membuat orang percaya, asap rokok aman bahkan berkhasiat obat.

Salahsatu lembaga yang pertamakali merilis isu pengobatan alternatif dengan galur tembakau adalah paguyuban Komunitas Kretek Indonesia. "Kami berdiri akhir 2010, dan khusus beranggotakan alumni UGM di Jakarta," kata Zulfan Kurniawan, ketua komunitas ini malu-malu. Latar belakang anggota komunitas ini beragam.



Dalam penjelasannya mengenai kampanye pelestarian kretek sebagai warisan budaya, komunitas ini selalu menyitir hasil penelitian Dr Sutiman dan Dr Greta Zahar yang mengatakan asap rokok dapat digunakan sebagai terapi penyembuh berbagai penyakit. "Kami minta semua pihak ikut meneliti apakah benar tembakau menyebabkan mandul, kanker dan penyakit lainnya," kata Zulfan.

Strategi ini berupaya membuat khalayak meragukan hasil penelitian sebelumnya bahwa rokok merupakan zat adiktif, yang buruk bagi kesehatan. Dengan terus menerus menyebarkan rilis ini –bahwa rokok bisa dipakai terapi kesehatan--- lama-lama publik dibuat ragu tentang bahaya asap rokok. Bagi industri, keraguan seperti ini sangat penting karena dapat menghambat kemunculan undang undang yang lebih restriktif tentang rokok dan nikotin.

Zulfan dan Masyarakat Kretek Indonesia juga memainkan emosi publik dengan rajin merilis kabar bahwa tembakau lokal amat baik kualitasnya, dan bahwa kretek merupakan warisan budaya. Membela rokok kretek berarti membela produk asli dari serbuan asing – begitu kita-kira kerangka pesan yang hendak disampaikan. Anehnya, upaya pendekatan 'nasionalisme' macam itu, kerap kali manjur.

MENGINTERVENSI KEBIJAKAN

Siasat terakhir–dan yang termasuk paling efektif-- untuk meruntuhkan upaya pengendalian tembakau di Indonesia adalah dengan mengintervensi kebijakan, baik di badan legislatif maupun eksekutif.

Sejumlah dokumen industri rokok menunjukkan pelbagai pendekatan dan lobi intensif kepada para pengambil kebijakan di Indonesia. Bukti yang paling nyata: mentalnya pasal tembakau sebagai zat adiktif dalam UU Kesehatan pada 1992. Rupanya, sebelum pengesahan pasal tersebut, industri rokok mengajak sejumlah anggota DPR dan pejabat Kementerian Kesehatan untuk menghadiri 'media briefing' di Nusa Dua, Bali. Setelah pertemuan tersebut, pasal bahwa rokok merupakan zat adiktif, tak pernah disebut-sebut lagi dalam pembahasan UU Kesehatan.



Tarik ulur pasal mengenai “tembakau sebagai zat adiktif” terulang kembali September 2009, ketika parlemen hendak mengesahkan RUU Kesehatan yang baru. Kala itu, perhatian publik memang sedang tidak mengarah ke Senayan -- DPR sedang menjelang masa reses, setelah pemilihan presiden dan parlemen. Radar media sedang meneropong hasil pemilu, bukan gerak-gerik anggota DPR. “Ketika itulah, DPR memanfaatkan waktu menggolkan RUU Kesehatan,” kata Rohani Budi Prihatini, salah satu staf ahli senior di Senayan.

Sebaliknya, para aktivis juga sigap mencium kesempatan untuk memperkuat pasal-pasal kewenangan pemerintah dalam pengendalian tembakau. Budi dan kawan-kawan --atas permintaan satu anggota DPR-- berusaha menyelipkan rumusan intisari RUU Pengendalian Tembakau ke dalam UU Kesehatan. “Kami peras isi RUU Pengendalian Tembakau ini setidaknya jadi empat pasal untuk dimasukkan dalam RUU Kesehatan,” katanya.

Langkah cerdas ini terlambat disadari industri. Begitu tahu bahwa UU Kesehatan berisi juga ketentuan mengenai tembakau sebagai zat adiktif, industri berusaha dengan segala cara untuk merontokkan pasal

tersebut. Lobi intensif dilakukan, tapi terlambat. Sidang Paripurna telanjur menyepakati aturan ini. Untuk itu mereka mencari cara lain: mencuri ayat tembakau dalam perjalanan dari Senayan menuju Istana Merdeka –untuk ditandatangani Presiden Yudhoyono.

Beruntung, manuver ini kepergok: media massa ramai-ramai memberitakan hilangnya ‘ayat tembakau’ dalam UU Kesehatan 2009. Tekanan media ikut memaksa kembalinya ayat tembakau ini ke dalam UU Kesehatan yang disahkan kemudian

Meskipun ayat tembakau telah kembali, pertarungan belum selesai. Kali ini medannya sudah beralih pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Dampak Tembakau atau sering disebut RPP Tembakau. RPP ini berfungsi sebagai aturan pelaksana dan paling lambat harus disahkan setahun setelah UU Kesehatan. Anehnya, sampai sekarang –lebih dari setahun setelah UU Kesehatan-- PP tentang Tembakau ini belum juga nongol.

RPP Tembakau disiapkan tujuh kementerian serta Sekretariat Negara. Tim Kecil dibentuk untuk mengkompilasi masukan dari berbagai institusi yang berkepentingan atas RPP Tembakau. Hingga September 2010, Tim Kecil sudah dua kali bertemu. Akhir 2010 lalu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih sempat berkomentar bahwa RPP Tembakau akan segera selesai. “Saat ini masih di Tim Kecil. Saya perkirakan akan segera selesai tahun depan. Itu konsen kami demi kesehatan rakyat.” Namun optimisme Bu Menteri tidak sejalan dengan bawahannya. Budi Sampurna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, justru sangsi RPP bakal rampung dalam waktu dekat. “Jangankan RPP rokok,” katanya, “(RPP) Pelayanan Darah saja sudah dua tahun belum selesai sampai sekarang.”



Proses harmonisasi Tim Kecil RPP Tembakau memang berjalan lambat. Tiap kementerian memberi masukan pada draf RPP Tembakau yang terdiri 8 bab dan 37 pasal itu. Masukan paling banyak datang dari Kementerian Keuangan, yaitu 36, lalu menyusul Kementerian Perindustrian yang menyumbang 24 masukan. Menteri Perindustrian MS Hidayat sempat minta RPP Tembakau didrop, karena dianggap merugikan industri rokok.

RPP Tembakau ini memang lumayan menyuarakan kepentingan pengendalian tembakau. Misalnya, ada pasal pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, peringatan bergambar dalam kemasan dan pengaturan jumlah rokok minimal dalam satu kemasan. Ini merupakan sejumlah aturan yang disepakati dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tampak ada keinginan bahwa perlindungan terhadap rakyat yang tidak merokok bisa dicapai lewat RPP Tembakau, meskipun pemerintah menolak menandatangani FCTC.

Keinginan inilah yang membuat pembahasan RPP Tembakau menjadi panas, dan alot. Salah satu pasal yang ramai disorot adalah uji klinis kadar eugenol, selain tar dan nikotin. Eugenol merupakan salah satu senyawa di dalam minyak cengkeh yang menjadi bahan rokok kretek. Kadar eugenol yang tinggi bisa memicu kanker hati. Untuk itu, dalam RPP Tembakau, pemerintah mengusulkan agar kadar eugenol diuji dan dicantumkan dalam kemasan rokok.



Usul ini dikritik industri rokok, habis-habisan. Pagi-pagi, Kementerian Perindustrian berdiri paling depan mempertanyakan perlunya uji eugenol. Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian, Warsono, bahkan terang-terangan menyarankan uji eugenol dihapus dari RPP Tembakau. Sikap pemerintah ini persis sama dengan pendirian industri rokok. Gabungan Asosiasi Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) juga meminta uji eugenol tidak dimasukkan dalam RPP Tembakau.

Tak hanya dalam eugenol, pemerintah dan industri tembakau juga satu suara dalam banyak isu lain. Dalam hal jumlah batang rokok dalam kemasan, misalnya. Naskah awal RPP Tembakau melarang kemasan rokok berisi di bawah 20 batang agar harganya lebih mahal dan sulit dijangkau warga miskin atau remaja. "Sebaiknya pasal itu dicabut karena akan mematikan pemasaran rokok, yang biasa menjual rokok berisi 4, 12 hingga 16 batang sebungkus," kata Warsono.

RPP Tembakau juga mengharuskan industri mencantumkan gambar peringatan yang menunjukkan akibat buruk merokok. Misalnya, gambar leher atau paru-paru yang terserang kanker akibat merokok, dengan ukuran hingga 1/3 bungkus rokok. Aturan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh industri rokok untuk produk mereka yang diekspor ke luar negeri, misalnya Singapura, Thailand dan Australia.

Anehnya, gagasan ini juga diprotes keras. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai, belum ada riset yang membuktikan bahwa peringatan bahaya merokok dalam bentuk gambar lebih efektif membuat orang berhenti merokok. Ketua Gaprindo Muhaimin Mufti mengatakan, aturan dalam RPP Tembakau terlalu berlebihan. "Apa ada riset yang memadai sebelum membuat gambar-gambar itu? Kita yang seimbang saja, dan jangan memojokkan industri rokok," katanya. Dalam isu ini, lagi-lagi Kementerian Industri berpihak pada industri rokok. Menurut Mufti, saat ini para pengusaha tembakau memang sedang melakukan pendekatan intensif dengan para pengambil kebijakan. "Tapi tidak ada yang pakai uang, semua bersih," katanya.

Budi Prihatini mengakui sulit menangkap basah proses intervensi kebijakan yang dilakukan industri tembakau. "Yang bisa dilakukan adalah memetakan produk legislasi yang muncul, dan melihat kepentingan

siapa yang dibawa oleh produk legislasi tersebut,” katanya. Pola lobi yang dilakukan industri tembakau, kata Budi, sudah amat jelas. “Pengambil kebijakan di Senayan dan di Kementerian Kesehatan pasti pernah didatangi dan argumentasinya sama: pengendalian tembakau akan membawa masalah untuk petani, buruh, dan seterusnya,” katanya sambil tertawa.

Ketua Gabungan Asosiasi Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran menilai pemerintah seharusnya membuat Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Petani Tembakau dan Industri Tembakau. “Bukannya sibuk membuat RPP Tembakau,” katanya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Budi Sampurna, mengakui perumusan RPP Tembakau ini amat alot. Sejumlah substansi yang diusulkan Kementerian Kesehatan, katanya, ditolak oleh unsur pemerintah yang lain. “Memang ada perbedaan, tapi kami yakin pasti bisa mengecilkan perbedaan yang ada,” katanya diplomatis. Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian, Warsono, juga mengaku siap mencari jalan tengah. “Kami sadar ada aspek kesehatannya, ini yang kita bahas,” katanya.

Meski sudah ada kesepakatan, sampai kini RPP Tembakau tetap tak jelas nasibnya. Kabarnya, rancangan RPP itu tertahan di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Pada Mei 2011 lalu, Menkokesra Agung Laksono –yang juga Wakil Ketua Umum Golkar— memastikan pemerintah tak akan mengesahkan RPP ini dalam waktu dekat (meskipun seharusnya disahkan sejak tahun lalu), karena masih membutuhkan pembahasan lebih intens. Agung memastikan pemerintah tak akan mengeluarkan sebuah peraturan “yang merugikan kelompok masyarakat tertentu”. Politikus mantan Ketua DPR ini kemudian merujuk pada penolakan besar-besaran yang masih muncul dari para petani tembakau.

Pernyataan Agung seperti menjadi lonceng kematian untuk RPP Tembakau. Setelah berbulan-bulan diperdebatkan, didiskusikan di banyak forum, disesuaikan dengan berbagai upaya mencegah meluasnya dampak peningkatan jumlah perokok pemula, RPP Tembakau akhirnya masuk kotak, begitu saja. Tak terdengar lagi keberadaannya.

Bab VIII

Tujuh Mitos Pengendalian Tembakau

Kampanye Pengendalian Tembakau sering kali disalahpahami. Dengan dana kampanye yang hampir tak terbatas, industri rokok dengan lihainya memutarbalikkan fakta dan logika untuk merebut simpati publik sekaligus memojokkan kampanye pengendalian konsumsi tembakau.

Berikut tujuh mitos yang sering digembar-gemborkan.

1. **Tembakau merupakan tanaman khas Indonesia**

"Tembakau adalah tanaman khas Indonesia dan kebiasaan merokok sudah menjadi bagian dari budaya asli leluhur kita yang harus dipertahankan sebagai warisan leluhur. Kampanye Pengendalian Tembakau (*Tobacco Control*) akan memusnahkan keberadaan **warisan** tersebut."

Oleh industri rokok, tembakau sering dikaitkan dengan "nasionalisme" karena "tembakau dan merokok merupakan warisan budaya leluhur". Betulkah demikian?



BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA



Tembakau merupakan tanaman tropis, tapi bukan asli Nusantara melainkan dari Amerika Latin. Tembakau dikembangkan secara komersial di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Cornelis de Houtman yang menanam kebun tembakau di Banten pada 1596. Tiga abad kemudian, kebiasaan merokok dengan tembakau mulai muncul. Tembakau Deli yang kemudian mendunia itu, baru diperkenalkan tahun 1864 oleh Nienhuys. Deli Maatschappij yang mengelola industri tembakau Deli, baru berdiri pada 1869. Setelah itu, barulah berkembang budidaya tembakau di Kudus, Malang, Jember, yang kelak menjadi sentra industri rokok.

Kebiasaan merokok dengan tembakau dipopulerkan oleh Haji Djamari. Lelaki asal Kudus ini merasa sehat setelah mengurutkan minyak cengkeh ke dadanya dan mencampurkan cengkeh dalam lintingan tembakau, lalu menghisapnya. Banyak orang tertarik dengan lintingan Djamari. Kala itu, kebiasaan merokok memang sudah ada, tapi bukan dengan tembakau, melainkan kulit jagung yang dicampur kemenyan (*klembak menyan*), setelah berabad-abad sebelumnya masyarakat mengenal mengunyah pinang sebagai

warisan tradisi kuno. Kebiasaan merokok dengan tembakau baru mulai marak akhir abad 19, setelah budidaya tembakau meluas.

2. Merokok Adalah Hak Individu ?

"Merokok adalah **hak** individu, mengapa harus **dilarang**, apalagi **tembakau** merupakan herbal, **bukan produk sintetis** seperti sabu-sabu atau psikotropika maupun **drugs** lainnya.

Hak individu, dalam konteks manusia sosial, tidak berdiri sendiri -- dia akan menjadi monster jika dibiarkan liar. Prinsip utama hak asasi adalah tidak mengurangi, apalagi menghilangkan, kebutuhan individu atau kelompok lain yang bersifat universal. Misalnya, hak atas udara yang sehat.



Pengendalian tembakau tak bermaksud memangkas hak orang merokok, tapi memperjuangkan hak tiap orang untuk menghirup udara yang sehat. Pelbagai penelitian menyimpulkan asap rokok mengandung 4.000 senyawa kimia, dengan 250 zat kategori berbahaya dan 50 zat diduga karsinogenik. Untuk itu, lokasi (ruang) untuk merokok harus ditetapkan agar dapat dipastikan tak ada orang yang dirugikan karena menghirup asap rokok yang tak diinginkan.



Nikotin memiliki efek **penenang** syaraf. Suku-suku asli di Amerika Latin mengunyah dan membakar tembakau untuk mendapatkan efek halusinasi -- sehingga tembakau dianggap sebagai tanaman surga. Tembakau memiliki kandungan nikotin paling tinggi yang langsung berpengaruh pada sistem syaraf -- sama persis dengan efek yang ditimbulkan oleh ganja. Dalam dunia

modern istilah *drugs* berarti: tiap substansi yang mempengaruhi sistem syaraf dan meningkatkan kesadaran, sehingga pernyataan bahwa tembakau bukan *drugs* merupakan kekeliruan fatal.

3. Ekonomi Hancur Jika Pengendalian Tembakau Diterapkan

"Pengendalian Tembakau akan **menghancurkan perekonomian** dan **mata pencaharian petani tembakau** nasional"

"Sembilanpuluh persen perekonomian penduduk Temanggung bergantung pada tembakau, baik sebagai petani, pengrajin keranjang tembakau, buruh petik, buruh angkut, hingga penjual" ungkap Ahmad Fuad Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Temanggung (Tempo Interaktif, 19 Maret 2010).

Kampanye pengendalian konsumsi tembakau seringkali dibenturkan dengan nasib petani tembakau dan buruh pabrik. Dikesankan bahwa pengendalian tembakau ingin menghancurkan petani dan buruh. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya petani dan



buruh, kesan seperti ini tentu memojokkan kampanye pengendalian tembakau, sekaligus menempatkan kampanye tersebut sebagai 'mewakili kepentingan asing yang tidak prorakyat'

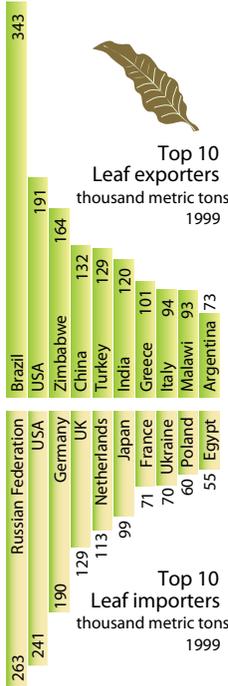
Pertama-tama perlu disadari posisi Indonesia dalam peta pertembakauan dunia. Indonesia bukanlah pemain tembakau. Tahun 2007, kita hanya menghasilkan 165.000 ton atau kurang dari tiga persen produksi dunia. Produksi tembakau dunia dikuasai empat negara: China, Brazil, India, dan Amerika Serikat yang menghasilkan 4,2 juta ton atau duapertiga tembakau dunia. Tahun 2010 lalu produksi Indonesia malah hanya tinggal 80.000 ton saja.

Penurunan produksi itu seiring dengan penciptaan luas lahan pertanian tembakau, serta merosotnya jumlah petani yang menanam tembakau. Tahun 1990, luas kebun tembakau mencapai 0,52 persen dari total luas lahan pertanian. Tapi pada 2007, rasio itu merosot tinggal 0,44 persen. (<http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>). Selama 10 tahun (1997 – 2007), jumlah petani tembakau juga melorot dari 894.000 menjadi 582.000 atau turun 35 persen. Dibandingkan dengan total pekerja, porsi petani tembakau melorot dari 2,6 persen menjadi 1,4 persen. (BPS. 1986-2007. *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia*).

Diukur dari penghasilan devisa, tembakau menempati posisi paling buncit dibandingkan dengan komoditas pertanian lain seperti kelapa sawit, karet, kopi, rempah-rempah, teh dan biji cokelat (kakaو). Data BPS menunjukkan nilai ekspor tembakau tahun 2007 hanya US\$ 73 juta, hampir sepersepuluh ekspor rempah-rempah atau seperduaratus nilai ekspor minyak kelapa sawit.

Selain mengekspor, Indonesia ternyata juga mengimpor tembakau.. Data BPS menunjukkan bahwa tahun 2007 kita mengimpor tembakau senilai 133,5 juta dollar AS, sebagian besar dari China, hampir dua kali lipat dari nilai yang kita ekspor. Jika betul peduli pada nasib petani tembakau, pemerintah seharusnya melarang impor tembakau sehingga harga tembakau lokal terdongkrak. Jika betul pabrik rokok juga prihatin dengan nasib petani, mestinya pabrik bisa mengutamakan tembakau lokal dan mengurangi impor.

Tobacco Trade



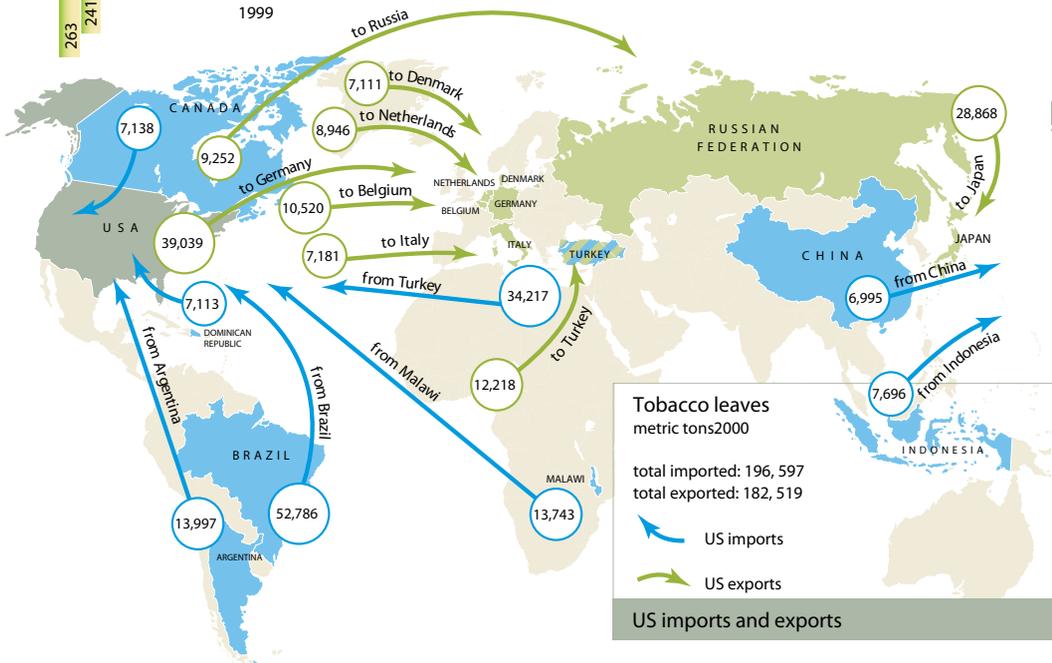
Tobacco trade is big business, for both the raw material (tobacco leaves) and the finished product (manufactured cigarettes).

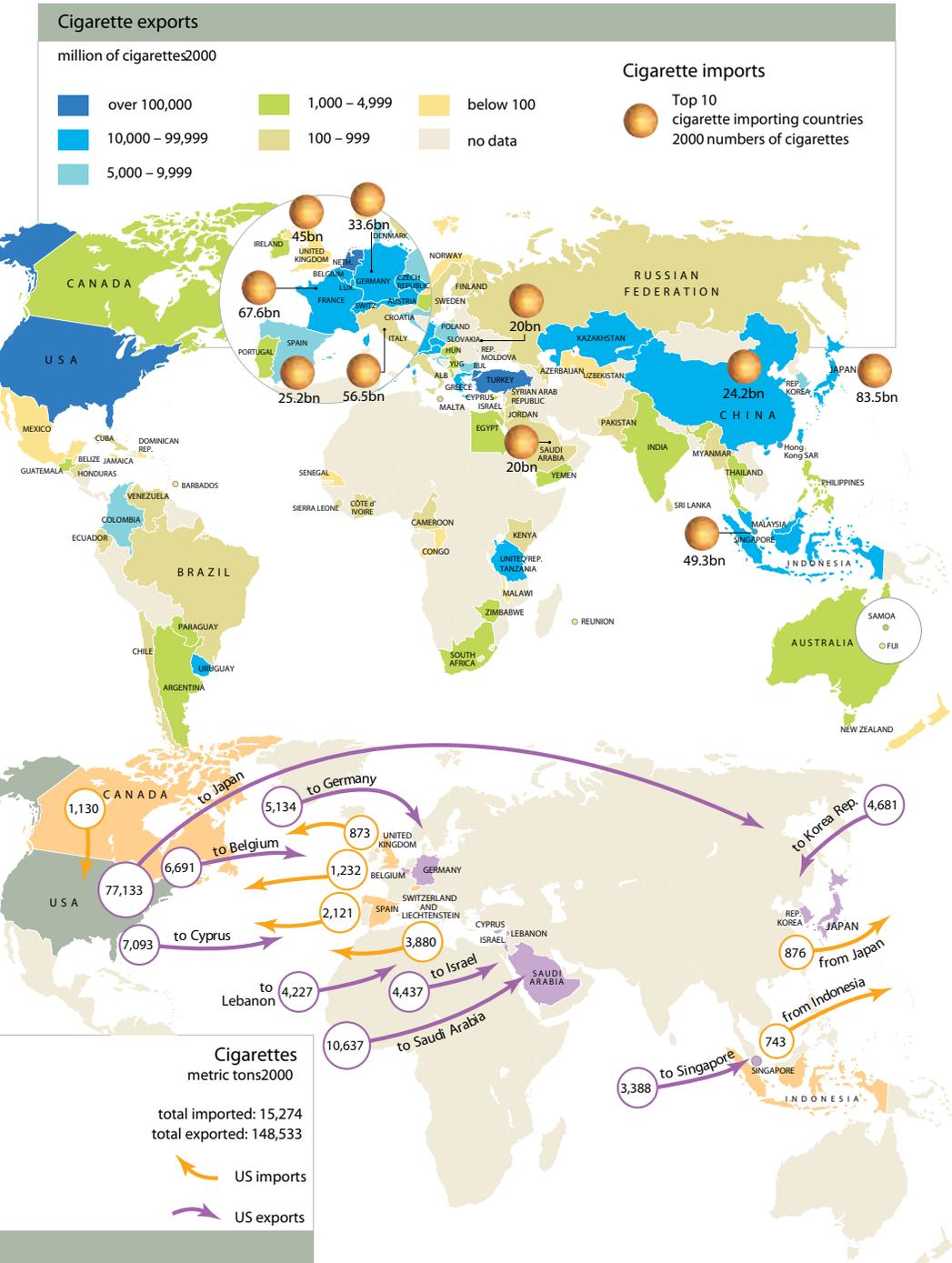
Brazil is the largest exporter of tobacco leaf, and the Russian Federation and the USA are the largest importers. Some countries that grow tobacco, such as the USA, also import foreign tobacco as well as exporting their own tobacco leaves. Interestingly, the USA exports approximately the same amount of tobacco that it imports. Because US tobacco is popular globally, and tends to be more expensive than tobacco from other countries, the value of US tobacco leaf exports are about double that of the same quantity of imports.

Manufactured cigarettes are also traded globally. Again, the USA is the largest exporter of manufactured cigarettes, accounting for nearly 20 percent of the world total. Japan is the largest importer of cigarettes.

According to government reports, 846 billion cigarettes were exported, but only 619 billion were reported to be imported. Statistics such as these provide a sense of the size of the cigarette smuggling problem.

China is quietly emerging as a significant cigarette exporter, increasing from virtually no exports in 1980 to over 20 billion cigarettes exported in 2001, worth about US\$320 million. In 2005 the value of China's export trade in cigarettes is predicted to be US\$600 million.





Belakangan ini, kebutuhan tembakau nasional (untuk pabrik rokok) jauh di atas produksi. Tahun 2010 lalu, misalnya, produksi tembakau hanya 80.000 ton, sedangkan kebutuhan pabrik rokok mencapai 240.000 ton. Angka ini mestinya menyiratkan bahwa petani tembakau punya daya tawar tinggi terhadap pabrik rokok – tapi ternyata tidak. Di mana-mana kita dengar petani kecewa dengan harga yang ditentukan pabrik, dan tak jarang yang membakar hasil panennya.

Harus diakui, beberapa puluh tahun ke depan, ketika konsumsi rokok menurun, kebutuhan pabrik rokok atas tembakau (lokal) juga akan merosot. Tapi itu bukan berarti ‘kiamat’ bagi petani tembakau. Mereka dapat menanami tanahnya untuk tanaman lain yang lebih menguntungkan. Pemerintah juga dapat mendorong riset pemanfaatan tanaman tembakau selain untuk rokok.

4. Publik Kita Sudah Dewasa, Tidak Perlu Pengaturan

“Pengendalian Tembakau **tidak perlu diatur** dalam peraturan perundang-undangan, biarlah pasar/**publik** yang menentukan apakah mereka membutuhkan rokok atau tidak. Masyarakat Indonesia sudah **modern**, mereka sudah **mampu memilah dan memahami** sendiri hal-hal positif dan negatif dari rokok. Sehingga



meratifikasi Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau sangat tidak relevan bagi Indonesia.”

Anggapan seperti itu terdengar seolah-olah masuk akal. Tapi lihatlah kenyataan ini: sejak pertama kali digulirkan Februari 2003, konvensi internasional pengendalian tembakau hanya belum diratifikasi oleh tiga negara, termasuk Indonesia. Apakah 165 negara anggota WHO yang lain, seperti China, Singapura, Inggris, Malaysia dan Brasil (produsen tembakau terbesar dunia) yang meratifikasi konvensi ini, masyarakatnya tidak modern?

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007 memaparkan, pengeluaran rumah tangga untuk

rokok rata-rata Rp 136.534 per tahun, atau 15 kali pengeluaran biaya kesehatan dan sembilan kali biaya pendidikan (Abdillah Ahsan dalam *Kajian Fikih Pengendalian Tembakau*, di Yogyakarta, Maret 2010).



Ambisi pemerintah untuk menjaga kesehatan

masyarakat tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Pemerintah wajib melindungi kesehatan warganya. Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat, dan terus terang, tentang bahaya merokok. Sejauh ini, penguasaan informasi publik cenderung didominasi perusahaan rokok. Data bahwa ada 5,4 juta jiwa yang melayang setiap tahun (atau 10 orang per menit) gara-gara rokok (*WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, The MPOWER Package*), tak pernah dijadikan bahan kampanye kesehatan publik yang sungguh-sungguh. Di Indonesia kematian gara-gara rokok telah mencapai angka 427.948 orang/tahun (data 2008) atau 49 orang per jam (*Fakta Konsumsi Tembakau di Indonesia, data 2007 dari Indonesia Tobacco Control Network dan Laporan Badan Khusus Pengendalian*

Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (TCSCIAKMI), 2008).

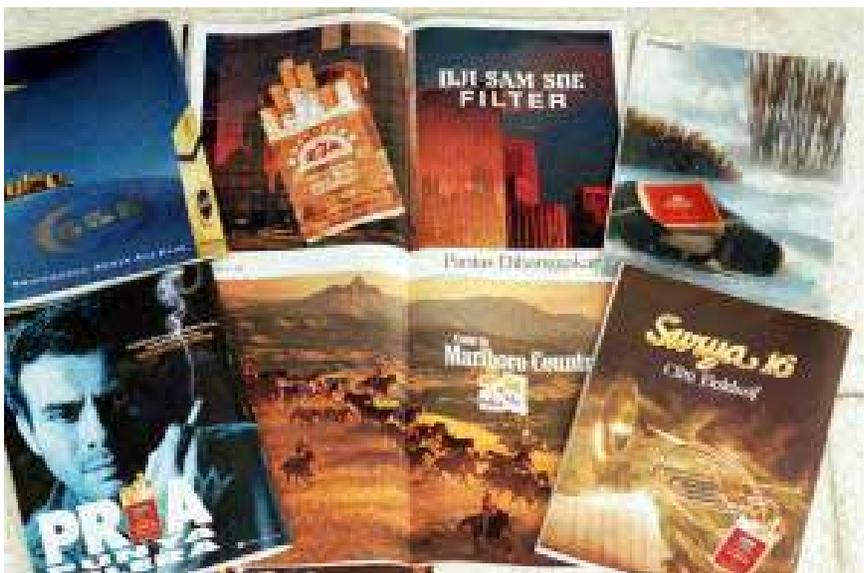
'Pendidikan publik' tentang rokok sebaliknya gencar dilakukan pabrik rokok. Hasil riset AC Nielsen tahun 2006 menunjukkan belanja iklan rokok mencapai Rp 1,6 triliun, ketiga setelah iklan telekomunikasi dan sepeda motor (AC Nielsen Research on Advertisement, 2007).

Dan jangan lupa: merokok kini bukan hanya monopoli orang dewasa. Data Global Youth Survey di Indonesia menunjukkan, prevalensi merokok di kalangan belia, 5-9 tahun, mencapai 1,8 persen (data 2004). Artinya dari 100 anak belia yang belum menginjak kelas 4 SD, dua di antaranya merokok.

5. Rokok Dikendalikan, Media Gulung Tikar

"Jika rokok dikendalikan/dilarang maka banyak **perusahaan media** akan **gulung tikar**, karena **iklan** mereka akan **tergerus** bahkan **habis.**"

Rokok memang merupakan salah satu penyumbang terbesar iklan di media, di luar telekomunikasi dan otomotif. Namun jika rokok berhenti iklan, apakah media akan mati? Di mana-mana di penjuru dunia telah dibuktikan: media berhenti menerima iklan rokok dan tetap terus hidup.



6. Dunia Olahraga, Seni Budaya dan Pendidikan Tergantung Industri Rokok

“Industri rokok **mendukung** pengembangan **olahraga, kesenian, budaya dan pendidikan nasional**, kalau dibatasi bagaimana nasib bidang-bidang tersebut, sementara negara masih kesulitan mengelolanya.”



Industri rokok dengan duit berjibun selama ini memang merupakan salah satu penyokong pelbagai *event* kegiatan olahraga, musik dan bahkan beasiswa pendidikan. Dengan uang begitu banyak, mengapa tidak? Toh, dengan masuk ke bidang-bidang tersebut, *brand* mereka terus diingat dan melekat di hati dan kepala target pasar yang memang mereka incar: anal-anak muda.

Bagaimana jika rokok dilarang memberi *sponsorship*, apakah kegiatan bidang-bidang tersebut akan loyo? *No, big no*. Semua akan aman saja. Piala Sepakbola Negara-negara Asia Tenggara (Piala AFF) tahun 2010 di Jakarta, berjalan meriah tanpa sponsor rokok. Puluhan bahkan mungkin ratusan perusahaan, mulai dari perusahaan makanan, infrastruktur, tambang, perbankan, otomotif, dan telekomunikasi, baik yang dikelola sepenuhnya oleh swasta maupun BUMN siap menggantikan rokok sebagai penyandang dana. Dan jangan lupa: dilarangnya rokok dalam *sponsorship* boleh

jadi akan mengingatkan pemerintah pada kewajibannya memajukan dunia olahraga, kebudayaan dan juga: pemberian beasiswa.

7. Pengendalian Tembakau cuma Akal-akalan Pihak Asing Untuk Menguasai Pasar

"Pengendalian Tembakau adalah **strategi pihak asing** (negara barat) untuk **menguasai pasar rokok** di negara-negara berkembang khususnya Indonesia"

Konvensi internasional mengenai Pengendalian Tembakau digagas pertamakali oleh negara berkembang. Justru negara-negara maju yang memiliki industri rokok raksasa seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang pada awalnya menolak inisiatif ini. Jika dikendalikan, pabrik rokok asing justru tidak akan masuk ke Indonesia.

Morris membeli HM Sampoerna karena melihat pasar yang potensial di Indonesia: penduduknya banyak, aturannya longgar.

Demi masa depan, industri rokok selalu memburu pasar 'perokok pemula'. Dan Indonesia --yang aturannya mengenai rokok sangat longgar itu--memiliki pangsa pasar perokok pemula yang luar biasa. Prevalensi perokok remaja ada di bawah angka lima persen. Ini menunjukkan

ruang pengembangan yang masih terbuka lebar. Namun jika konsumsi rokok dikendalikan, ruang yang lebar ini akan semakin mengempis – yang justru menyulitkan ruang gerak pabrik rokok, entah lokal maupun asing.



EPILOG

Devide et Impera **di Zaman Milenium**

Perjalanan Jaringan Pengendalian Tembakau di Indonesia (Indonesia Tobacco Control Network) memang baru satu dasawarsa. Bukan masa yang panjang jika dibandingkan dengan gerakan advokasi publik lainnya. Kelompok yang terlibat pun relatif terbatas, yakni para profesional di bidang kesehatan. Ada dokter, ahli kesehatan masyarakat, pengacara, serta jaringan advokasi anak dan hak konsumen. Belakangan, jaringan ini meluas dan melibatkan murid sekolah, orang tua, dan juga wartawan seperti saya.

Sebagai jurnalis, saya akrab dengan berbagai isu advokasi publik, baik di bidang lingkungan hidup, demokratisasi, kesetaraan gender, juga antikorupsi. Dari pergaulan yang beragam ini saya paham bahwa jaringan pengendalian tembakau adalah kelompok yang jauh dari hiruk-pikuk. Sepi.

Latar belakang aktivis yang bergabung dengan jaringan ini tidak terlalu beragam. Maklum, sebagian besar aktivis gerakan di Indonesia adalah pecandu rokok, begitu pula di kalangan jurnalis. Akibatnya, "Sebagian besar



mereka cenderung tak mau tahu isu pengendalian tembakau,” kata Setyo Budiantoro yang aktif di Tobacco Control Support Center (TCSC) sejak sepuluh tahun lalu. “Topik rokok, entah bagaimana, dilokalisir menjadi problem teknis kesehatan, bukan problem lintas sektor yang membutuhkan pendekatan mutidisiplin,” kata Budi yang juga bergabung dalam Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini.

Sejauh pengamatan saya, jaringan pengendalian tembakau juga paling sering disalahpahami ketimbang gerakan lainnya. Aktivistis di bidang lingkungan, misalnya, menghadapi medan yang lebih jelas. Di satu pihak ada korporasi perusak lingkungan, kebijakan publik yang tidak memihak lingkungan, dan birokrasi yang mudah dimanfaatkan pengusaha. Lalu, di pihak lain ada pendekar lingkungan, akademisi, dan masyarakat yang berjuang mendorong perbaikan. Peta keberpihakan, meskipun sering campur-aduk, relatif lebih terang.

Lain soal dengan jaringan pengendalian tembakau. Berbagai isu dipelintir, sengaja atau pun tidak, sehingga tak lagi jelas duduk perkara sebenarnya. Umpamanya, seperti dibahas dalam bab sebelumnya,

bertiup isu bahwa jika regulasi diterapkan maka industri rokok ambruk besok pagi. Atau, jaringan ini bertujuan membunuh mata pencaharian buruh dan petani tembakau. Sebuah persepsi yang (sengaja dibuat) menyesatkan.

Kendati tak akan terjadi esok hari, harus diakui bahwa senjakala industri rokok adalah sebuah keniscayaan -- bagian dari kehendak alam. Adalah fitrah bahwa manusia ingin hidup lebih sehat. Perlahan, industri rokok akan berhadapan dengan dorongan publik yang terus menguati: publik yang tak ingin terperangkap dalam tembok perokok pasif; publik yang tak ingin anak dan remaja mencandu rokok terlalu cepat; publik yang lelah menanggung ongkos kesehatan yang mahal lantaran efek rokok, aktif maupun pasif.

Keinginan publik untuk lebih sehat dan berkualitas, semestinya, tercermin dalam kebijakan pemerintah sehingga populasi perokok diturunkan perlahan-lahan. Berbagai negara maju cukup serius memilih jalan itu, demi kesehatan warganya. Maka, tak heran bila laporan analisis ekonom Citigroup, Juli 2011, menunjukkan senjakala industri rokok di negara maju bakal terwujud dalam rentang 30-50 tahun lagi. Finlandia mungkin lebih cepat, 20 tahun lagi, karena negeri Skandinavia ini secara resmi membuat program terpadu "no cigarette at 2050". Tidak perlu industri farmasi atau industri asuransi sebagai dalang di balik *sunset* industri rokok di negara-negara maju ini. Sederhana saja, kuncinya: dorongan publik yang merindukan hidup lebih sehat.

Senjakala industri rokok, tidak terkecuali, juga akan datang di Indonesia. Tapi, melihat tren di lapangan dan keengganan pemerintah menerapkan regulasi, kondisi itu tidak mungkin tercapai dalam tempo setengah abad, apalagi besok pagi. Mungkin sunset itu akan datang 100, 120, 150 tahun, atau dua abad lagi, entahlah. Yang jelas, senjakala itu tak akan terjadi tiba-tiba seperti kekhawatiran hiperbolik yang





selalu disuarakan industri.

Industri, sebagai mana disebut peneliti Yale University, Brownell dan Warner, dalam makalahnya *The Perils of Ignoring Industry*, menggunakan seluruh perangkat *public relations* sebagai senjata. Mereka menggunakan petani dan buruh sebagai juru bicara di media, menyatakan kerisauan atas nasib mereka jika regulasi diterapkan. "Ini senjata utama mereka untuk menetralkan opini publik dan mementahkan rencana intervensi pemerintah," tulis Brownell.

The Tobacco Institute, lembaga riset pengembangan rokok yang dibentuk raksasa industri, menekankan pentingnya strategi untuk habis-habisan dalam perang opini ini. Penggalan dokumen bernomor TIMN0015033-0015064 menunjukkan hal tersebut:

"...Legislators do not act in vacuum. It is public opinion that ultimately will dictate the winner of these battles..."

Perang opini itulah yang kini terjadi di Indonesia dalam kasus industri rokok versus dorongan regulasi. Di satu pihak, jaringan pengendalian tembakau menyebarkan opini dengan kecepatan seekor siput. Pelbagai kegiatan (diskusi akademik, seminar, edaran hasil riset) dilakukan hanya dengan memanfaatkan jejaring dengan mereka yang peduli. "Kalau pun

ada dana dari pihak asing, itu hanya dana operasional. Tak ada yang mewah," kata Setyo Budiantoro. Di pihak lain, industri menyiapkan sumber dana melimpah. Industri sanggup membayar agen *public relation* top, pengacara terbaik, juga barisan tim kreatif hebat untuk membuat jingle dan film pendek yang atraktif, halus, dan keren. Iklan komersial, iklan layanan masyarakat, menjadi sponsor acara olah raga-musik-pentas seni-film, menjadi penyandang dana kampanye politisi, semuanya adalah bagian dari perang membangun publik opini.

Dalam perang opini inilah berbagai isu dengan mudah dipelintir secara ekstrem, sehingga muncul kesan bahwa jaringan pengendalian tembakau berhadapan vis a vis dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti petani tembakau, ilmuwan dan dokter yang pro rokok, buruh pabrik rokok, dan puluhan juta pecandu rokok. Jaringan ini juga dikesankan berdiri diametral dengan negara yang berkepentingan pada perolehan pajak dan cukai industri.

Widyastuti Soerojo, salah satu pionir jaringan pengendalian tembakau di Indonesia, merasakan efek strategi memecah belah yang dlancarkan industri. "Seperti strategi *divide et impera*. Kita dibuat berseberangan satu sama lain," kata ahli kesehatan masyarakat ini. "Sepuluh tahun saya bergerak dalam isu pengendalian tembakau, saya mendapati fenomena *divide et impera* sebagai jurus khas industri rokok di Indonesia," katanya.

Di berbagai negara, Widyastuti melanjutkan, publik berhadapan langsung dengan industri dalam soal pengendalian rokok. Negara hadir sebagai penengah, baik dalam bentuk pengadilan dan upaya legislasi di berbagai level. Lain halnya dengan di Indonesia. "Di sini, industri bersembunyi tangan. Mereka *invisible*, tak terlihat, tapi menggerakkan berbagai kelompok masyarakat untuk saling berhadapan," kata Widyastuti. "Negara, yang diharapkan menjadi penengah dan menjaga kepentingan publik, sayangnya, diam dan membiarkan kelompok-kelompok masyarakat terpecah."

Pernyataan Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan cermin strategi *divide et impera* dan suksesnya opini publik yang dibangun industri. Anggota DPR dari daerah pemilihan Kudus, Jawa Tengah, ini tegas menyatakan bahwa hak azasi manusia paling tinggi adalah hak untuk hidup. "Karena

itu penting bagi saya untuk memastikan bahwa tak ada nyawa seorang pun yang melayang sebab merokok,” katanya.

Namun, Eva melanjutkan, “Lebih penting lagi: tak ada seorang pun buruh pabrik rokok yang harus kehilangan penghidupan sebab mata pencahariannya dimatikan gara-gara dampak pengendalian tembakau.” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Eva, merupakan partai yang dekat dengan para petani dan pekerja tembakau. “Kami memang akan terus setia dengan misi perjuangan, yaitu membela wong cilik,” katanya dalam wawancara dengan tim penulis buku ini.

Untuk urusan tembakau, PDI Perjuangan akan berpihak pada hidup jutaan buruh dan petani. “Ini bisa dibilang urusan nasionalisme. Ada kepentingan nasional yang dipertaruhkan,” kata Eva. “Kepentingan nasional kita saat ini masih seputar pertanian, itu fakta. Maka negara jangan hanya memperjuangkan agenda WHO yang disetir negara maju.”

Sentimen nasionalisme sengaja dibangun oleh industri dan pihak terkait. Kretek diagungkan sebagai bagian warisan budaya yang harus dijaga – meskipun harus dibayar dengan kematian dan tergerusnya kualitas kesehatan publik. Kita lupa, kretek dan nikotin merupakan ‘budaya impor’ yang dibawa kolonialisme Belanda. “Kalau pun benar kretek adalah budaya asli, apakah harus dipertahankan membabi-butakan dengan pertarungan kualitas kesehatan publik,” kata Dr. Kartono Mohamad, salah satu pegiat jaringan pengendalian tembakau.

Industri menggunakan nasib petani tembakau dan buruh sebagai tameng utama, tak peduli kualitas hidup mereka amat memprihatinkan (baca *Bab 1: Saya Tidak Anti Rokok*). Kelompok-kelompok yang seolah membela kepentingan petani tembakau didirikan. Dengan pelbagai siasat, petani didorong untuk tetap menanam tembakau, meskipun hasilnya kurang menguntungkan. Menurut Kartono, ada beberapa petani yang telah menghubungi para aktivis dan menegaskan niat mereka untuk mengganti kebun tembakau dengan menanam kopi. Tembakau tidak lagi menguntungkan karena hambatan cuaca yang tak menentu, politik ijon dan ulah grader para tengkulak. Namun, “Menurut pengakuan petani, mereka dihalang-halangi mengubah tanaman -- harus tetap tanam tembakau,” kata Kartono.

Hakim Sorimuda Pohan, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, mengisahkan pengalamannya bertemu para buruh dan petani tembakau di berbagai daerah di Indonesia. "Mereka seperti dijerat dengan neokolonialisme modern," katanya. Untuk menanam tembakau, petani harus berhutang modal pada tengkulak. Namun, pada saat panen, harga dengan leluasa ditentukan para grader dan tengkulak. Tak ada kekuatan tawar dari petani. Marjin keuntungan dari panen yang tipis membuat mereka terpaksa berhutang modal lagi untuk masa tanam berikutnya. "Begitu terus," kata Hakim, "Akibatnya petani tembakau tak bisa lepas dari lingkaran setan."

Abdillah Ahsan, peneliti dari Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, membenarkan bahwa nasib petani tembakau relatif memprihatinkan. Riset Lembaga Demografi menunjukkan, biaya produksi menanam tembakau Rp 8.386 per meter persegi sekali masa tanam, dengan hasil Rp 12.448. "Petani hanya untung Rp 4.000 per meter lahan untuk setiap masa tanam," kata Abdillah. Dengan kepemilikan tanah yang tak seberapa luas, tak sampai satu hektar, bisa dibayangkan marjin panen yang didapat petani mungkin tak cukup untuk biaya hidup.

Jika nasib buruh rokok dan petani tembakau tak secemerlang klaim industri, pertanyaan selanjutnya adalah: "Siapa yang menanggung siapa dalam konteks pengendalian tembakau?" Abdillah Ahsan merespon pertanyaan ini dengan hasil risetnya, "Kenyataannya, buruh dan petani tembakau selama ini tidak berada dalam porsi biaya operasional industri rokok secara layak. Jadi, silakan menafsirkan sendiri, betapa industri berkepentingan menjaga struktur dan kondisi saat ini."

Mawarwaty, mantan delegasi RI pada proses sidang-sidang WHO saat merancang Framework on Tobacco Control (FCTC), tahun 1995-2002, menolak jika pengendalian rokok disebut sebagai agenda tunggangan negara maju. "Justru pada awalnya, topik ini merupakan inisiatif negara berkembang, yakni Indonesia, India, Thailand," katanya. "Kami gelisah, kualitas kesehatan publik tergerus epidemi merokok. Kerja sama internasional dibutuhkan, mengingat efeknya sudah lintas negara."

Pada proses pembahasan awal, Mawar mengenang, Amerika Serikat, Jepang, Inggris justru kencang menentang gagasan FCTC. "Sebab, mereka membawa kepentingan industri," kata mantan Sekretaris Utama Badan



Pengawasan Obat dan Makanan (POM) ini. “Amerika punya Philip Morris, Inggris punya BAT, dan Jepang punya Japan Tobacco. Itu sebabnya, negara maju di awal-awal sangat menentang FCTC.”

Kesaksian Mawar ini sejalan dengan apa yang ditulis Brownell dan Warner dalam *The Perils of Ignoring Industry*. “Bertahun-tahun proses awal perancangan FCTC mendapat tentangan keras dari beberapa gelintir negara maju, yang dipimpin Amerika Serikat,” tulis mereka. Namun, negara-negara berkembang tidak surut dan meneruskan langkah pembentukan FCTC.

Pada 2003, World Health Assembly, sidang menteri kesehatan sedunia, resmi menghasilkan kesepakatan FCTC yang antara lain mengatur harga tinggi, regulasi ketat soal iklan, dan juga larangan pemasaran agresif. Amerika Serikat termasuk yang bersikap menggantung sampai saat-saat akhir. Bahkan, Presiden George Bush senior tidak menyerahkan draf FCTC kepada Kongres untuk dibahas. “Apa yang terjadi pada FCTC ini membuat Amerika Serikat mendapat nama buruk, dikenal sebagai negara yang lebih mementingkan industri ketimbang kesehatan publik negara berkembang,” tulis Brownell dan Warren.

Belakangan, setelah mendapat sorotan serius dari dunia,

pemerintahan Bush setuju meratifikasi FCTC. Harga jual rokok pun dikerek naik, regulasi iklan diperketat, dan berbagai negara bagian menerapkan aturan yang tak lagi toleran pada perokok. Hal inilah yang kemudian berdampak serius pada kesehatan finansial Altria, induk perusahaan Philip Morris.

Drama pembentukan FCTC tadi menjelaskan dengan gamblang betapa informasi telah dipelintir. FCTC disebut sebagai agenda negara maju. "No way. Tidak benar itu," kata Mawar dengan nada tinggi. "Kami, delegasi Indonesia, ikut dalam sidang-sidang di WHO, dibiayai uang negara. Kami diberi tugas membela kepentingan Indonesia," katanya.

Saban kali menjelang rapat FCTC, di Jenewa atau di tempat-tempat lain, delegasi RI terlebih dulu bertemu dengan banyak pihak, termasuk Departemen Keuangan, Direktorat Bea dan Cukai, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri. "Kami juga bertemu dan mendengar kelompok petani tembakau dan wakil industri," kata Mawar. "Jadi, semuanya dikaji komprehensif, bukan tiba-tiba dan tanpa pertimbangan. Waktu itu delegasi RI meminta supaya usulan mengkriminalisasi anak-anak yang membeli rokok, tidak perlu diterima, karena hal itu masih banyak terjadi di Indonesia."



Mawar melanjutkan, sebagai kesepakatan atau tapak, FCTC memang dirancang tidak mengikat sebagai obligasi negara yang meratifikasi. "Namanya saja *framework*, tapak kerja. Silakan negara masing-masing mengembangkan aturan yang sesuai," katanya. Setiap negara diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisinya, termasuk menyiapkan berbagai skema pertanian dan industri. Celaknya, Indonesia tidak kunjung meratifikasi FCTC sampai kini. Akibatnya, "Suara Indonesia tidak didengar dalam berbagai sidang dan kelompok kerja FCTC," kata Mawar.

Indonesia juga tidak bisa memanfaatkan Global Fund, dana yang digalang untuk membuat program-program yang terkait dengan pengendalian tembakau. Brazil, misalnya, sebagai negara yang meratifikasi FCTC, bisa mengakses dana pelatihan dan fasilitasi peralihan komoditi tanam yang dibutuhkan petani tembakau yang makin sulit panen seiring perubahan iklim. Berbagai skenario jaring pengaman telah disiapkan FCTC untuk mengiringi penerapan pengendalian rokok di berbagai negara. "Jadi, tidak betul jika disebut bahwa FCTC bertujuan mematikan total industri rokok. Nasib petani tembakau dan buruh rokok termasuk dalam pertimbangan," kata Mawar.

Bahkan, andaikata betul nasib petani tembakau dan buruh rokok ada di tepi jurang lantaran regulasi rokok, Mawar mempertanyakan skala prioritas pemerintah dan legislator pengambil kebijakan publik. "Bagaimana dengan nasib puluhan juta anak yang terpapar asap rokok terus-menerus di rumah mereka sendiri?" katanya. "Kalau negara sudah tidak lagi memperhatikan kualitas generasi penerus, apa lagi yang bisa kita harapkan?"

Forthcoming Law

UCL TSEL 3G 2:40 PM 71%
Legacy Tobacco Documents Library
legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKS& SEARCH HISTORY PRINT

Indonesian Forthcoming Law on Health

Title: Indonesian Forthcoming Law on Health
 Bates #: 30404812-30404813 >

Page 1 of 2

INDONESIA (333) P.T. BAT INDONESIA REP. OF INDONESIA

P.T. BAT INDONESIA
Kawasan Industri Cigugur, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

PROSUDIR TRANSMISSION

TO : Dr. Sharon Bayer
FAX : 0704-440 281
FROM : Ikhlas Sardjono
DATE : 5 August 1992

Re : Indonesian forthcoming law on health

The industry had a meeting last Friday to discuss the above mentioned. The situation is quite urgent as the Ministry of Health tend to publish the legislation for the 19th September. In fact, the legislation will cover on nicotine and psychoactive. On the pharmacological chapter, the subject materials will be nicotine using chemical additive. Using the addition by one of the members, nicotine is claimed to be an addictive substance although it does not specifically stated that this claim will appear in the forthcoming law. This claim might already indicated the anti smoking bill to develop view that nicotine is an addictive and is definitely refer to tobacco/cigarette market (apply to all kind of cigarette) that cigarette sales will probably be controlled like other addictive substance i.e. drugs. Furthermore, we propose that they will bring this revision up to the House of Representatives and give attention into a range of legislation. As well as the proposal on relation to ingredients, what are they going to restrict or control it (define the "range" or "quantity" or other interpretation that we would not wish to disclose).

All chapter of the legislation will be clarity in the Government's Regulatory Regulation section. Therefore, it is important to know the Regulatory Regulation to clearly understand the exact provision of both chapter. The industry (BAT, BONGKOH, GUNUNG, OR SAMPUNG, RIZ, BONGKOH/PHILIP MORRIS and GAPP/DAWREKCO) will influence the Government institutions to have the possibility to establish the Government regulation to amend the existing law. We want to use these benefits on smoking and environmental tobacco smoke that we received exactly from cigarette (the BONGKOH, The Scientific Controversy, Habit of Addiction). However, we would be grateful if you could give us more information of similar matter that has happened in the other countries, for us to be able to use as a comparative study.

With regard to this situation, the Cigarette Regulation (State and State) that still existing and has become the part of the parties involved in the Revision of the House of Representatives. We think the draft law will be necessary to attend our habit referring to this could be used useful. Your view on this suggestion is much appreciated.

20000611

uni. TSEL 9G 2:54 PM 70% [max]

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKS&S SEARCH HISTORY PREFS

Indonesian Forthcoming Law on Health

Title Indonesian Forthcoming Law on Health
 Bates # 30404113-30404113 >

Page 3 of 3

170 40 00 18 40 01:40: 0000113 000 02 01 000000 0 00

P.P. DART Indonesiana Page 3

Meanwhile, I have already the confirmation that a representative from Indonesian National Association (ITSI) will attend the seminar. Considering the seminar as a very important occasion to be brought up, in view that the industry continues to be environment and health related, they propose to broadcast the program during the event, as I already mentioned to you earlier of the Non-Smoking Movement. The time seemed to be very attractive, we could have it broadcast on English News Service Programme which will be reach by 100 viewers from different states. The charge of the coverage is US\$ 2,500.--. I would like to have your opinion as BAT is leading the industry on the environmental and smoking & health issues and what we should do to help help to be up by the Industry Association.

By the way, I already have the 1st and copies of the proposal of Prof. Sulaiman, Prof. Wicaksono, Dr. Pauli Hartono and Dr. Charlie Perrier. I am waiting for yours and Prof Jan Hindmann. Have you got a business entry card or you don't need one? Please let me if Prof. Jan Hindmann.

Thank you for the contacts which already been established, there will be one more from Prof. Jan Hindmann. I am also making the title of the seminar / For East Banking Issues Briefing.

Waiting for your comments, I remain

With kind regards,
Sally
 Sally S. Stone

30404113

170 40 00

Insert Bosye

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKMARK SEARCH HISTORY Prefs

[Note regarding excise issues in Indonesia]

Title [Note regarding excise issues in Indonesia]
Notes # 322016333-322016594 ▶

Page 1 of 2

Mark Jennings
10/10/99 03:46

To: Werner Dippo@BAT
Cc: Dippo C. Manufacturing@BAT, Ernie Kausch@Ducherry@BAT, Jim Howards@Research@BAT, Lumpy@AP@BAT, Hal Amos@A&T@BAT, C@BAT
Subject: Indonesia

URGENT

Werner,

I DON'T KNOW if you have heard, but we have been recently having some small problems with excise.

Briefly, the Korean lobby (around 80% of the total market of 200 Billion) succeeded in convincing the government to legislate excise in a way that would have destroyed BAT Indonesia and Rothmans Indonesia.

It has taken us 6 months of lobbying to get this legislation reversed.

The government, in addition to reversing the excise regulations has now passed Smoking and Health legislation (Presidential Decree) requiring the Korean manufacturers to reduce their cigarette deliveries by enormous amounts (down to 20 mg Tar / 1.5mg Nicotine), now it is they that are very much on the defensive.

This success was made possible by us winning some friends at senior levels in the government infrastructure, the result was that the excise amendment in our favor was imposed on the Customs & Excise Department (a Tochtergesellschaft of Gustang Oelaram) by the Co-ordinating Ministry, the most senior ministry.

There is now a real chance that cigarette deliveries will become an important issue, both in terms of government limitation and future excise structure. This is very good news for us and very bad news for the large Korean manufacturers, a typical hand made kretek has a Tar delivery of over 50 mg, a machine made Kretek over 30mg. The market weighted average Tar for Indonesia is above 40 mg.

The Indonesian government is ignorant of methods and procedures to measure Tar & Nicotine.

Our most senior friend, the most senior member of the staff in the Co-ordinating Ministry has asked us if he could visit one of the BAT laboratories and if possible a government monitoring laboratory to see how monitoring and control of deliveries works.

I have also indicated that we, BAT Indonesia would be willing to help the government start up their own lab to monitor deliveries.

I am assuming that as a result of the merger the new BAT group will have surplus lab equipment that we could give them.

Now I come to the request that I have of you.

Our contact, Mr. Dippo Alan, wishes to visit one of our labs and a government lab at short notice. I told him which were our best facilities around the world and he has a desire to visit Germany. (We are naturally paying for the visit).

His wish is to fly out of Indonesia on the 15th of this month, I know this is very short notice.

Could you allow him to see the lab in Bayreuth and have somebody explain (his English is excellent, educated) how the control and monitoring of deliveries works?

I realize that the short notice is probably not sufficient to arrange a visit to a government facility.

ms TSEL 3G 2:59 PM 60%

Legacy Tobacco Documents Library
 legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY PREFS

[Note from Sharon Boyse to Dahlia Sardjono regardi...]

Title [Note from Sharon Boyse to Dahlia Sardjono regarding insurance]
Notes < 500863272-500863273 >

10 -5 Page 1 of 2 +5

 **BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED**

TO: Dahlia Sardjono - BAT Indonesia
CC: Brendan Brady
FROM: Dr. Sharon Boyse
DATE: 28 June 1994
SUBJECT: Insurance

Dahlia -

Brendan passed on to us your request for information on smoking and health.

While not being entirely sure what was required, I take it you are looking for scientists that can be quoted in support of the notion that smoking has not been proven to be harmful to the health. I suggest you provide to the Director of Industrial Goods a copy of the list of scientists in the appendix of the Smoking Issues Claims and Responses all of whom, you may recall, have testified before US Congress that they do not believe smoking to be a cause of disease. You may also care to reference the book Smoking and Common Sense by Tage Voss, a Danish medical doctor, a copy of which you or Ole should have received over a year ago.

If this wasn't what you meant, then please could you confirm more precisely.

In terms of the latter two requests, obviously that information will come out of Indonesia.

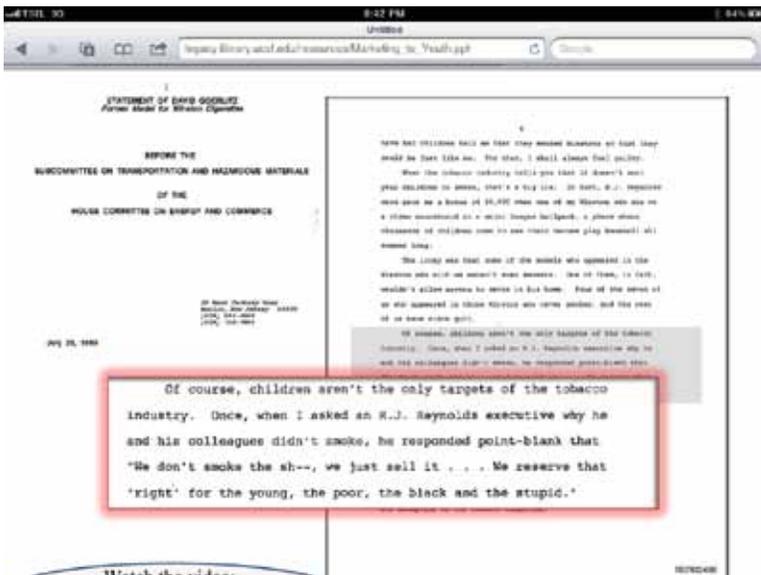
Please could you also send to us at your earliest convenience a copy of the industry 'white book' on tobacco that we saw in its Indonesian version in Singapore.

With kind regards,


500863272

MELBANK KNOWLE GREEN STAINES MIDDLESEX TW18 1BY
 SMOKING ISSUES DEPARTMENT DIRECT FAX NO: 876 4886

Marketing to Youth





PM USA Research Center - Young Smokers Prevalence, Trends, Implications and Related Demographic Trends - March 31, 1981 by Myron E. Johnston

1. For over fifteen years certain demographic and social trends have been driving the American cigarette industry growth. Now, one by one, these powerful social and demographic forces are turning against us, and by 1995 all will be operating against us.

The trends are:

1. After increasing for over a decade, the prevalence of teenage smoking is now declining sharply.
2. After increasing for over a decade, the average daily consumption of teenage smokers is declining.
3. After increasing in gross sales from 1967 to 1979, the absolute number of 15-19 year olds will decline 22 percent during the 1980's, with the period of steepest decline beginning in 1985.
4. Beginning in 1981, the absolute number of 10-14 year-olds (the age during which average daily cigarette consumption increases most rapidly) will begin to decline, after increasing for the past 20 years.
5. In the first time in a decade of polling, average daily cigarette consumption as reported on the National Youth has declined.

It is important to know as much as possible about teenage smoking patterns and attitudes. Today's teenage is tomorrow's potential regular customer, and the overwhelming majority of smokers first begin to smoke while still in their teens. In addition the ten years following the teenage years is the period during which average daily consumption per smoker increases to the average adult level. The smoking patterns of teenagers are particularly important to Philip Morris:

Because the young men and women have been heavily recruited, and because of the importance of these data to the company, I have chosen to report the data in a format of somewhat greater detail than will be seen in all of the materials at hand.

2. The young smokers, up to 1979, are concentrated in those states which are producing about twenty percent and probably more a decade or two ago. However, a pronounced secular decline, and the corresponding reduction of smokers first begin to smoke while still in their teens. In addition the low rates following the teenage years in the period during which average daily consumption per smoker increases to the average adult level. The secular decline of teenagers are particularly important to Philip Morris: of the eleven percent of about the entire age of smokers in 1981 age 10, seven are Philip Morris smokers, and the share tends to be higher in the youngest age group for all markets and cigarette price packages and for all lights and heavies.



THE YOUTH AND THE MARKET FOR THE YOUTH

In the years to come we must get our share of the youth market, and I believe unfairly, constrained from directly promoting cigarettes to the youth market: that is, to those in the approximately twenty-one year old and under group. Realistically, if our Company is to survive and prosper, over the long term, we must get our share of the youth market. In my opinion this will require new brands tailored to the youth market:

At the outset it should be said that we are presently, and I believe unfairly, constrained from directly promoting cigarettes to the youth market: that is, to those in the approximately twenty-one year old and under group.

Realistically, if our Company is to survive and prosper, over the long term, we must get our share of the youth market. In my opinion this will require new brands tailored to the youth market:

The cigarette that was: Was larger and was called? Because these cigarettes will have to be accepted by concentration of income determining governments in the coming years to come and become national leaders.

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

WIRETEL 30 8:42 PM 841 834

legacy.library.usaf.edu/resources/Marketing_to_Youth.pdf

Brown & Williamson
16927legacy.library.usaf.edu/sid/waq34699

MARKETING INNOVATIONS, INC.
BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION
PROJECT REVIEW

PROJECT: Youth Cigarette - New concepts

RECOMMENDATION: We suggest new ideas for the youth-cigarette field...

CONCLUSION: While the government could not permit us to sell certain to a cigarette, it may be possible to use artificial ingredients to develop a safe taste and aroma. Suitable names might be: SUGAR, SUGAR-CIGARETTE, SUGAR-CIGARETTE.

APPLE FLAVOR
Apples connote goodness and freshness and we see many possibilities for our youth-oriented cigarette with this flavor. Apple cider is also a possibility.

SWEET FLAVOR CIGARETTE
We believe that there are pipe tobaccos that have a sweet aromatic taste. It's a well known fact that teenagers like sweet products. Honey might be considered.

WIRETEL 30 8:42 PM 841 834

legacy.library.usaf.edu/resources/Marketing_to_Youth.pdf

January 11, 1975

SECRET
No. 204 By [Signature]

Mr. S. A. Tinker

Our attached recommendation to expand nationally the successfully tested "Best the Fugh" ad campaign and new Redline-type blend is essential step in meet our marketing objective, to increase our gross sales. To ensure increased and longer-term growth for CAMEL FILTER, the brand must increase its share penetration among the 14-24 age group which have a new set of more liberal values and which represent tomorrow's cigarette business.

Direct media spend to new into the brand's financial but market results expect, though, that this risk is small.

The current media spending level will be maintained since test market experience indicates no significant short-term sales gains from increased spending. Other competitive brands such as WATSON, SPECTOR, and VIRGINIA SLIMS with sharply directed advertising have demonstrated significant growth rates comparable with CAMEL FILTER's under spending level. We would prefer, as we did for WATSON, to demonstrate an increased growth rate with this responsibility and then give consideration to asking for extra media.

J.P. Wick

JPW:jh
Attachment

841 834

Nabisco Document

msf TSEL 30 4:02 PM 50%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Last Search

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKS&G SEARCH HISTORY PREFS

RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREH...

Title: RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

Date: * 1/20/2004 10:05:21 *

Page 58 of 174

April 17, 1996, Shareholders Annual Meeting 58

1 have undoubtedly read the response that's in
 2 the proxy, and I think that's sufficient at
 3 this time. Is there any other comment on
 4 this particular matter?

5 MICROPHONE ATTENDANT:
 6 Mr. Chairman, I'd like to
 7 introduce Anne Morrow Donley, a shareholder.

8 THE CHAIRMAN: Yes.
 9 Ms. Donley, hello again.

10 MS. DONLEY: Hello again.
 11 There are so many illnesses associated with
 12 environmental tobacco smoke that affect
 13 young children. The infants -- the Sudden
 14 Infant Death Syndrome, which occurs more
 15 frequently, we understand from several
 16 studies, among families who smoke than among
 17 those who do not, the fact that there are
 18 many ear infections among children who are
 19 around cigarette smoking and cigar smoking
 20 and so on.

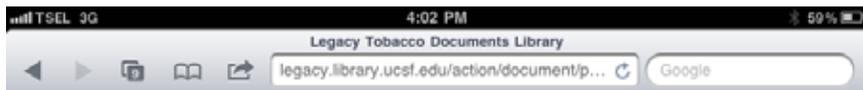
21 AND so my question to you is --
 22 and also, by the way, the most recent
 23 Scientific American that has come out -- 1

RUSSELL COURT REPORTING, INC., (910) 961-6057

02/20/04

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA



BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY PREFS

RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREH...

Title: RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

Notes: 4 520800648/0821

Page 60 of 174

April 17, 1996, Shareholders Annual Meeting 59

1 don't think they're on your Board yet, but
2 the Scientific American has an article in
3 which it talks about this, and it says that
4 young children who are around environmental
5 tobacco smoke may indeed suffer from lung
6 cancer later in life as a result of being
7 around it.

8 So my question is to you and each
9 member of the Board sitting there, if you
10 indeed have children and you have grand --
11 or you have grandchildren, would you want
12 people to be smoking around those children
13 and grandchildren in public places and in
14 private places?

15 THE CHAIRMAN: Very good.
16 Thank you.

17 MS. DONLEY: Are you going to
18 answer my question?

19 THE CHAIRMAN: I really lost
20 the question. Could you restate it, please?

21 MS. DONLEY: The question
22 is -- well, two parts. One: Do any of you
23 have children or grandchildren? Second

RUSSELL COURT REPORTING, INC., (910) 961-6057

53988 071

TS&L 3G 4:03 PM 50%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Last Search

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY Prefs

RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREH...

Title: RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS.
 Bates = 320556-49,7521

Page 81 of 174

April 17, 1994, Shareholders Annual Meeting 60

1 part: Do you want anyone smoking around
 2 those children or grandchildren in public or
 3 private?

4 THE CHAIRMAN: I'll speak to
 5 that, and let me just say it this way. This
 6 is a very, very serious matter. And I
 7 consider it such.

8 My wife and I both smoked. She
 9 had four children, and strangely enough,
 10 they were big babies. They grew up to be
 11 very healthy. We now have eleven healthy
 12 grandchildren. I love each one of them, and
 13 I will not restrict the right of any of them
 14 if they want to smoke. I will try to
 15 discourage them --

16 MS. DONLEY: That's not my
 17 question, sir. Excuse me for interrupting
 18 you. I'm not asking you whether you want
 19 them to smoke, I'm asking whether you want
 20 people to smoke around them.

21 THE CHAIRMAN: I will not
 22 restrict anybody's right to smoke. If the
 23 children don't like to be in a smoky room.

RUSSELL COURT REPORTING, INC., (910) 961-6057

2/6 08:23

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

4:03 PM 59%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Basic Search Advanced Search Expert Search Bookbag Search History Prefs

RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREN...

Title: RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
 Bates # 52000640/0021

Page 62 of 174

April 17, 1984, Shareholders Annual Meeting 61

1 and I wouldn't like to be, they'll leave. I
2 don't know if you've got any grandchildren;
3 I do. And if there is smoke around that's
4 uncomfortable, they'll leave.

5 MR. DONLEY: An infant cannot
6 leave a room.

7 THE CHAIRMAN: Well -- okay.
8 At some point they begin to crawl, okay?
9 And then they begin to walk, and so on.
10 Anyway, I guess that's enough said.

11 Thank you very much.

12 MICROPHONE ATTENDANT:
13 Mr. Chairman, may I present
14 Michael Crosby.

15 THE CHAIRMAN: Father Crosby.

16 MR. CROSBY: Mr. Harper, I was
17 going to say something else, but when people
18 crip at what you just said, that -- that
19 children will crawl out of a room and will
20 have to wait until they crawl --

21 THE CHAIRMAN: That's a bit of
22 a misstatement, father.

23 MR. CROSBY: I mean, that is

RUSSELL COURT REPORTING, INC., (910) 961-6057

52000 070

TSLE 3G 4:03 PM 50%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Last Search

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY Prefs

RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREH...

Title: RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

Pages: 320856-68,70521

Page 63 of 174

April 17, 1996, Shareholders Annual Meeting 63

1 insensitive. And I think that's terribly
 2 insensitive that the shareholders would clasp
 3 at a statement like that. I don't want to
 4 do a guilt thing, but it really is a
 5 disappointing thing. You might disagree,
 6 but children should not have to take in
 7 other peoples' smoke. We don't need it and
 8 we can walk out; a child can't.

9 If the parents are in a car and
 10 if parents -- I mean, and they have children
 11 in their car and they're smoking, the
 12 children can't say, "stop the car". I mean,
 13 they can't do that. And we've got to be
 14 more responsible on this.

15 Anyway, my -- my point that --
 16 that I was going to ask the question is:
 17 You see, in your first paragraph there,
 18 that -- the fact that there are specific
 19 warnings on cigarettes that are related with
 20 three other issues and that -- the first one
 21 that you mention is related to pregnant
 22 women.

23 And my point is, do you know of

RUSSELL COURT REPORTING, INC., (910) 961-6057

320860 071

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

TSSEL 3G 4:04 PM 50%
Legacy Tobacco Documents Library
legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY Prefs

RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREH...
Title: RJR NABISCO HOLDING CORP. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS.
Pages: 520890645/0821

Page 64 of 174

April 17, 1996, Shareholders Annual Meeting 53

1 any studies that have shown whether or not
2 those warning -- so-called warnings on the
3 side of cigarettes related to pregnant women
4 have any kind of effect at all? Has the
5 government -- I mean, has this Company,
6 independent of the government, done any
7 studies to show that? And if not, would the
8 Company entertain the possibility of doing
9 some studies to try to see how women can,
10 who are possibly at child-bearing age or
11 pregnant, not smoke? Is the Company doing
12 anything in that area?

13 THE CHAIRMAN: The Company is
14 concerned in this area. And again, I
15 suggest you talk to Mr. Johnston after the
16 meeting to explore that very difficult
17 subject and very important subject.

18 MICROPHONE ATTENDANT:
19 Mr. Chairman, may I present Carla
20 Freed.

21 MS. FREED: I'm sorry, I
22 wasn't -- I wasn't planning on talking to
23 this issue.

RUSSELL COURT REPORTING, INC., (910) 961-6057

48 89025

Young Adult Smokers Lifestyle

TSEL 3G 3:11 PM 67%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Basic Search Advanced Search Expert Search Bookbag Search History Pref

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Notes + 726015803617 +

Page 1 of 15

dependent on price & health care financing
Brand Affl
single

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

I. INTRODUCTION

An part of an investigation of the "new" smoker, a program of consumer research was undertaken. This research was done under the direction of Nelson & Eckhardt Advertising in early 1974. The purpose of this research was to gain insight into the perceptions, attitudes and behavior of younger, recently-starting smokers regarding initial product usage, current smoking and health concerns. In addition, an effort was made to determine reactions to alternative product positioning.

Since the group focus technique was used, findings are both qualitative and reported on in a subjective manner.

Maintain this report under - Smoker Analysis, Section 11.9.

II. KEY FINDINGS

Smoking starts with younger people for four reasons. One or more than one may be at work at any one time. The first factor is the desire of young people to look older than they really are. The second is peer pressure and doing what friends and authority figures do. The third reason is to rebel against parents with only modest risk. The fourth reason identified had to do with physical reaction. This physical reaction was described as a "high" or as a challenge to be strong enough to smoke without getting sick.

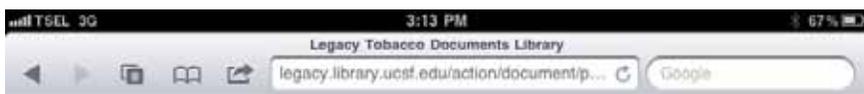
Once becoming regular smokers, young people will feel they were not addicted. They continued to smoke cigarettes because they helped them relax in social situations, eased tension while under pressure, helped pass time, provided a sense of security, helped pace activity and eased the change from one activity to another.

COURT ORDER
PURSUANT TO COURT ORDER

DEFENDANT'S EXHIBIT
1/11/84

EX 44

029760



BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY Prefs

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES
Notes: # 296210023617

Page 2 of 18

CONFIDENTIAL
PURSUANT TO COURT ORDER

II. KEY FINDINGS (cont'd)

Younger smokers have no real understanding of the tar levels of various brands but felt tar was the villain as regards cigarettes and health. They are critical about new or so-called products and would be reluctant in investing in a trial pack because of having had so many previous disappointments. Marlboro is thought of as the "expected" cigarette. Kool was thought of as a follow-up to chase a marijuana cigarette.

Health concerns exist among younger smokers. The smokers tended to be about the immediate effects of smoking - alleviate physical symptoms. One type of smoker rationalized smoking as a pleasure that outweighed the risks. Another felt that they didn't smoke enough to be dangerous. A third type rationalized his use of cigarettes by feeling he would quit before it was "too late." A final smoker group said that science would come to his rescue.

Reaction to Hi-Fi products were negative. While thought of as better for you, the trade off with taste didn't justify using them. People felt you just smoked more of them.

While the above comments apply to both men and women, it appeared that women were more passive and less outspoken than men about smoking. They seem to emulate men in their brand selection and their adoption of smoking in general.

III. DETAILED FINDINGS

In talking to young people about smoking, K&E found a striking difference between the young men and the young women. On the whole, the young men were exceedingly involved with all aspects of smoking while the young women can best be described as somewhat "wishy-washy" about the topic. To a large extent the smoking behavior of the young women seemed to reflect a copying of their male peers. Because of this, while much of what follows applies to the women to a certain degree, K&E decided to focus

029761

CONFIDENTIAL

UCSF TSEL 3G 3:14 PM 67%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

LAST SEARCH

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY Prefs

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Date: 4/28/6136835617

Page 3 of 11

- 3 -

III. DETAILED FINDINGS (cont'd)

our discussion of the findings on the young men. Specific differences between the two groups will be pointed out in a separate section of the report.

A. Starting to Smoke

Most of the young men spoken to indicated - very early initial experiences with cigarettes. Many talked about first trying a cigarette before the age of ten. Usually these were isolated experiences of stealing one cigarette from a parent, trying it and going no further for a few years. The next step in the process seemed to take place in Junior High School or in the early high school years. During this stage, the respondents recalled smoking cigarettes "behind the school," "at parties," "in the bathroom," etc. In discussing why they started, many indicated that they smoked because they wanted to look older or more mature. Several referred to older siblings who smoked and the desire to be like them. In effect, the respondents were talking about an emulation of the group just ahead of themselves. For these people, smoking provided a means of bridging the gap to that older age group and of giving the appearance of having the privileges and experience of those older than themselves.

Another important reason given for starting to smoke was peer pressure. One said over, respondents talked about the fact that, at that time, most of their friends were smoking and, if one did not smoke, he became an object of ridicule and teasing. Some recollected being called a "sissy" by friends until they started to smoke. In this vein, it is interesting to note that most of the cigarette smoking done at that time was described as group behavior - very few recalled smoking when alone during that period. It can probably be safely said that smoking also represented a means of reassuring themselves and telling others that they "belonged" to a group.

619762

CONFIDENTIAL

TSEL 3G 3:14 PM 67%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Basic Search Advanced Search Expert Search Bookbag Search History Prefs

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Notes + 7961360/3612

Page 4 of 15

A. Starting to Smoke (cont'd)

Smoking at that age, apparently forbidden by parents and other adult authorities, was a sign of courage and, importantly, reflected the "us against them" attitude of the early teen years. In discussing why they started to smoke, many cited the simple fact that their parents told them not to.

In the context of this discussion, the young men brought up their initial physical reaction to cigarettes. On this dimension, there seemed to be two different types of people. One type spoke of an extremely pleasant reaction to their first cigarette. The sensation among this group was that smoking, at that time, was like "getting high." Several recounted lying on the roof of the house at night and smoking one cigarette after another until they were on "high" they could barely stand up. Interestingly, there appeared to be some nostalgia for that feeling which seemed to disappear after smoking for a while.

The second type described their reaction to their first cigarette as "getting sick." The symptoms described ranged from dizziness and nausea to vomiting and "passing out."

To these people, learning to smoke became a challenge and they made a conscious effort to learn how to smoke. From their description, overcoming the unpleasant physical reaction became a strongly motivated goal. The psychological rewards for "conquering" smoking seemed to center on proving maturity and strength to themselves and others and, for the most part, they seemed to feel that it was worth the effort.

B. Current Smoking Behavior

While early smoking tended to be somewhat sporadic for these young men, and primarily engaged in only with the friends associated with starting,

624783

ucsf TSEL 3G 3:14 PM 67%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY PREFERENCES

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Notes: [Download PDF](#)

Page 8 of 15

- 8 -

B. Current Smoking Behavior, cont'd

Another interesting type of tension smoking related to social situations. Many respondents claimed a tendency to smoke a lot when they feel self-conscious or uncomfortable. This occurred when they felt that they were not really part of the group, or if they felt "different" from other people present, or if they did not know how to handle themselves in a social situation. These people indicated that at such times, a cigarette provided "something to do" making them feel more at ease.

Respondents seemed to feel that they also had a tendency to smoke more than usual when they are bored. They smoke in waiting classes, being alone with nothing to do, watching television, etc., in this context. When bored, the cigarette gives them something to do.

In many instances, smoking a cigarette was described as a "pause" or a "break." In one sense, this aspect of smoking was closely aligned to the traditional coffee break - the person is busy doing something and has a cigarette as a means of stopping for a few minutes to relax. In another sense, this "pause" aspect of smoking was described as an opportunity to stop for a minute to gather one's thoughts. This usually took place during the course of a conversation in which the respondent claimed he didn't know what to say next - the lighting of a cigarette provided an excuse or a postponement, allowing him to think.

An interesting observation of their smoking behavior made by the respondents was the tendency to light a cigarette with any "change of scene." The general feeling seemed to be that the lighting of a cigarette was an indication that they were going to do something - make a phone call, start a project at work; study, relax, etc.

Perhaps the underlying mechanism in all of the above, was the perception of the cigarette as a companion. For many, just the knowledge of possession of their cigarette was enough to provide some sense of "security." Being out of cigarettes caused anxiety for many - some went

020765

CONFIDENTIAL

TSSEL 3G 3:14 PM 67%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Basic Search Advanced Search Expert Search Bookbag Search History Preferences

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Rate + 7668130233612 +

Page 6 of 15

6 +

B. Current Smoking Behavior. (cont'd)

Another interesting type of tension smoking related to social situations. Many respondents claimed a tendency to smoke a lot when they feel self-conscious or uncomfortable. This occurred when they felt that they were not really part of the group, if they felt "different" from other people present, or if they did not know how to handle themselves in a social situation. These people indicated that at such times, a cigarette provided "something to do" making them feel more at ease.

Respondents seemed to feel that they also had a tendency to smoke more than usual when they are bored. They spoke of boring classes, being alone with nothing to do, watching television, etc., in that context. When bored, the cigarette gives them something to do.

In many instances, smoking a cigarette was described as a "pause" or a "break." In one sense, this aspect of smoking was closely aligned to the traditional coffee break - the person is busy doing something and had a cigarette as a means of stopping for a few minutes to relax. In another sense, this "pause" aspect of smoking was described as an opportunity to stop for a minute to gather one's thoughts. This usually took place during the course of a conversation in which the respondent claimed he didn't know what to say next - the lighting of a cigarette provided an excuse or a postponement, allowing him to think.

An interesting observation of their smoking behavior made by the respondents was the tendency to light a cigarette with any "change of scene." The general feeling seemed to be that the lighting of a cigarette was an indication that they were going to do something - make a phone call, start a project at work, study, relax, etc.

Perhaps the underlying mechanism in all of the above, was the perception of the cigarette as a companion. For many, just the knowledge of possession of their cigarettes was enough to provide some sense of "security." Being out of cigarettes caused anxiety for many - some went

029765

CONFIDENTIAL

all TSEL 3G 3:15 PM 67%
 Legacy Tobacco Documents Library
 legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Log Out Search

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY PREFERENCES

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Date: 198015012/5617

Page 7 of 15

7

B. Current Smoking Behavior (cont'd)

so far as to go out in the middle of the night to buy a pack. Several who had tried to stop smoking claimed that they were free as long as they knew that cigarettes were "there." And, many claimed that cigarettes made them feel better when alone and lonely.

C. Brand Perceptions

In talking to these young smokers about the different brands of cigarettes they have smoked, we found that they have little knowledge and, in fact, a great deal of misinformation on brand yields. In all of the sessions, not a single respondent knew the tar and nicotine level of the cigarette he or she smoked. In many cases, high tar brands were perceived as mild or high filtration cigarettes - for example, smokers of Benson & Hedges 100's who had switched from Marlboro because Benson & Hedges is mild and "better for you."

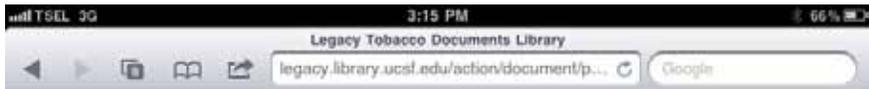
These young people showed somewhat confirmed preferences for menthol vs. regular cigarettes. The plain filter smoker was somewhat more likely to try a menthol occasionally - the menthol smoker often refused non-menthol even if nothing else was available.

In the course of their early smoking, the young men indicated a great deal of brand experimentation. Part of this was a function of smoking "whatever they could get their hands on" but a good deal of it was a conscious trying of different cigarettes. It was surprising to hear some fairly specific brands - e.g., Bull Durham and New Leaf - mentioned in this context. While this early experimentation does signal an area of opportunity, it has, unfortunately, a tendency to create a substantial amount of cynicism towards new or previously untried cigarettes. This is due to the fact that more often than not, the respondents indicated that they did not like the cigarettes they had tried. Taking this one step further, the respondents spoke of an unwillingness to spend the money for a whole pack of cigarettes (though to be expensive) to try something

029766

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA



BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY PREFS

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Date: 4/2001/0003/0612

Page 8 of 11

- 8 -

D. Attitudes Toward the Effects of Smoking on Health

Since this is the generation that grew up with anti-smoking films in school and anti-smoking campaigns on television, it was interesting to hear their feelings about the health issue. Concern about health among this age group was quite evident and should not be minimized. Most of the initial conversation centered on more immediate symptoms from smoking and concern about effects on physical prowess. Many cited the fact that they cannot run, swim or engage in any strenuous exercise with the intensity that they used to. They complained about shortness of breath and a general lack of endurance.

After some probing, the respondents' real concerns were health concerns - i.e., various heart and lung diseases. Basically, there were four distinct reactions to these problems. One type simply felt that the pleasure derived from smoking outweighs the risks.

A second type rationalized that he doesn't smoke enough to really endanger his health - interesting in view of the fact that the lightest smokers in these groups were up to a pack per day.

A third type was quite certain that he would stop "some day" when he is old enough to really have to worry about it. Ironically, one of the respondents who fell into this category had spoken of a parent who is dying of emphysema and cannot stop smoking.

Finally, the fourth type was relying on science to develop cures for all of these diseases by the time he could get them.

An interesting aspect of the respondents' attitudes about health was an apparent double standard for themselves vs. their parents. They fully recognized the fact that they were the ones who told their parents to stop after seeing school and commercial films, but when asked to recognize that with their current smoking, they merely shrugged their shoulders.

029785

CONFIDENTIAL

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
 Legacy Tobacco Documents Library
 legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO
 LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY
 HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

BASIC SEARCH ADVANCED SEARCH EXPERT SEARCH BOOKBAG SEARCH HISTORY PREFERENCES

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Notes: [78613663/9417](#)

Page 18 of 15

- 18 -

D. Attitudes Toward the Effects of Smoking on Health (cont'd)

In discussing how a smoker can limit the risk of serious disease without actually giving up smoking, the respondents clearly recognized the role of high filtration cigarettes. Their response to high filtration was basically negative: low-tar products being evaluated in terms of "trade-offs." Low tar was thought of as "better for you", but low tar cigarettes were perceived as having no taste and as being "like sucking air." The general feeling seemed to be "if I'm going to smoke, I might as well enjoy it." Many respondents claimed that they had tried a low tar cigarette, but found that they were smoking significantly more per day. These people felt that the increase in smoking was enough to cancel out the difference in tar and nicotine yield. It can be hypothesized that the underlying mechanism working against acceptance of high filtration brands in this age group is that the image of these cigarettes is contrary to one of the initial motivations for smoking - to look really sex strong.

E. Differences in Reactions of the Young Women

As mentioned earlier, the young women were simply not as involved with smoking as the young men were. The young men talked a great deal about tobacco, strength and "satisfaction" from a cigarette. The young men were also quite involved in the sensual aspects of smoking - aroma, texture, feel in the mouth, etc. All of this was, with a few exceptions, virtually absent from the interviews with young women.

On the whole, the young women tended to start smoking at an older age than their male peers - late high school or early college was the general starting time. They tended to try many lower brands and, very importantly, had a tendency to copy young men in their brand choices.

029769

029769

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA

TSEL 3G 3:15 PM 66%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Basic Search Advanced Search Expert Search Bookbag Search History Prefs

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Date: 4/2001/0001/0512

Page 11 of 11

- 4 -

IV. RESEARCH CONCLUSIONS (cont'd)

6. Findings apply only to independent groups and many of these are U.K. or Canadian residents using English cigarettes.

However, some research does have application to the U.S. Similar. When such research involved the pitfalls described above, was controlled and appeared consistent with other findings, it was included here for review.

V. RESEARCH RESULTS

A. Smoking by Children and Adults

1. Children

Those who start to smoke at a comparatively early age, at ten or twelve years, go through a long period of experimenting with cigarettes before taking up smoking seriously.

McKernell and Thomas in their social survey, "Adults and Adolescents Smoking Habits", 1947, showed that, at the age of sixteen, 57% of boys and 63% of girls were smoking at many as one cigarette a day. It was during this period that the foundations of the smoking habit were laid. Four out of five young people who had smoked more than one cigarette subsequently became regular smokers. Conversely, according to the survey, if a youngster were still a non-smoker at twenty, he would be unlikely to take up the habit.

With adults a different situation exists. Only an exceptional 2% smoke occasionally and intermittently. Nearly all regular smokers are nicotine dependent.

Dr. J. M. Hyner in his survey, "The Young Smoker", showed that the factors listed below influenced the smoking habits of adolescents:

029770

CONFIDENTIAL

msl TSEL 3G 3:16 PM 66%

Legacy Tobacco Documents Library

legacy.library.ucsf.edu/action/document/p... Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

LEGACY TOBACCO DOCUMENTS LIBRARY

HOME SEARCH LINKS & RESOURCES POPULAR DOCUMENTS ABOUT THE LIBRARY HELP

Basic Search Advanced Search Expert Search Bookbag Search History Preferences

YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Title: YOUNG ADULT SMOKER LIFE STYLES AND ATTITUDES

Notes: # 18015802/5617

Page 12 of 15

- 5 -

1. Children (cont'd)

a. Curiosity and excitement may be the initiating factors but, as the first few cigarettes are almost invariably unpleasant, curiosity may soon be satisfied.

b. More testing is the need for conformity or 'following the herd.' Boys who said some of their friends smoked were themselves non-smokers. Among the smokers, 82% admitted that all their friends smoked.

2. Peer pressure Linked with this need for conformity is bravado or the desire to appear tough.

A. Reaction to Children and Adults

B. Another factor is anticipation of adulthood.

3. Self

a. The factors already listed are associated with lack of educational success.

The unsuccessful schoolboy has to compensate for his failure and find status in the out-of-school culture, so he seeks to share the activities of older boys, drinking, driving and staying out late. He will probably leave school early and this could increase his smoking enormously. Fifteen-year olds who have left school are more than twice as likely to be smokers as those who are at school (Todd, 1969).

Smoking is most common among boys who come from large families in which older brothers and sisters smoke and parents condone the habit. Children of parents who smoke are more likely to succeed than those of non-smoking parents.

With adults a different situation exists. Only a few successive stages of young smokers, a fairly consistent picture of important factors is emerging. These are social class, parental example, the smoking habits of older siblings and friends, type of school, academic achievement, church attendance and drinking habits.

625771

CONFIDENTIAL

BONGKAH RAKSASA KEBOHONGAN

MENYOROT KEDIGDAYAAN INDUSTRI ROKOK di INDONESIA
